RAJAWALI PERS

MENYOAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DEMOKRASI

Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.

Editor: Erwin Hafid

Alauddin University Press

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN ALAUDDIN

MAKASSAR – SULAWESI SELATAN

MENYOAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DEMOKRASI

MENYOAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DEMOKRASI

Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.

RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

H. A. Marjuni.

Menyoal Pendidikan Islam dalam Era Demokrasi/H. A. Marjuni.
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.
x, 148 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 137
ISBN 978-623-372-603-0

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3590 RAJ
Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I.
MENYOAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DEMOKRASI

Cetakan ke-1, Agustus 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Copy Editor : Findi Daraningtyas
Setter : Fazri Ramadhani
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telepon : (021) 84311162
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah wa Syukurillah, atas segala rahmat Allah Swt. beserta selawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu di-*update* dan di-*upgrade*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 2 Mei 2021

Rektor UIN Alauddin Makassar
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas selesainya buku Menyoal Pendidikan Islam Dalam Era Demokrasi.

Karya ini menjelaskan sekelumit tentang persoalan Pendidikan yang berbasis pada demokrasi yang merupakan kebebasan dan kemerdekaan individu di atas norma keseimbangan antara diri pribadi dan orang lain dengan dua segi. Pertama, kebebasan dan aktivitas individu harus berjalan dalam keadaan terkontrol sehingga individu itu terlindung dari tipuan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat (sosial)-nya. Kedua, kebebasan berpikir dan beraktivitas bagi setiap individu manusia hanya akan melahirkan manusia individualis. Karenanya, aktualisasi itu tidak hanya menuntut daya kebebasan, tetapi juga memerlukan kebersamaan.

Pendidikan Islam khususnya, mempunyai prinsip-prinsip tersendiri, yaitu seperti prinsip tauhid, persamaan dalam sebuah wacana keterbukaan yang sering dikenal dengan syura (musyawarah/ demokrasi), dan konsep tentang kewajiban dan hak manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Di sinilah tujuan buku ini yakni bagaimana pendidikan Islam itu berperan dalam dunia demokrasi saat ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pimpinan UIN Alauddin Makassar serta pengelola Penerbitan Buku Referensi

Tahun 2022. Atas semua itu penulis berharap semoga buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ditulis sebagai "Amal Jariah" di sisi Tuhan, Amin.

Makassar, Maret 2022

Penulis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR v

PRAKATA vii

DAFTAR ISI ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Tauhid: Sebuah Paradigma Kebebasan 9

B. Syura: Sebuah Wacana Keterbukaan 11

BAB 2 PENDIDIKAN ISLAM 13

A. Hakikat Pendidikan 13

B. Dasar Pendidikan Islam 23

C. Tujuan Pendidikan Islam 27

D. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 30

BAB 3 DEMOKRASI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 49

A. Pengertian Demokrasi 49

B. Nilai-nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam 53

C. Tinjauan Demokrasi tentang Kurikulum 62

D. Tinjauan Demokrasi tentang Pendidikan Islam 71

BAB 4 DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ERA DEMOKRASI 85

A. Pendidikan Islam di Era Demokrasi 85

B. Korelasi Pendidikan dengan Demokrasi 109

C. Model Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi 115

BAB 5 PENUTUP 133

DAFTAR PUSTAKA 137

BIODATA PENULIS 147

BAB 1

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang dibekali potensi-potensi untuk dikembangkan. Secara objektif, dapat dilihat bukti-bukti yang jelas bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, juga makhluk yang sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang sudah sadar akan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan. Telah diakui oleh semua kalangan bahwa pendidikan Islam di Indonesia banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional maupun internasional, baik yang bergerak di bidang pendidikan,[1] politik, keagamaan dan bidang-bidang lainnya.

Konsep tentang Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pendidikan politik Islam modern. Dalam upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan

[1]Diskursus tentang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia yang dipresentasikan oleh para ahli pendidikan Islam dan para pengambil kebijakan, baik melalui tulisan-tulisan, jurnal, majalah dan sebagainya maupun melalui kegiatan seminar, penataran dan lokakarya telah memperkaya wawasan dan visi kita dalam mengembangkan pendidikan Islam. Berbagai pemikiran dan kebijakan mereka perlu dipotret, ditata dalam suatu paradigma sehingga model-model, orientasi dan langkah-langkah yang hendak dituju semakin jelas. Lagi pula kalau seseorang hendak melakukan pengembangan dan penyempurnaan, maka kata kuncinya sudah dapat dipegang sehingga tidak akan terjadi salah letak, arah dan langkah yang pada giliran selanjutnya dapat menimbulkan sikap *overacting* dalam menyikapi paradigma tertentu. Lihat Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 35.

di dunia Islam, para pemikir dari berbagai kalangan masyarakat Muslim mulai merambah misi baru untuk merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai kelompok. Padahal menurut penulis, Islam dan demokrasi saling memperkuat bahkan di dalam ajaran Islam terdapat nilai-nilai demokrasi.

Ada dua hal yang menjadi dilema di dalam pendidikan Islam. Pertama, berkaitan dengan elemen-elemen fenomenologis yang mengundang perdebatan apakah Islam *compatible* (cocok) dengan demokrasi atau tidak. Yang kedua, berkaitan dengan akar-akar demokrasi dalam pengalaman Islam.[2]

Bagi sebagian kalangan, terutama dalam lingkungan akademis dan media Barat, wacana mutakhir tentang Islam memunculkan keraguan serius mengenai kompatibilitas Islam dan demokrasi. Alasan yang kerap dikemukakan adalah, kaum revivalis Muslim mempunyai kelemahan dalam hal komitmen mereka terhadap demokrasi. Akibatnya, negara-negara dunia Islam selalu gagal dalam upaya membentuk suatu politik demokratis.[3]

Berkaitan dengan pendidikan Paulo Freire, cendekiawan Katolik dari Brazil ini begitu keras mengkritik sistem dan praktik pendidikan seperti gaya bank yang membelenggu akal dan nalar manusia pendidikan. Sejalan dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam, pendidikan yang dikehendaki Poulo Freire adalah pendidikan yang menempatkan

---

[2]Lihat Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi Pengalaman Baru Muslim Dalam Transisi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Pres, 2002), hlm. 9.

[3]Kegagalan tersebut misalnya, dikuatkan oleh temuan-temuan fakta *(fact finding)* yang dilakukan oleh lembaga *Freedom House* yang bermarkas di Amerika Serikat. Tak diragukan lagi, *Freedom House* merupakan lembaga pengamat kinerja HAM di seluruh dunia yang sejauh ini paling disegani. Lembaga ini, didirikan pada 1941, sudah menerbitkan laporan tahunan mengenai situasi "kebebasan" di seluruh dunia sejak 1951. Landasan klasifikasi *Freedom House* adalah studi komparatif dan empiris dengan menggunakan seperangkat kriteria sebagai rujukan. Laporan itu, yang makin terkenal sejak perubahan-perubahan mendasar terjadi di dunia pada 1989, menunjukkan bahwa kebebasan bisa diukur dan dioperasionalisasikan. Seperti disebutkan oleh Raymond D. gantil dalam *Freedom and the World: Political Rights & Civil Liberties 1987-1988*, kebebasan didefinisikan sebagai "adanya peluang untuk bertindak secara sepontan di berbagai bidang di luar kontrol pemerintah dan pusat-pusat dominasi potensial lainnya." Dan berdasarkan data indeks kebebasan *Freedom House* yang dikeluarkan Desember 2001, dapat ditemukan adanya jurang pemisah yang cukup dramatis antara negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan negara-negara nonmuslim. Lihat *ibid*., hlm. 10.

manusia pada posisi sentral dalam setiap perubahan yang terjadi, serta mampu pula mengarahkan dan mengendalikan perubahan itu. Mencela jenis pendidikan yang memaksa manusia menyerah kepada keputusan-keputusan orang lain. Pendidikan yang diusulkan adalah pendidikan yang dapat menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia.[4]

Kecenderungan Paulo Freire terhadap pendidikan di atas, tidak banyak berbeda dengan apa yang diajarkan Muhammad Saw., enam belas abad yang lalu: dengan konsepsi ajaran tauhid yang mulia, serta praktik pendidikan dan dakwah Islamnya yang begitu toleran terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat-sahabatnya. Beliau amat menghargai setiap perbedaan pendapat dari para sahabat, seperti perbedaan pendapat antara sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khatab.

Berbicara dalam konteks pendidikan Islam, Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap prestasi pendidikan Islam yang masih menempati posisi marjinal. Azra menyatakan bahwa dikarenakan pengelolaan yang secara umum kurang profesional, pendidikan Islam sering kali kalah bersaing dalam berbagai segi dengan subsistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain. Bukan rahasia lagi, bahwa citra dan gengsi lembaga pendidikan Islam sering dipandang sebagai subordinat dari pendidikan yang diselenggarakan pihak lain.[5]

Dalam kaitan dengan *statement* tentang posisi pendidikan Islam tersebut (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam), Mochtar Naim menuding bahwa dualisme dan dikotomi pendidikan yang diwariskan pemerintah kolonial, setidaknya, sebagai penyebab utama. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem yang dualistik ini menurutnya adalah: *Pertama*, arti agama telah dipersempit, yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini. *Kedua*, sekolah-sekolah agama telah terkucil dalam buku tersendiri dan menjadi eksklusif. *Ketiga*, sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam

[4]Lihat Paulo Freire, *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasan dan Pembebasan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 176.

[5]Lihat Azumardi Azrah, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru* (Cet. II; Jakarta: Logos, 2000), hlm. 60.

sangat rendah dan residual, dan karena masuknya residual, maka mutu tamatannya adalah medioker (tergolong kelas dua).[6]

Dua pendapat di atas memperlihatkan benang merah dari kelemahan besar yang diperlihatkan oleh lembaga pendidikan Islam, yakni kelemahan manajerial, eksklusivitas dan rendahnya prestasi. Jika diamati, maka ketiga titik lemah tersebut, kesemuanya merupakan permasalahan yang sangat esensial.

Atmosfir reformasi yang mulai bergulir pada tahun 1998, tampaknya membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan[7] nasional berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Pada tanggal 7 Mei 1999, Presiden RI menandatangani Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi dari undang-undang tersebut, meskipun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya) akan segera mengubah secara drastis konsep penyelenggaraan negara. Dengan undang-undang ini, kabupaten dan kota madya memiliki kewenangan yang sangat besar, termasuk dalam bidang pendidikan. Sebab dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ini dinyatakan bahwa:

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang; politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.

Dengan kata lain, salah satu imbas dari digulirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah menggeser pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik menjadi pendidikan desentralistik.

---

[6]Lihat Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Amisco, 1999), hlm. 27.

[7]Adapun sosialisasi politik yang dapat dicapai melalui pendidikan terdapat empat hal penting yang perlu dikaji lebih jauh, karena melibatkan persoalan-persoalan yang cukup kompleks, yaitu: *pertama*, arah orientasi politik yang ditanamkan melalui pendidikan formal. *Kedua*, implikasi-implikasi kesesuaian antara sistem pendidikan dengan lembaga-lembaga sosial atau proses-proses lainnya. *Ketiga*, konsekuensi-konsekuensi sosialisasi politik yang nyata atau pemasukan secara eksplisit muatan politik dalam kurikulum pendidikan. *Keempat*, signifikansi lingkungan lembaga pendidikan dalam proses sosialisasi.Lihat Azumardi Azra, *Op.Cit.*, hlm. 64.

Momentum otonomi daerah[8] dan otonomi pendidikan yang pada gilirannya akan mengarah pada tuntutan kemandirian lembaga pendidikan, jika tidak segera disikapi dengan segera, maka akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lembaga pendidikan Islam. Terlebih lagi ketika menengok pada permasalahan-permasalahan yang menyelimuti lembaga pendidikan Islam, yang seolah sukar bergeming dari kebekuannya. Di sinilah arti penting bagaimana menata ulang lembaga-lembaga pendidikan Islam agar bisa *survive* dan tumbuh menjadi institusi yang mampu memenuhi harapan pengguna jasanya.[9]

Sebagai *starting* poin dalam upaya membangun lembaga pendidikan adalah bagaimana mengatur ulang pola pikir para pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut. Bagaimana peningkatan citra dan gengsi lembaga pendidikan dengan instrumen prestasi? Bagaimana mengubah pola manajemen? Serta, bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka merasa memiliki? Dengan kata lain, madrasah tidak terpisah dari masyarakatnya. Kesemuanya merupakan pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh para pengelola sekolah.

Dalam kaitan dengan prestasi; Shipman mengelompokkan fungsi pokok pendidikan dalam masyarakat modern yang tengah membangun terdiri dari tiga bagian; sosialisasi, pembelajaran dan pendidikan. Sebagai lembaga sosialisasi, pendidikan adalah wahana bagi integrasi anak didik ke dalam nilai-nilai kelompok atau nasional yang dominan. Sementara itu, "pembelajaran" *(schooling)* adalah guna mempersiapkan mereka untuk mencapai dan menduduki posisi sosial-ekonomi tertentu

---

[8]Maksud otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat I UU No. 22 tahun 1999). Sementara, otonomisasi pendidikan yang sering disebut disentralisasi pendidikan adalah sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan yang menekankan kepada kebhinekaan, yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, keadilan, demokrasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta menggali potensi dan keanekaragaman daerah. Lihat Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 29-30. bandingkan dengan H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 77.

[9]Lihat Ismail SM., dkk., *Dinamika Pesantren dan Madrasah* dalam buku Nurul Huda, *Madrasah Sebuah Perjalanan untuk Eksis*. (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 261-263.

dan karena itu, pembelajaran harus membekali peserta didik dengan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka mampu memainkan peranan sosial-ekonomis dalam masyarakat. Sementara, dalam fungsi ketiga yakni "*education*", pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan kelompok elite yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program pembangunan.[10]

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi seiring dengan tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan-perubahan zaman yang sangat cepat. Muctar Buchari mengidentifikasi tiga kemampuan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan, yakni (1) kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan, (2) kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi, dan (3) kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Adapun kegagalan untuk mengembangkan ketiga kemampuan tersebut, akan mengakibatkan sistem pendidikan terperangkap ke dalam rutinitas.[11] Dua pendapat di atas, setidaknya bisa dijadikan acuan dalam upaya menyiapkan komponen-komponen yang akan menjadi bekal bagi peserta didik ketika mereka kembali ke pangkuan masyarakatnya.

Patut diakui bahwa hal tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terlebih lagi bila melihat realitas bahwa *input* lembaga pendidikan kebanyakan adalah, boleh dikata bukan kualitas prima. Di samping itu, dihadapkan pula pada tantangan umum dunia pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Battle. Ia melihat kenyataan ironis yang terjadi secara umum, dan terlebih lagi untuk negara berkembang, adalah *problem* yang dihadapi oleh dunia pendidikan, bahwa perkembangan zaman selalu lebih cepat dari perkembangan pendidikan.[12]

Seperempat terakhir abad ke-20 telah muncul fenomena yang menggembirakan. Dengan semakin menguatnya orientasi Islam

---

[10]Lihat Shipman, M.D., *Education and Modernization* (Cet. I; London: Faber, 1972), hlm. 33-35.

[11]Lihat Muctar Buchori, *Pendidikan dan Pembangunan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 45.

[12]Lihat Battle, J.A., *The New Ideal of Education*, (New York: Harper & Row Publisher, 1986), hlm. 45.

ke kehidupan perkotaan, maka dapat dimaklumi bahwa gerakan pembaharuan pemikiran Islam dan gerakan "Islam modern" menjadi lebih solid, sehingga pada akhir abad ke-20 terasa bahwa bobot Islam modern sudah dominan dari pada Islam tradisional. Hal ini nampak jelas dengan munculnya ulama-ulama hasil pendidikan Islam kota yang kini memiliki pengaruh luas dalam skala nasional. [13]

Di dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, memang membuka peluang mobilitas sosial dalam waktu relatif singkat yang mampu mengubah status suatu keluarga dengan keturunan mereka. Namun, tidak semua warga memiliki kebebasan memilih suatu sekolah bermutu, jikapun berhasil masuk belum tentu keluar sukses dengan hasil belajar yang memenuhi syarat bagi pendidikan lanjut atau pasaran kerja. Warga masyarakat sering kali memilih sekolah tertentu berdasarkan status sosial-ekonomi, paham keagamaan dan budaya, sehingga cenderung bersifat monokultur, bahkan cenderung monosistem nilai. Sekolah cenderung mencerminkan status sosial dan paham keagamaan, serta sistem budaya tertentu.[14]

Kecenderungan madrasah sebagai media pengukuhan status sosial budaya ini, berhubungan dengan munculnya berbagai bentuk konflik dan tawuran antargeng dan kelompok sosial, atau antarsekolah yang tampak kurang menjadi perhatian pemerintah. Diperlukan kebijakan pendidikan demokratis yang terbuka bagi semua orang.

Karena itu, tugas pemerintah bukan hanya mengurusi sekolah negeri atau murid dan mahasiswa negeri yang tanpa disadari meletakkan anak-anak sekolah swasta sebagai warga kelas dua. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan khusus sekolah swasta, hingga tidak tumbuh

---

[13]Lihat Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Cet. I; Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 134.

[14]Salah satu prioritas madrasah (sekolah) adalah menciptakan masyarakat ilmiah, dituntut untuk berbudaya akademik: berpikir, bersikap dan berwatak akademik. Hal demikian, menuntut para pengelola perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dengan memberi contoh bagaimana berbudaya akademik. Di sinilah sebenarnya peran besar yang harus diemban madrasah dan perguruan tinggi, yaitu bagaimana dapat melakukan peran sebagai "rumah ilmu", "hati nurani" masyarakat, merupakan komunitas "ahlu d©ikr" dan kaum tercerahkan atau perguruan tinggi hanya sekadar merupakan kumpulan "intelektual" yang melakukan kompromitas di bawah gedung-gedung mewah. Lihat Toroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: SIPRESS, 1994), hlm. 194.

"budaya tandingan" dari murid dan mahasiswa, guru, dosen, dan pegawai swasta. Tanpa kebijakan fungsional, maka akan muncul kesenjangan. Sekolah pejabat dan orang kaya, sekolahnya artis, pribumi atau etnis lain, menjadikan sekolah pelestari konflik dan kesenjangan sosial.[15]

Pendidikan lebih berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, instrumen ideologi dan alat produksi kelas berkuasa dan kaum kapitalis.[16] Sementara, rakyat sering kali harus membayar biaya hidup dan pendidikan jauh lebih mahal dari pada kelas atas dan orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak mempunyai banyak pilihan, kecuali sekolah bermutu rendah, murah dan dekat tempat tinggal. Fasilitas belajar anak-anak miskin itu pun hampir nihil.

Pendidikan bukanlah sekadar sebuah *transfer of knowledge* dan atau *transfer of value*, karena model pendidikan ini hanya akan membuat sejarah berhenti dan kebudayaan menjadi mati. Model pendidikan yang hanya beroperasi sebagai pemindahan teori IPTEK dan nilai akan menciptakan masyarakat nepotis dan kolutif sebagai pelestari kekuasaan yang korup. Hal ini akan menempatkan pendidikan sebagai industri nilai yang telah gagal berfungsi dan sekadar menjadi sebuah pasar dari sebuah kekuatan borjuis dan kelas kapitalis.[17]

Tujuan pendidikan seharusnya dirancang agar para murid nanti secara kreatif mampu mengkonstruksi nilai moral dan teori IPTEK

---

[15]Lihat Stevan M. Chan, *Education and The Democratic Ideal* diterjemahkan oleh Abdul Munir Mulkhan dan Umi Yawisah, *Pendidikan Liberal Berbasis Sekolah* (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. xiv.

[16]Istilah kapitalis tidak berasal dari dunia Islam karena muncul setelah ditemukannya mesin yang secara kebetulan berlangsung di Eropa. Kapitalisme di impor ke dunia Islam pada waktu Eropa berkuasa di sana. Bersama gelombang perkembangan, kapitalisme tersebar ke dunia Islam yang menderita kemiskinan, ketertinggalan, penyakit dan terabaikan. Ini membuat orang berpikir bahwa Islam menyetujui kapitalisme, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka juga mengklaim bahwa tidak ada ketentuan dalam hukum atau aturan Islam yang bertentangan dengan kapitalisme. Tidak meragukan lagi bahwa Islam mendukung pencapaian hasil yang baik dan progresif yang dilakukan oleh kapitalisme dalam perkembangan awalnya. Namun, Islam tidak akan membiarkan kapitalisme berjalan tanpa aturan baku yang mengaturnya dan menghindarkan eksploitasi yang di akibatkan oleh dendam. Lihat Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 145-147.

[17]Lihat Stevan M. Chan., *Op.Cit.,* hlm. xvii.

yang fungsional bagi masalah hidupnya sendiri, bukan pengalaman di masa lalu dari sang guru, orang tua dan penguasa. Sehingga mengusung nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan sangat penting. Karena tidak ada suatu sistem nilai, teori, pembelajaran dan evaluasi yang berlaku di semua zaman dan bagi semua masyarakat.

Di dalam pendidikan[18] Islam, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

A. Tauhid: Sebuah Paradigma Kebebasan

Persoalan pendidikan Islam merupakan persoalan yang masih memerlukan klarifikasi (penjelasan) teoretis, sehingga perang pendidikan Islam banyak berkaitan dengan konsep dasar yang dipergunakan. Demikian pula dengan gagasan demokratisasi pendidikan. Demokrasi merupakan usaha menempatkan persamaan sebagai pemandu penyelenggaraan pendidikan. Demokrasi juga dapat berarti sebagai pembebasan pendidikan dan manusia yang terlibat di dalamnya dari struktur dan sistem, serta perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen, bahkan demokrasi juga dapat berarti pembebasan manusia dari ketergantungan atas realitas objektif yang sering menghambat manusia alam mengembangkan diri untuk mencapai kualitas hidup di luar parameter material. [19]

---

[18]Kebijakan pendidikan dan konteks politik global. Sekarang Anda bisa memiliki (dan hal ini sangat biasa) kebijakan akademis yang sangat elitis, kebijakan akademik yang berorientasi kerja pada pengajaran dan penelitian berdasarkan kepedulian elitis. Kebijakan ini niscaya sejalan dengan kebijakan utama, juga berakar pada masyarakat dengan kekuasaan elitis, kebijakan yang akan menutup pintu akademi bagi anak-anak petani dan buruh dan nyaris menjadi kebijakan keji kelas dominan, tetapi tidak diragukan lagi akan tetap bertahan menjadi kebijakan. Anda juga bisa memiliki kebijakan akademis yang tidak populis sekaligus tidak elitis, suatu kebijakan yang menyembunyikan wujud dirinya sehingga memiliki ambiguitas yang lebih besar ketimbang ambiguitas populis, dalam pengertian ia akan menjadi kebijakan tanpa definisi. Dengan hipotesis yang diajukan oleh Freire ingin memperjelas bahwa tidak ada kebijakan eksklusif dari akademi. Tidak ada hakikat akademi yang metafisis sehingga memungkinkan kita untuk mengatakan, "ini kualitas yang menentukan kebijakan akademis di mana pun dan kapan pun". Artinya, tidak ada historisitas dalam akademi pada tingkat akademi itu sendiri, ia tidak bisa dilihat dari luar konteks politik global tempat ia berada. Lihat Paulo Freire, *Sekolah Kapitalisme yang Licik* (Cet. III; Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 130.

[19]Lihat Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media, 2002), hlm. 16.

Sementara, konsepsi ajaran pendidikan Islam bermuara dan selalu bertumpu pada pembentukan manusia sesuai dengan kodratnya yang mencakup dimensi horizontal dan dimensi transendental (hubungan dan pertanggungjawaban kepada yang maha pencipta). Konsep ajaran tauhid[20] di dalam Islam merupakan paradigma sebuah pembebasan dan kebebasan manusia, baik secara lahiriyah maupun rohaniah, kecuali kepada Tuhan. Ini mengisyaratkan sebuah ajaran bahwa dalam praktik pendidikan Islam tidak mengenal diskriminasi pada kelompok tertentu.[21] Tidak boleh terjadi pengkultusan kebenaran antara suprioritas (dosen atau guru)dengan imperioritas (sang mahasiswa atau siswa). Karena itu, demokrasi pendidikan pun harus diselaraskan dengan kemampuan profesional manusia (peserta didik).

Keikhlasan yang *insani* dan manusiawi tidak ada tanpa kemerdekaan dan kebebasan berpikir maupun berbuat. Kemerdekaan dan kebebasan merupakan pernyataan asasi yang pertama dan terakhir dari nilai kemanusiaan.

---

[20]Tauhid dalam Islam dapat dibedakan menurut mayoritas ulama, kepada dua macam, kedua macam tauhid itu sebagai berikut. Pertama Tauhid Rububiyah, yaitu konsep tauhid yang lebih menekan kepada wujud Tuhan atau eksistensi Tuhan yang biasanya diikuti dengan penyebutan sifat-sifat Tuhan lainnya. Dengan kata lain, tauhid rububiyyah merupakan konsep teologi ke-Tuhanan yang menyangkut tauhid tentang Dzat Tuhan dan penciptaan. Ladang atau bidang garapan pembicaraan tauhid rububiyah di atas adalah sifat Tuhan yang selama ini dikenal dengan sebutan sebagai sifat dua puluh dalam kehidupan sistem pendidikan pesantren dan ini masih menjadi acuan pertama ajaran tauhid (teologi Islam). Kedua Tauhid Ulhiyah, yaitu tauhid yang menjelaskan tentang perlunya atau keharusan untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Sehingga tauhid ini lebih akrab dikenal sebagai tauhid peribadatan (penyembahan) hanya kepada Allah, tauhid ulhiyah mengajarkan kepada manusia sikap bebas *(liberting)*, sikap kritis tanpa memandang siapa yang di atasnya, selain Tuhan. Dari sini, timbul sifat keberanian untuk mengatakan yang benar dalam rangka mengkritisi setiap keadaan yang berbentuk ritus, kultus rasialisme, dan otoriterisme. Pendidikan sebagai upaya pengembangan dan pembentukan ciri-ciri kemanusiaan, maka manusia perlu diberi pengetahuan, dilatih keterampilannya, dikembangkan persepsinya mengenai moralitas, dan dibentuk kepribadiannya baik secara langsung maupun tidak langsung, serta diberi pengertian tentang asal-usul dan tujuan hidup berdasarkan keimanan kepada ke-esaan Allah. Sementara, menurut ajaran Islam, tujuan hidup manusia adalah mencari keridaan Allah suatu proses pengabdian kepadanya. Lihat M. Dawan Raharjo, *Intelektual-Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), hlm. 432.

[21]Lihat M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia dalam Pendidikan Islam di Indonesia antara Cinta dan Fakta* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 94.

B. Syura: Sebuah Wacana Keterbukaan

Disinyalir dari pendapat sebagai mufassil dan filosof Islam bahwa ajaran tentang musyawarah (*syurah*) ini telah ditunjukkan oleh Allah sebelum terciptanya manusia di muka bumi. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah/2: 30).[22]

Kandungan ayat di atas, menurut penulis bahwa Allah meminta pendapat kepada hamba-hamba-Nya. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah mengajarkan sifat bermusyawarah dalam urusan mereka sebelum dikembangkan atau diterjemahkan dalam aktivitas kerja praktisnya, lebih-lebih bagi seorang pemimpin.

Syura, sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang bermacam-macam itu membawa nilai lain, yaitu keterbukaan. Karena itu, dalam pemikiran pendidikan yang demokratis, keterbukaan adalah mutlak diperlukan, keterbukaan yang mengandung perbedaan-perbedaan pendapat (*ikhtilaf*). Dan lawan pendapat adalah lawan berpikir. Dan di sana tidak boleh ada monopoli kebenaran dan apalagi semboyan-semboyan: *"siapa tidak setuju saya, adalah musuh saya."*

Pendidikan seharusnya menjadi wahana manusia untuk belajar hidup menyelesaikan masalah kehidupan yang sedang dan akan dihadapi. Sayangnya, pendidikan lebih sebagai sebuah paket peniruan

[22]Q.S. Al-Baqarah (2): 30

gaya hidup versi penguasa, birokrat pendidikan dan para orang dewasa. Karena itulah pendidikan sering terperangkap sebagai praktik yang kuno dari gaya hidup generasi terdahulu yang ketinggalan zaman. Bahkan, pendidikan juga mudah terperangkap sebagai praktik sebuah sistem penindasan dan ketidakadilan.[23]

Tanpa reformasi pendidikan sebagai sebuah proses induksi dan dialog budaya antargenerasi, pendidikan akan mudah menjadi praktik pemasungan dan penindasan kreativitas, serta kelakuan kekerasan sistematis yang terlembaga. HAM yang lebih bernilai tradisional itu dipaksakan menjadi hak hukum, hak politik dan hak-hak lain menurut versi impersonal sebagai indikasi modernitas. Seharusnya disadari bahwa HAM, selain bersifat universal sekaligus juga bersifat unik sesuai dengan jati diri manusia.[24] Tanpa penanaman kesadaran terhadap HAM dan demokrasi di dalam lembaga pendidikan, tujuan berprestasi dalam dunia pendidikan, kemudian dipicu dengan mengabaikan hak paling asasi terhadap orang. Maka prestasi anak dalam dunia pendidikan akan mandek dan yang muncul sentimen lembaga yang dibangun secara sistematis dari ruang-ruang kelas bahwa sekolahnyalah yang paling juara dalam banyak bidang.

Inilah sebenarnya yang menjadi akar bentrokan antarsekolah. Dan inilah sebenarnya menjadi akar dari segala kerusuhan antarkelompok di dalam masyarakat kita selama ini, sehingga upaya untuk mengusung nilai-nilai demokrasi selalu mengalami banyak kendala.

[23]Lihat Stevan M. Chan, Op.Cit., hlm. xiii.
[24]Lihat *Ibid*., hlm. xiv.

BAB 2

PENDIDIKAN ISLAM

A. Hakikat Pendidikan

Kata pendidikan,[25] pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni *paedagogie* yang terdiri atas dua kata, *paes* dan *ago*. Kata *paes* berarti anak dan kata *ago* berarti aku membimbing.[26] Dengan demikian, pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan terutama kepada anak, karena anaklah yang menjadi objek didikan.

Dari kata *paedagogie* yang berarti pendidikan, selanjutnya melahirkan kata *paedagogiek* yang berarti ilmu pendidikan. Dengan demikian, kedua kata ini memiliki perbedaan makna yang mendasar. *Paedagogie* (pendidikan) lebih menekankan dalam hal praktik, yaitu menyangkut kegiatan belajar mengajar. Sementara, *paedagogiek* lebih menitik beratkan kepada pemikiran tentang pendidikan. Pemikiran bagaimana sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan, materi pendidikan, sistem pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian dalam pendidikan dan seterusnya. Walaupun demikian, kedua kata tersebut tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus dilaksanakan

[25]Kata dasar pendidikan, adalah "didik" yang didahului awalan "pe" dan akhiran "an", yang mengandung arti perbuatan, hal, cara dan sebagainya. Bisa juga berarti memelihara dan memberi latihan (ajara, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 263.

[26]Batasan di atas, dikutip dari Lihat Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* (Cet.I; Jakarta: Rineka cipta, 1991), hlm. 69.

secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan tujuan pendidikan.

Pendidikan Islam di sini tidak hanya dipahami sebatas "ciri khas" jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Akan tetapi, pendidikan Islam menurut Zarkawi Soejoeti sebagaimana diungkapkan oleh A. Malik Fadjar, berarti: *pertama*, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelengaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakanya. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai. *Kedua,* jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan seperti ilmu lain. *Ketiga,* jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai dan sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi yang diselenggarakannya.[27]

Sementara, istilah pendidikan para pakar berbeda pendapat dalam menginterpretasikan pendidikan. Perbedaannya tak lain hanya terletak pada sudut pandang. Di antara mereka ada yang mendefinisikan dengan mengkonotasikan dengan peristilahan bahasa, keberadaan, dan hakikat kehidupan manusia di dunia ini, dan ada pula yang melihat dari segi proses kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggarakan pendidikan.[28] Akan tetapi, semua pendapat itu bertemu dalam pandangan bahwa pendidikan adalah suatu proses mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, pendidikan benar-benar merupakan latihan fisik, mental, dan moral bagi individu-individu supaya mereka menjadi manusia yang berbudaya dan berkepribadian sosial. Sehingga mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia dan menjadi warga negara yang berguna. Inilah yang kelihatannya merupakan pandangan yang kebanyakan dipegang oleh para ahli pendidikan terkemuka sepanjang

[27]A. Malik Fadjar: "Pengembangan Pendidikan Islam" dalam *Kontekstualisasi* Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: IPHI & Paramadina, 1993), hlm. 507.

[28]H. Abd, Rahman Getteng, *Pendidikan Islam dalam Pembangunan* (Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam, 1997), hlm. 25.

zaman. John Dewey dalam Khursyid Ahmad, misalnya mengemukakan; bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental, secara intelektual dan emosional, ke arah alam sesama manusia.[29]

Mohammad Natsir menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.[30] Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dipublikasikan oleh Zakiyah Daradjat, bahwa pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jamani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[31]

Selanjutnya, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*[32] dan dalam bahasa Arab ditemukan penyebutannya dalam tiga kata, yakni *al-tarbiyah*, *al-ta'līm,* dan *al-ta'dīb* yang secara etimologis kesemuanya bisa berarti bimbingan dan pengarahan. Namun demikian, para pakar pendidikan mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam hal penggunaan ketiga kata tersebut.[33] Kata *al-tarbiyah* dalam *Lisān al-Arab,* berakar dari tiga kata, yakni; *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan bertumbuh; *rabiya-yarba* yang berarti menjadi besar, dan *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki.[34] Arti *pertama*, menunjukkan bahwa hakikat pendidikan adalah proses pertumbuhan peserta didik. Arti *kedua*, pendidikan mengandung misi untuk membesarkan jiwa dan memperluas wawasan seseorang, dan arti *ketiga,* pendidikan adalah memelihara, dan atau menjaga peserta didik.

Mengenai kata *al-ta'līm* menurut Abd. al-Fattah, adalah lebih universal dibanding dengan *al-tarbiyah* dengan alasan bahwa *al-ta'līm* berhubungan dengan pemberian bekal pengetahuan. Pengetahuan ini dalam Islam dinilai sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat

---

[29]Khursyid Ahmad, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*, Terj., M. Hashem (Cet. II; Bandung: Kota Kembang, 1958), hlm. 9.

[30]Muhammad Natsir, *Capita Selekta* (Cet. I; Bandung: Gravenhage, 1954), h.87.

[31]Zakiah Daradjat,. *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta: t.tp. t. th), h. 12.

[32]Lihat John Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 81.

[33]Sepanjang pengetahuan penulis, kata *tarbiyah* digunakan oleh Abd. al-Rahmān al-Nahlawi; kata *ta'līm* digunakan Abd. al-Fattah Jalāl; sedangkan kata *ta'dīb* digunakan Naquib al-Attās.

[34]Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab,* jilid I (Mesir: Dār al-Mishriyyah, t.th), hlm. 384 dan 389. Luwis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lugah wa A'lām* (Cet. XXVII; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1997), hlm. 243.

tinggi.[35] Berbeda dengan ini, justru al-Attās menyatakan bahwa *al-tarbiyah* terlalu luas pengertiannya, tidak hanya tertuju pada pendidikan manusia, tetapi juga mencakup pendidikan untuk hewan. Sehingga dia lebih memilih penggunaan kata *al-ta'dīb* karena kata ini menurutnya, terbatas pada manusia.[36]

Di samping itu, kata *al-rabb* sebagai kata dasar *tarbiyah* juga mempunyai pengertian menumbuh kembangkan potensi bawaan seseorang, baik potensi fisik (jasmani), akal maupun potensi psikis-rohani (akhlak).[37] Dengan demikian, kata *tarbiyah* juga dapat digunakan untuk menamai suatu bentuk pendidikan dalam segala aspeknya, misalnya memperbaiki peserta didik dan memelihara aspek fisiknya dan psikisnya. Arti yang lebih luas lagi, *al-tarbiyah* dengan makna *al-tanmiyah* (pertumbuhan atau perkembangan), mengindikasikan bahwa aspek fisik dan psikis peserta didik dapat ditumbuh kembangkan lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan.

Terminologi lain yang mengacu kepada pengertian pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan, adalah kata *al-ta'līm* yang di dalam bahasa Arab kata ini merupakan bentuk *mashdar* dari kata *'allama-yu'allimu*. Kata tersebut, berasal dari *'alima* dan digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan bekas atau pengaruh pada diri seseorang.[38] Dengan demikian, jika kata *ta'līm* digunakan dalam konteks pendidikan, maka pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk melatih peserta didik secara terus-menerus sehingga ada bekas pada dirinya.

Namun yang lazimnya dipahami, kata *ta'lim* yang berasal dari *'alima* tersebut mengandung makna "pengetahuan" karena ia berasal dari kata dasar *'alima-ya'lamu-'ilm* (علم). Kata ini dalam Al-Qur'an dan derivasinya terulang sebanyak 840 kali,[39] dan digunakan juga dalam arti

---

[35]Lihat Abd. al-Fattāh Jalāl, *Min Uiūl al-Tarbawiy fī al-Islām* (kairo: Markas al-Duwali li al-Tal'līm, 1988), hlm. 17.

[36]Lihat Muhammad Naquib al-Attās, *Aims and Objective of Islamic Education* (jeddah: King Abd. al-Azīz, 199), hlm. 52.

[37]Lihat Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasīt,* juz I; (cet. II; Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972), hlm. 326.

[38]Al-Rāghib al-Asfahāni, *Mufradāt Alfāzh Al-Qur'ān al-Karīm* (Bairūt: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 356.

[39]Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Bāqy, *Op.Cit.*, hlm. 596-611.

yang bermacam-macam sebagaimana kata *tarbiyah* tadi. Dalam hal ini, kata *'alima* terkadang digunakan untuk menjelaskan pengetahuan-Nya yang diberikan kepada segenap manusia,[40] juga terkadang digunakan untuk menerangkan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri manusia.[41] Dengan demikian, konsep *ta'līm* mengacu kepada adanya sesuatu berupa pengetahuan yang diberikan peserta didik.

Muhammad Rasyid Ridhā' dalam mendefinisikan *al-ta'līm,* mengacu pada arti proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada diri individu tanpa adanya batasan dan persyaratan tertentu, dan proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam a.s. menyaksikan dan menganalisis *asma-asma* yang diajarkan oleh Allah kepadanya.[42]

Yang terakhir, adalah term *al-ta'dīb* dan akar katanya *addaba-yu'addibu-ta'dīban* yang berarti memberi adab, atau perilaku.[43] Kata ini memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an yang mengacu pada makna pendidikan, tetapi dalam hadis kata tersebut banyak disebutkan. Antara lain Nabi Muhammad Saw. menyatakan: أدّبنى الله [44] (Allah telah menanamkan adab pada diriku).

Berkaitan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan bahwa kata *al-ta'dīb* lebih mengacu pada aspek pendidikan moralitas (adab), sementara kata *al-ta'līm* lebih mengacu pada aspek intelektual (pengetahuan), sedangkan kata *tarbiyah*, lebih mengacu pada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan pembentukan kepribadian. Dalam pandangan penulis, term yang terakhir ini, kelihatannya menunjuk pada arti yang lebih luas, karena di samping mencakup ilmu pengetahuan dan adab, juga mencakup aspek-aspek lain, yakni pewarisan peradaban sebagaimana yang dikatakan Ahmad Fu'ad al-Ahwaniy bahwa: أن التربية عبارة عن نقل الحضارة من جيل إلى جيل [45] (pada dasarnya, term *al-tarbiyah* mengandung makna pewarisan

[40]Lihat Q.S. Al-Baqarah (2): 60.

[41]Lihat Q.S. Hūd (11): 79.

[42]Muhammad Rasyid Ridhā', *Tafsīr al-Manār,* juz I (Cet. IV; Mesir Dār al-Manār, 1982), hlm. 263.

[43]Luwis Ma'lūf, *Op.Cit.,* hlm. 18. Ibn Munzir, *Op.Cit.,* juz I; hlm. 42.

[44]Abū 'Abd. Allāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhim ibn al-Mugīrah ibn al-Bardizbāt al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāriy,* dalam *CD. Rom Hadī£ al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah, Kitab al-'Ilm* hadis nomor 1211.

[45]Ahmad Fu'ad al-Ahwāniy, *al-Tarbiyah fīl Islam* (Mesir: Dār al-Ma'arif, t.th), hlm. 19.

peradaban dari generasi ke generasi). Lebih lanjut, Muhammad Athiyah al-Abrāsy menyatakan bahwa *al-tarbiyah* mengandung makna kemajuan yang terus-menerus menjadikan seseorang dapat hidup dengan berilmu pengetahuan berakhlak mulia, mempunyai jasmani yang sehat, dan akal cerdas.[46] Senada dengan itu, Shalih Abdul Aziz menyatakan bahwa pengertian umum *al-tarbiyah* meliputi pendidikan jasmaniyah, *aqliyah*, *khulqiah*, dan *ijtima'iyah*.[47]

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa kata *tarbiyah* lebih cocok digunakan dalam mengkonotasikan pendidikan Islam. Oleh karena di dalam kata tersebut, mencakup *al-tarbiyah al-khalqiyah,* yaitu pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang juga menekankan aspek akhlak (moralitas), dan sekaligus mencakup *al-tabiyah al-tahzibiyah,* yaitu pembinaan jiwa untuk kesempurnaan ilmu pengetahuan. Hal ini nantinya, akan menyebabkan potensi manusia yang didik dapat tumbuh dengan produktif dan kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Pendidikan Islam yang tepat adalah *al-Tarbiyah al-Islamiyah*, dan batasannya lebih lanjut secara terminologis telah banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan, misalnya:

1. Hasan Langgulung menyatakan, pendidikan Islam adalah sebagai proses penyiapan generasi muda untuk menjadi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.[48]
2. Mappanganro menyatakan, pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengasuh anak atau peserta didik agar dapat menyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.[49]

---

[46]Muhammad Athiyah al-Abrāsy, *Rūh al-Tarbiyah wa al-Ta'līm* (t.t.: Isā al-Bābī al-Halab, t.th), hlm. 14.

[47]Shālih Abdul Aziz, *al-Tarbiyah wa Turuq al-Tadrīs* (mesir: Dār al-Ma'arif, 1979), hlm. 118.

[48]Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 94.

[49]Mappanganro, *Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah* (Cet.I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), hlm. 10.

3. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya mempersiapkan anak dari segi jasmani, akal, dan rohani sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk dirinya maupun umatnya.[50]
4. Yusuf al-Qardawi menyatakan pendidikan Islam adalah sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaniyah, akhlak dan keterampilannya, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.[51]
5. Muhammad Athiyah al-Abr*ā*sy secara singkat menyatakan, pendidikan Islam adalah mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna.[52]

Berkenaan dengan berbagai definisi yang telah dikemukakan, maka pendidikan Islam merupakan proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Melalui proses pendidikan itu, individu dibentuk agar dapat mencapai derajat yang tinggi dan sempurna (insan kamil), agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai *'Abdullāh* dan tugasnya sebagai *khalīfatullāh* dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat ideal, karena menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari batasan pengertian tentang pendidikan Islam itu sendiri, melahirkan berbagai interpretasi yang termuat di dalamnya. Yakni, adanya unsur-unsur edukatif yang sekaligus sebagai konsep bahwa pendidikan itu merupakan suatu usaha, usaha itu dilakukan secara sadar, usaha itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kepada masa depan anak, usaha itu mempunyai dasar dan tujuan tertentu, usaha itu perlu dilaksanakan secara teratur dan sistimatis, usaha itu memerlukan alat-alat yang digunakan.

Secara konkret, Abdurrahman al-Nahlawi merumuskan bahwa dari pengertian pendidikan Islam tersebut, sekurang-kurangnya mengandung empat konsep dasar, yakni:

---

[50]Sayyid Sābiq, *Islāmuna* (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.th), hlm. 237.

[51]Yusuf al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah* terjemahan Bustani A. Gani dan Zainal Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 39.

[52]Muhammad Athiyah al-Abrāsy, *Op.Cit., hlm.* 48.

a. Pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki target, tujuan dan sasaran.
b. Pendidik yang sejati dan mutlak adalah Allah Swt. Dialah Pencipta fitrah, Pemberi bakat, Pembuat berbagai sunnah perkembangan, peningkatan dan interaksi fitrah sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.
c. Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang, peningkatan kegiatan, demikian pula pengajaran senantiasa selaras dengan tuntutan keadaan zaman yang membawa anak didik dari suatu perkembangan ke perkembangan yang lebih baik.
d. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Swt. menciptakannya. Artinya, pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah.[53]

Dengan demikian, kajian atas konsep pendidikan Islam membawa kita pada konsep syariat agama (Islam), karena agamalah yang harus menjadi dasar pendidikan Islam. Agama Islam yang dasar acuannya adalah Al-Qur'an dan Hadis, menekankan bagaimana urgennya pendidikan Islam diimpelementasikan dalam kehidupan.

Demikian pentingnya pendidikan Islam, maka bukan secara kebetulan bila ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. adalah berkaitan tentang urgensi pendidikan, yakni perintah membaca sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Alaq (96): 1-5 yang telah dikutip sebelumnya.[54] Firman Allah Swt. ini, mengandung pesan tentang dasar pendidikan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. yang *ummi* melalui ayat tersebut, ia diperintahkan untuk belajar membaca. Yang dibaca itu objeknya bermacam-macam, ada ayat-ayat yang tertulis (*ayah Alquraniyah*), dan ada pula pula ayat-ayat yang tidak tertulis (*ayah al-kawniyah*).

Hasil yang ditimbulkan dengan usaha belajar membaca ayat-ayat *qur'aniyah,* dapat menghasilkan ilmu agama seperti fikih, tauhid, akhlak dan semacamnya. Sementara, hasil yang ditimbulkan dengan usaha membaca ayat-ayat *kawniyah,* dapat menghasilkan sains seperti fisika,

[53]Abdurrahman al-Nahlawy, *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asâlibuha,* diterjemahkan oleh Herry Noor Ali dengan judul *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* (Cet. II; Bandung: IKAPI, 1992), hlm. 21.

[54]Kutipan ayat tersebut, lihat buku ini dalam bab I, hlm. 2.

biologi, kimia, astronomi dan semacamnya. Dapatlah dirumuskan bahwa ilmu yang bersumber dari ayat-ayat *qur'aniyah* dan *kawniyah*, harus diperoleh melalui proses belajar membaca.

Kata *iqra'* atau perintah membaca dalam ayat di atas, terulang dua kali yakni pada ayat 1 dan 3 karena menurut penulis bahwa, perintah pertama penekanannya adalah pengenalan kepada Allah sebagai Tuhan Pencipta atas segala sesuatunya, termasuk alam dan manusia. Sementara pada perintah yang kedua, menekankan bahwa sumber segala ilmu pengetahuan adalah Tuhan Yang Maha Tahu segalanya, sehingga implikasinya adalah sesuatu ilmu dipandang benar apabila dengan ilmu itu ia sudah sampai mengenal Tuhan (*ma'rifatullah*).

Untuk mengenal Tuhan dengan segala ciptaan-Nya, apa yang terbentang di seluruh jagat dan alam raya ini sebagai ayat-ayat Allah Swt. juga perlu dibaca oleh manusia guna *ma'rifatullah*. Maka dari itu, Tuhan memberikan kepada manusia alat-alat potensial sebagaimana di dalam Q.S. Al-Nahl (16): 78 Allah Swt. berfirman:

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Terjemahnya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.[55]

Klausa " لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا " dalam ayat ini, mengandung makna bahwa manusia di saat dilahirkannya, tidak mengetahui sesuatu tentang sedikit pun, dan untuk mengetahui yang tidak diketahuinya itu, maka Allah Swt. memberikan alat potensial berupa *al-sam'u* (pendengaran), *al-abshāra* (penglihatan), dan *al-afidah* (hati untuk memahami).

Kata *al-sam'u* dan *al-abshār* dalam arti indra manusia, ditemukan dalam Al-Qur'an secara bergandengan sebanyak tiga belas kali.[56] Kata *al-sam'u* selalu digunakan dalam bentuk tunggal, dan selalu mendahului kata *al-abshar*. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa *al-sam'u*

[55]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), hlm. 413.

[56]Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Bāqi, *Op.Cit.*, hlm. 456-457.

sebagai salah satu alat indra manusia memiliki posisi penting bagi manusia itu sendiri dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Setelah kedua kata tadi, disebutkan lagi *al-af'idah* yang juga merupakan bentuk jamak. Ini berarti bahwa banyak pengetahuan yang dapat diraih setiap orang, namun sebelumnya ia harus menggunakan pendengarannya dan penglihatannya terlebih dahulu secara baik.

Allah Swt. memberi pendengaran, penglihatan dan hati kepada manusia, agar dipergunakan untuk merenung, memikirkan, dan memperhatikan apa-apa yang ada di sekitarnya. Kesemuanya ini, merupakan motivasi bagi segenap umat manusia untuk mencari ilmu pengetahuan melalui jalur pendidikan, dan sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, sejak kecilnya sampai berusia lanjut. Hal ini, didasarkan atas ungkapan yang oleh sementara pakar pendidikan dianggap sebagai hadis Nabi Muhammad Saw., yaitu: أُطْلُبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ [57] (Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat). Lebih dari itu, ditemukan pernyataan Nabi Muhammad Saw. yang mensejajarkan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Redaksi hadis tersebut, adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (رواه الترمذي)

Artinya:

Dari Anas bin Mālik berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka yang bersangkutan berada di jalan Allah sampai ia kembali dari kegiatan menuntut ilmu. (HR. Turmūziy)[58]

Di samping nas-nas yang berkenaan dengan urgensi pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan, masih banyak ditemukan firman Allah Swt., maupun hadis Nabi Muhammad Saw. yang secara implisit sangat sejalan dengan nas-nas tersebut. Itu berarti bahwa pendidikan Islam bagi setiap Muslim merupakan kewajiban.

---

[57]Hadis di atas, memang penullis tidak menemukaannya dalam *al-Kutub al-Tis'ah,* tetapi telah menjadi masyhur di kalangan masyarakat dan sering dikemukakan para pakar pendidikan sebagai dalil tentang urgensi pendidikan Islam.

[58]Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmūzi,* dalam *CD. Rom Hadī£ al-Syarīf al-Kutub al Tis'ah, Kitab al-'Ilm* hadis nomor 2571.

Pendidikan Islam di samping sebagai kewajiban, mutlak dibutuhkan oleh setiap Muslim untuk kepentingan eksistensinya. Jadi pendidikan Islam tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama di saat memasuki era globalisasi yang penuh tantangan. Bahkan kalau dilihat dalam sudut agama, pendidikan Islam tersebut memiliki format pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan fitrah kemanusian dalam mengantisipasi krisis spiritual di era globalisasi, karena inti pendidikan yang diajarkan Islam adalah untuk pemenuhan jati diri manusia atau esensi kemanusiaan di hadapan Allah Swt. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah Swt. tercapai sebaik mungkin potensi yang dimaksud meliputi potensi jasmani dan rohani.

B. Dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah semua acuan atau rujukan yang dari rujukan itu didapatkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan dimanifestasikan dalam pendidikan Islam. Sumber tersebut tentunya telah diyakini kebenarannya dan tidak diragukan lagi kekuatannya dalam mengantar aktivitas pendidikan Islam dan telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber pendidikan Islam terkadang disebut dengan dasar pendidikan Islam.[59]

Ada berapa pendapat para ahli tentang sumber pendidikan Islam antara lain menurut Sa'id Ismail Ali sebagaimana yang dikutip oleh Hasan Langgulung bahwa sumber pendidikan Islam itu ada enam macam yaitu, Al-Qur'an, as-Sunnah, kata-kata sahabat (*madzhab shahabi*), kemaslahatan umat/sosial (*mashalil al-mursalah*), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat (*'uruf*), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (*ijtihad*).[60] Selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Amir Faisal, dasar pendidikan Islam itu adalah Al-Qur'an, al-Sunnah sebagai hukum tertulis, hukum yang tidak tertulis, dan hasil pemikiran manusia tentang hukum, misalnya Pancasila, UUD 1945, atau UU SPN.[61]

---

[59]Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 37.

[60]Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Ed. Revisi (Cet. I; Bandung: 2008), hlm. 35.

[61]Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan-urusan keduniaan maupun hal-hal yang menyangkut keakhiratan. Pendidikan adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan, ia merupakan bagian yang terpadu dari aspek-aspek ajaran Islam[62].

Oleh karena itu, dasar atau sumber pendidikan Islam *inheren* dalam sumber ajaran Islam itu sendiri. Ia bersumber dari prinsip-prinsip Islam dan seluruh perangkat kebudayaannya.

Allah Swt. adalah sumber pendidikan utama bagi setiap Muslim. Dia memberikan pengetahuan dan pengajaran kepada manusia melalui wahyu kepada utusan-Nya. Nabi Muhammad mendidik dan mengajar manusia berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip ajaran Tuhan, menyuarakan dan menyiapkan penganut Islam untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan guna terwujudnya masyarakat yang diridai Allah. Dengan demikian, pendidikan Islam memberi inspirasi kepada generasi muda pengakuan yang mendalam atas filsafat dan ideologi Islam, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.[63]

Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar ajaran Islam. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian, dasar tadi dikembangkan dalam *ijma* yang diakui, *ijtihad* dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagad raya, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak, dengan merujuk kepada kedua sumber (Al-Qur'an dan al-Hadis) sebagai sumber utama.[64]

Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai dasar pemikiran dalam sistem pendidikan bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan kepada keyakinan semata, lebih jauh kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diterima oleh nalar. Dengan demikian, wajar jika kebenaran itu dikembalikan pada pembuktian akan kebenaran, pernyataan firman Allah:

---

[62]S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 153.

[63]Afzalurrahman, *Islam, Ideologi and the Way of Life* (Singapore, Pustaka Nasional, 1980), hlm. 367-368.

[64]Umar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam,* terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 43.

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

Terjemahnya:

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa" (Q.S. 2: 2).[65]

Kebenaran yang dikemukakan-Nya mengandung kebenaran yang hakiki, bukan kebenaran yang spekulatif, lestari dan tidak bersifat sementara. Sebagaimana firman Allah swt pada Q.S. 15: 9:

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesunguhnya Kami tetap memeliharanya.[66]

Berbeda dengan kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran manusia. Kebenaran produk nalar manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Selain itu, hasil pemikiran tersebut mengandung muatan subjektivitas sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Adanya kedua faktor ini mendorong hasil pemikiran para ahli pendidikan untuk membuahkan konsep pendidikan yang sesuai dengan pandangan hidup masing-masing.

Dapat dikelompokkan bahwa dasar-dasar pendidikan Islam adalah sebagai berikut.

Pertama, Al-Qur'an sebagai *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menjadi sumber pertama dan utama. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hal ini patut dikemukakan hal-hal yang sangat positif dalam Al-Qur'an guna mengembangkan pendidikan. Hal-hal itu antara lain; penghormatan kepada akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta memelihara kebutuhan sosial.[67]

---

[65]Departemen Agama, RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Al-Huda, 2002), hlm. 3.

[66]Departemen Agama, RI., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah.*, hlm. 263.

[67]Said Ismail Ali, *Sumber-sumber Pendidikan Islam,* dalam Hasan Langgulung, hlm. 16-206.

Kedua adalah sunnah Nabi. Sunnah sebagaimana dijelaskan Badar Abdul Ainan bahwa sunnah berdekatan maknanya dengan kata-kata jalan, cara jalan lurus dalam bahasa Arab.[68] Hasbi Ash Shiddieq lebih tegas menyatakan bahwa sunnah menurut para ahli hadis ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa *taqrir*, pengajaran, sifat, kelakuan perjalanan hidup; baik yang sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.[69] Oleh karena itu, sunnah mencerminkan sikap, manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan dan *taqrir* Nabi, maka beliau menjadi teladan yang harus diikuti. Dalam keteladanan Nabi, terkandung unsur-unsur pendidikan yang sangat besar artinya.

Ketiga, adalah kata-kata sahabat. Ini mengindikasikan bahwa para sahabat yang bergaul dekat dengan Nabi banyak mengetahui sunnah Nabi sudah tentu dengan demikian kata-kata dan perbuatan sahabat dapat dimasukkan sebagai sumber pendidikan Islam.[70]

Keempat, adalah kemaslahatan masyarakat. Hal ini, maslahat adalah membawa manfaat dan menjauhkan mudarat. Tegaknya manusia dalam agama, kehidupan dunia dan akhiratnya adalah dengan berlakunya kebaikan dan terhindarnya dari keburukan. Kemaslahatan manusia tidak mempunyai batas di mana harus berbakti. Akan tetapi, ia berkembang dan berubah dengan perubahan zaman dan berbeda menurut tempat, serta haruslah diperhitungkan maslahat-maslahat baru yang didiamkan oleh agama, selama ia tidak mengingkarinya.[71]

Kelima, adalah nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa pendidikan adalah usaha pemeliharaan, pengembangan dan pewaris nilai-nilai budaya masyarakat yang positif. Terputusnya nilai-nilai dan tradisi sosial dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Seperti diungkapkan *Ruthbenedict*, "Kehidupan di dunia Barat dan pendidikan modern", menunjukkan tradisi bahwa justru ada jurang antara apa yang dipelajari orang dalam

---

[68]Badar Abul Ainan, *Uzul al Fiqh* (Kairo: Dar al Ma'arif, 1965), hlm. 72.

[69]Lihat Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 9174), hlm. 25.

[70]Said Ismail Ali, *Sumber-sumber Pendidikan Islam,* dalam Hasan Langgulung *(ed.)*, hlm. 214-220.

[71]Husain Hanafi, *al-Madkhal ly Dirasah al-Fiqh al-Islāmy* (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), hlm. 233.

bagian pertama dari kehidupannya dengan apa yang diterima kemudian, sehingga individu berhak melalui pendidikan terakhir harus melupakan nilai-nilai yang sering kali diperoleh sebelumnya.[72]

Keenam, adalah hasil pemikiran-pemikiran dalam Islam. Hal ini pemikiran para filsuf, pemikir, pemimpin, dan intelektual Muslim khususnya dalam bidang pendidikan Islam dapat menjadi referensi pengembangan pendidikan Islam. Hasil pemikiran itu baik dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, fikih Islam, sosial budaya pendidikan dan sebagainya menyatu sehingga membentuk suatu pemikiran dan konsepsi komprehensif yang saling menunjang.[73]

C. Tujuan Pendidikan Islam

Adapun tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan misi Islam, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak. Faktor kemuliaan akhlak dalam pendidikan Islam dinilai sebagai kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan, berfungsi menyiapkan manusia-manusia yang mampu menata kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Dua sasaran pokok yang akan dicapai oleh pendidikan Islam tadi, yaitu kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat memuat sisi-sisi penting. Bagian ini dipandang sebagai nilai lebih dari pengembangan pendidikan Islam, Nilai lebih tersebut terlihat bahwa sistem pendidikan Islam dirancang agar dapat merangkum tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt., yang pada hakikatnya tunduk pada hakikat penciptaannya. *Pertama*, tujuan pengembangan pendidikan Islam itu bersifat fitrah, yaitu membibing manusia sejalan dengan fitrah kejadiannya. *Kedua*, tujuan pengembangan pendidikan Islam merentang dua dimensi, yaitu keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. *Ketiga*, mengandung nilai-nilai yang bersifat universal yang tidak terbatas oleh ruang lingkup geografis dan paham-paham tertentu.[74]

Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam merupakan perubahan dan perkembangan pada diri manusia yang ingin diusahakan oleh

---

[72]Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Biro Cipta, 1979), hlm. 284.

[73]Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 39.

[74]Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*, hlm. 39.

proses dalam pendidikan Islam, atau usaha pendidikan Islam untuk mencapainya, baik dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun sebagai hamba Allah Swt. Sebagai makhluk individu, tujuan pendidikan Islam harus terpelihara dan berkembangnya potensi-potensi yang terpendam pada masing-masing manusia secara sempurna. Sebagai makhluk sosial, harus mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan individu ke arah percaturan kehidupan sosial. Adapun sebagai makhluk Allah Swt. berarti tujuan pendidikan Islam harus terjamin, tersosialisasi dan berkembangnya nilai-nilai iman dalam pertumbuhan dan perkembangan individu yang direalisasikan dalam kehidupan sosial.

Tujuan pendidikan Islam akan membawa kepada tujuan hidup yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Swt. agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah kepada-Nya, tetapi seperti pendidikan umum lainnya pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang bersifat operasional sehingga dapat dirumuskan tahap-tahap proses pendidikan Islam mencapai tujuan lebih jauh.

Tujuan pendidikan yang dimaksud adalah tujuan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu tujuan itu menyangkut perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan Islam, baik berkenaan dengan pribadi peserta didik, masyarakat maupun lingkungan tempat hidupnya. Tujuan itu perlu jelas, sehingga pendidikan Islam dapat diukur keberhasilannya tahap demi tahap.

Omar Mohammad al-Taoumi al-Syaibani menjelaskan tujuan pengembangan pendidikan Islam adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman terhadap individu-individu tentang adanya saling keterkaitan dengan individu-individu lainnya, terutama dalam proses belajar mengajar dan pada pertumbuhan pada pribadi mereka dan pada persiapan yang dimestikan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat.
2. Tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan dengan tingkah laku masyarakat, umumnya dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan ini tentang perubahan yang diingini dan pertumbuhan, memperkaya pengalaman dan kemajuan yang diinginkan, tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni,

profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat.[75]

Tujuan pendidikan Islam menurut Abdur Rahman al-Nahlawi ada empat yaitu:

a. pendidikan akal dan persiapan fitrah. Allah menyuruh manusia merenungkan kejadian langit dan bumi agar dapat beriman kepada Allah;
b. menumbuhkan potensi dan bakat anak;
c. menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka sebaik-baiknya;
d. berusaha untuk menyeimbangkan segala potensi dan bakat manusia.[76]

Muhammad Atiyah al-Abrasiy dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan pendidikan Islam, yaitu:

1) untuk membentuk akhlak yang mulia, kaum Muslim dari dahulu sampai sekarang sepakat bahwa pendidikan akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya.
2) persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya menitikberatkan kepada keagamaan atau keduniaan saja, tetapi pada keduanya.
3) persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi manfaat atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan vokasional dan profesional.
4) menumbuhkan semangat ilmiah pada para pelajar dan memuaskan rasa ingin tahu, serta menginginkan mereka mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri;
5) menyiapkan pelajar dari segi profesi, teknik, dan pertukangan yang membutuhkan keterampilan tertentu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan materi di samping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.[77]

---

[75]Lihat Umar Muhammad al-Taoumi al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 399.

[76]Lihat Abdur Rahman al-Nahlawi, *Użul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 6.

[77]Lihat Muhammad Atiyah al-Abrasiy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 1-4.

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia. Manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama, tetapi juga diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan sebagai sarana untuk mencapai kebahagian hidup di akhirat.

Sejalan dengan tujuan pendidikan yang bersifat paripurna itu, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam terbagi dua, yaitu tujuan keagamaan dan tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan. Tujuan keagamaan beramal untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, sedangkan tujuan yang bersifat keduniaan adalah tujuan kemanfaatan atau persiapan untuk hidup.[78] Al-Ghazali pun merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan beribadah dan *taqarrub* kepada Allah dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia akhirat.[79]

Dari berbagai uraian di atas, dapat dipahami bahwa meskipun terdapat beberapa pandangan yang berbeda mengenai rumusan tujuan pendidikan Islam, namun terdapat satu aspek prinsip yang sama, yaitu semuanya menghendaki terwujudnya nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia dengan berdasar pada cita-cita hidup yang menginginkan kebahagian dunia dan akhirat.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk pribadi Muslim sejati, memiliki wawasan keilmuan, ketajaman pikiran, kekuatan iman yang mantap, dan kemampuan berkarya melalui kerja kemanusiaan dalam multi dimensi kehidupan. Berusaha membentuk pribadi dengan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki agar mampu mengembangkan amanah sebagai *khalifah fil al-ardi*.

D. Ruang Lingkup Pendidikan Islam

Mengenai ruang lingkup pendidikan Islam dapat dilihat pada klasifikasi makna agama Islam secara umum. Oleh para ulama, umumnya mereka membagi Islam dengan tiga aspek; yaitu Tuhan, manusia dan alam. Pada pembelajaran agama Islam, pembagian tersebut tercakup sebagai ruang

[78]Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 25.
[79]Lihat Fathurrahman, *Sistem Pendidikan Versi al-Gazali* (Bandung: al-Ma'araf, 1986), hlm. 24.

lingkup PAI yang diajarkan di sekolah-sekolah umum, ialah wawasan tentang akidah (Tuhan), manusia dan alam (sosial mualah).[80]

Bentuk keyakinan dan kewajiban pengamalan dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, yakni *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*, dalam konteks komunikasi, ketiga dimensi tersebut dapat diorganisir ke dalam dua komunikasi, yakni komunikasi vertikal dan horizontal. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekadar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tujaan belajar dalam Islam bukanlah mencari rezeki di dunia ini semata, tetapi untuk sampai pada hakikat, memperkuat akhlak, artinya mencari atau mencapai ilmu yang sebenarnya dan akhlak yang sempurna.[81]

Belajar merupakan jendela dunia. Karena dengan belajar orang bisa mengetahui banyak hal. Oleh sebab itu, Islam amat menekankan masalah belajar. Allah pun bertanya dalam Q.S. Al-Zumar 39: 9:

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَاۤىِٕمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖۗ قُلْ
هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۧ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.[82]

Jawaban pertanyaan Allah ini bisa kita temukan dalam Q.S. Al-Mujādalah/ 58: 11

[80]Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, (Cet. I; Jakarta: RajaGafindo, 2006), hlm. 49.

[81]Atiyah Al-Abrasyi, *Attarbiyatul Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyah, 1992), hlm. 7.

[82]Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. XI; Semarang: PT; Toha Putra, 1997) hlm. 891.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[83]

Nabi Muhammad Saw. Sangat mendorong supaya belajar dengan memberikan contoh-contoh praktis dan dengan lisan dan perbuatan. Beliau telah membebaskan para tahanan dari kaum kafir yang terpelajar, apabila mereka dapat mengajar beberapa orang Muslim untuk membaca dan menulis. Ini bertanda bahwa Rasulullah Saw. berkeinginan keras supaya pendidikan merata di kalangan orang Islam.[84]

Zainuddin mengadopsi pendapat Tilaar (2000) yang mengemukakan bahwa ada enam masalah pokok yang dihadapi sistem pendidikan nasional, yaitu: *pertama*, menurunnya akhlak dan moral peserta didik; *kedua*, pemerataan kesempatan belajar; *ketiga*, masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan; *keempat*, status kelembagaan; *kelima*, manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional; dan *keenam*, sumber daya yang belum profesional.[85]

Masalah pokok pendidikan nasional tersebut tidak saja melanda pada pada tataran sistem dan manajemen pendidikan, tetapi juga mengalir dan bermuara pada tataran operasional pendidikan di sekolah. Kualitas pendidikan di sekolah masih diperhadapkan pada kreativitas guru monoton, di bagian manajemen, sarana dan prasarana kurang mendukung, dan sebagainya. Dalam konteks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah, terdapat permasalahan mendasar pembelajaran antara lain masalah peserta didik, masalah pembelajaran dominasi aspek

[83]Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 325.

[84]Atiyah Al-Abrasyi, *Attarbiyatul Islamiyah* (Cet. I; Beirut: Dar al-Syamiyah, 1992), hlm. 8.

[85]Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 211.

kognitif, masalah pendekatan parsial, dan masalah sarana dan prasarana, serta masalah evaluasi.[86] Permasalahan-permasalahan tersebut diuraikan berikut ini.

1. Masalah Peserta Didik

Peserta didik sebagai input pendidikan berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam tingkat pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan, serta penghayatan agama. Keberhasilan pendidikan hendaknya dilihat pada *input*, proses, dan *output* sekolah itu. *Input* dalam bidang pendidikan tidak sama dengan *input* dalam bidang ekonomi yang sifatnya statis. *Input* bidang pendidikan sifatnya dinamis yang banyak dipengaruhi oleh faktor proses dan *output*. *Input* dalam pendidikan tidak terlalu dipermasalahkan karena *input* banyak bergantung pada proses. Masalah kurikulum, kualitas guru, metode pembelajaran yang efektif dan menarik, serta manajemen yang baik menjadi sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah. Apa pun *input*nya kalau diproses dengan baik, maka *output*nya akan menjadi baik.

Karena itu, sistem pendidikan yang baik adalah bila seorang peserta didik yang kurang memiliki kecerdasan, kemampuan, dan keterampilan setelah diproses dalam sistem tersebut menjadi meningkat dan mampu mengembangkan keterampilan dan kepribadiannya.[87] Ada keluarga yang sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan serta penghayatan agama yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Hal ini menjadi potensi dasar yang tentunya berpengaruh pada diri peserta didik. Perlakuan yang sama terhadap peserta didik yang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana. Mencermati kondisi seperti ini, maka solusi yang cerdas adalah guru memberikan perlakuan kepada peserta didik berdasarkan hasil pemetaan karateristik.[88] Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya menantang potensi setiap individu, dan mengurangi tugas-tugas yang seragam untuk semua

[86]Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah.*, hlm. 39-40.

[87]Indra Djati Sidi, Zainuddin, *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah.*, hlm. 14.

[88]Umar Tirtarahardja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 52.

peserta didik. Di sinilah kompetensi profesional guru meniscayakan proses pembelajaran berkualitas. Karakteristik atau ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik atau guru yaitu: a) individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik, b) individu yang sedang berkembang, c) individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusia, dan d) individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

Dengan demikian, posisi peserta didik dalam pembelajaran adalah sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek ia adalah pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas atau karakteristik, ia ingin mengembangkan diri secara terus-menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya.

2. Masalah Pembelajaran Dominasi Aspek Kognitif

Permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah, antara lain adalah proses pembelajaran lebih didominasi aspek kognitif. Proses pembelajaran hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan psikomotor, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara teori dan praktik, pendidikan agama kurang mampu menghasilkan manusia berakhlak.

Apabila memperhatikan hasil evaluasi pendidikan agama Islam pada tataran teoretis nilai kognitif yang diperoleh peserta didik rata-rata di atas standar kriteria kelulusan minimal (KKM). Akan tetapi, ketika mencermati fenomena perilaku yang terjadi pada sebagian peserta didik maka aplikasi nilai-nilai agama Islam belum diinternalisasikan dalam diri mereka. Kondisi pembelajaran seperti ini mendapat tanggapan dari Muhamad Maftuh Basyuni sebagaimana diadopsi oleh Muhaimin, bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung lebih mengedepankan aspek kognisi (pemikiran) daripada afeksi (rasa) dan psikomotorik (tingkah laku).[89]

[89]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 23.

Pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoretis keagamaan yang bersifat kognitif dan kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Oleh karena masalah agama banyak menyentuh hati manusia, maka pemenuhan aspek afektif dan psikomotorik merupakan suatu keniscayaan di samping aspek kognitif.

3. Masalah Sarana dan Prasarana

Pendidikan agama sebagaimana pendidikan lainnya membutuhkan sarana dan prasarana. Bila di sekolah ada laboratorium IPA, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, pada dasarnya sekolah juga membutuhkan laboratorium agama selain masjid. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa, "Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama".[90] Selanjutnya, diperkuat lagi dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 24 ayat (1) dan dipertegas pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai berikut.

Setiap sekolah wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan agama yang meliputi, antara lain sumber belajar, tempat ibadah, media pembelajaran, perpustakaan, dan laboratorium pendidikan agama.[91]

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tersebut menegaskan perlunya sekolah menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama berupa laboratorium agama, media pembelajaran, dan lainnya sebagai sarana dan prasarana pendidikan agama. Sekolah harus melengkapi pembelajaran pendidikan agama dengan sarana dan prasarana yang membawa peserta didik untuk lebih menghayati agama, merangsang emosional keberagamaan misalnya video yang bernapaskan keagamaan, musik dan nyanyian keagamaan, syair, puisi keagamaan, alat-alat peraga pendidikan agama, foto-foto yang bernapaskan keagamaan, dan lain sebagainya.

---

[90]Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.*

4. Masalah Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar Pendidikan Agama Islam selama ini lebih mengutamakan pada penilaian aspek kognitif, yaitu kemampuan peserta didik terhadap penguasaan materi pembelajaran. Penilaian aspek afektif dan aspek psikomotorik dalam bentuk pengamatan perilaku dan pengamalan nilai-nilai Islam kurang mendapat perhatian oleh guru agama. Kebijakan sekolah untuk tidak menjadikan peserta didik yang memiliki sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan norma sekolah sebagai pertimbangan tidak naik kelas. Hal ini berdampak pada menurunnya kinerja guru, kreativitas untuk meningkatkan profesionalitasnya menjadi lemah.

5. Pendidikan dan Karakter

Karakter bukan sekadar sebuah kepribadian (*personality)* karena sesungguhnya merupakan kepribadian yang ternilai.[92] Kepribadian dianggap sebagai "ciri, karakteristik, gaya, sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir.[93] Ibarat sebuah kehidupan makna karakter seperti sebuah blok granit yang dengan hati-hati dipahat atau pun dipukul secara sembarangan yang pada akhirnya akan menjadi sebuah mahakarya atau puing-puing yang rusak. Oleh karena itu, karakter orientasinya ke kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi.[94]

Selain itu, pengertian karakter juga dilontarkan oleh Abdullah Munir dengan makna penggambaran tingkah laku dengan menampilkan nilai (benar-salah, baik-buruk), baik secara implisit maupun eksplisit.[95] Kemudian, Muthahharah sebagaimana dikutip oleh Lanny Oktavia mengatakan bahwa karakter adalah merupakan siapa Anda

---

[92]Sri Nawanti, *Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 2.

[93]Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 80.

[94]Hidayatullah, *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas* (Cet. III; Surakarta: Yuma Pustaka), hlm. 12.

[95]Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah* (Sleman: Pedagogia, 2010), hlm. 9.

sesungguhnya. Hal ini menunjukkan kepada kegunaan dan keunggulan suatu produk manusia.[96]

Dengan demikian, karakter yang dimaksudkan adalah sikap yang jujur, rendah hati, sabar, tulus ikhlas dan sopan dalam pergaulan, dalam bukunya Masnur Muslich mengutip pelbagai tokoh berkaitan makna karakter, seperti Simon Philips memberikan definisi karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku yang ditampilkan. Begitu pula, Koesoema menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri atau karakteristik, gaya, sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang dari lingkungan sekitar dan juga bawaan sejak lahir. Sementara, Suyanto menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Tak lupa pula, Masnur Muslich mengutip Imam Ghazali mengatakan bahwa karakter itu lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.[97]

Dapat disimpulkan bahwa karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral yang positif, dan bukan konotasi negatif. Individu atau orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral yang positif. Karakter adalah suatu hal yang unik hanya ada pada individual atau pun pada suatu kelompok, bangsa. Karakter merupakan landasan dari kesadaran budaya, kecerdasan budaya dan merupakan pula perekat budaya. Sementara, nilai dari sebuah karakter digali dan dikembangkan melalui budaya masyarakat itu sendiri. Terdapat empat modal strategis, yaitu sumber daya manusia, modal cultural, modal kelembagaan, serta sumber daya pengetahuan. Keempat modal tersebut, penting bagi penciptaan pola pikir yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai suatu bangsa.[98]

---

[96]Lanny Oktavia dkk, *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren* (Jakarta: Rumah Kitab & Norwegian Centre for Human Rights, 2014), hlm. 11.

[97]Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 70.

[98]Sri Nawanti, *Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 27.

Oleh karena itu, pendidikan karakter menurut Thomas Linckona adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras.[99] Dan pakar pendidikan perspektif gender, Megawangi memberikan definisi pendidikan karakter sebagai proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat beradab.[100] Pendidikan karakter dalam *grand design*-nya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Menurutnya, pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan oleh pendidik, keluarga dalam membentuk seluruh potensi individu mulai dari kognitif, afektif dan psikomotorik dalam interaksi sosial lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang hasilnya terlihat dari tindakan seseorang dalam perbuatan dan tingkah laku.

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.[101]

Dimensi yang perlu dipahami dalam pendidikan karakter adalah individu, sosial, dan moral. Individu dalam pendidikan karakter menyiratkan dihargainya nilai-nilai kebebasan dan tanggung jawab. Nilai-nilai kebebasan inilah yang menjadi prasyarat utama sebuah perilaku moral, yang menjadi subjek bertindak dan subjek moral adalah individu itu sendiri, bebas menentukan keputusan atau bebas bertindak, seseorang menegaskan kebaradaan dirinya sebagai mahluk bermoral. Sementara, dimensi sosial mengacu pada corak relasional antara individu dengan individu lain, atau dengan lembaga lain yang menjadi cerminan kebebasan individu dalam mengorganisir dirinya sendiri.

---

[99]Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

[100]Ratna Megawangi,. *Pendidikan Karakter; Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004), hlm. 95.

[101]Kementerian Pendidikan Nasional, *Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran,* hlm. 12.

Kehidupan sosial dalam masyarakat bisa berjalan dengan baik dan stabil karena ada relasi kekuasaan yang menjamin kebebasan individu yang menjadi anggotanya serta mengekspresikan jalinan relasional antarindividu. Dimensi moral menjadi jiwa yang menghidupi gerak dan dinamika masyarakat sehingga masyarakat tersebut menjadi semakin berbudaya dan bermartabat. Tanpa adanya norma moral, individu akan saling menindas dan liar. Yang kuat akan makin berkuasa, yang lemah akan semakin tersingkirkan.[102]

Lebih lanjut lagi, Lickona di dalam buku Masnur Muslich menyebutkan penekanan tiga komponen karakter yang baik (*components of good character)* yaitu *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan moral. Hal ini diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan.[103]*Moral knowing* merupakan hal penting untuk diajarkan yang terdiri dari enam hal, yaitu: 1). *Moral Awareness* (kesadaran moral), 2). *Knowing moral values* (mengetahui nilai-nilai moral), *3). Perspective taking* (pengambilan pandangan), *4). Moral reasoning* (alasan moral), *5). Decision making (*pembuatan keputusan), *6). Self knowledge (*kesadaran diri sendiri).

Sementara, *Moral feeling* adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni *conscience (*nurani), *self esteem (*percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), *humility* (kerendahan hati). *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil dari dua komponen lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu *competence* (kompetensi), keinginan *(will),* dan *habit (*kebiasaan).[104]

---

[102] Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 147.

[103]Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 133.

[104]Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, hlm. 134.

Sementara itu, pakar ESQ Indonesia, Ary Ginanjar mengatakan bahwa pendidikan karakter pada hakikatnya adalah upaya untuk menumbuhkan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) secara optimal pada diri peserta didik. Pendidikan karakter harus mengangkat dimensi ESQ yang selama ini agak diabaikan oleh lembaga pendidikan.[105]

Mengapa pendidikan karakter begitu penting untuk peserta didik? Karena di dalam pendidikan karakter terdapat nilai-nilai yang mengorientasikan ke hal positif. Kementerian Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.

a. Agama

   Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.[106]

b. Pancasila

   Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.[107]

---

[105]Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual* (Jakarta: Arga Publishing, 2001), hlm. 105.

[106]Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual,* hlm. 106

[107]Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual,* hlm. 106.

c. Budaya

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

d. Tujuan Pendidikan Nasional

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.[108]

Inilah sumber dari pendidikan karakter yang akan diterapkan bagi peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan karakter tak bisa dipisahkan dari Pancasila, nilai agama, nilai budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Tak ketinggalan, Koesoema menyatakan bahwa pendidikan karakter di sekolah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pemahaman, perawatan, dan pelaksanaan keutamaan *(practiceof virtue)*. Pendidikan karakter di sekolah ini mengacu pada proses penanaman nilai, berupa pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan menghidupi nilai-nilai itu, serta bagaimana seorang peserta didik memiliki kesempatan untuk dapat melatihkan nilai-nilai tersebut secara nyata. Pendidikan karakter bukan hanya terkait dengan mata pelajaran tertentu, tetapi terkait keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, baik itu visi, misi, maupun kebijakan, pola relasi, dan sebagainya. Pendidikan karakter seakan menjadi roh dalam setiap proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan setiap sekolah.[109]

---

[108]Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual,* hlm. 107.

[109]Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 192-193.

Pendidikan karakter juga banyak diterapkan di negara lain, semisal Amerika Serikat. Sebuah lembaga yang melakukan penilaian pelaksanaan pendidikan di Amerika Serikat, yaitu *character education partnership* pada tahun 2006 mengeluarkan laporan mengenai sekolah-sekolah di Amerika Serikat yang mendapat penghargaan sebagai sekolah yang telah berhasil mengembangkan pendidikan karakter yang berjudul *2006 National Schools of Character: Award-Winning Practise*. Berdasarkan pengalaman sekolah tersebut, dikemukakan ada 11 prinsip pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu; a. Mempromosikan nilai-nilai etika inti; b. Menentukan "karakter" komprehensif untuk memasukkan berpikir, perasaan, dan perilaku; c. Menggunakan pendekatan komprehensif, disengaja, dan proaktif; c. Menciptakan sebuah komunitas sekolah yang peduli; d. Menyediakan peluang untuk tindakan moral; e. Memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang; f. Mendorong munculnya motivasi diri peserta didik; g. Melibatkan staf sekolah sebagai pembelajaran dan komunitas moral; h. Kepemimpinan moral dan mengembangkan dukungan jangka panjang bersama; i. Melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra; dan j. Mengevaluasi inisiatif pendidikan karakter.[110]

Sementara itu, Thomas Lickona mempunyai pendapat yang berbeda berkaitan dengan pendidikan karakter, yakni *Pertama,* kebijaksanaan yang baik. *Kedua*, keadilan menghargai semua orang. *Ketiga*, ketabahan memungkinkan melakukan yang benar dalam menghadapi kesukaran. *Keempat*, pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri. *Kelima*, kasih sayang melampaui keadilan memberikan yang lebih daripada persyaratan. *Keenam*, sikap positif yang sangat penting. *Ketujuh*, kerja keras yang penuh dengan kesabaran. *Kedelapan*, ketulusan hati melekat kepada prinsip moral, setia kepada nurani moral, menepati janji dan berpegang teguh apa yang kita yakini. *Kesembilan*, berterima kasih sering dilukiskan sebagai rahasia kehidupan. *Kesepuluh*, kerendahan hati sebagai fondasi seluruh kehidupan moral.[111]

Nurani Soyomukti dalam bukunya teori-teori pendidikan mengatakan bahwa aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan

---

[110]Beland, K. and Team, *National Schoolof Character: Award-Winning Practise,* (USA: *Character Education Patnership*, 2006), hlm. 4-5.

[111]Lanny Oktavia dkk., *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren.,* hlm. 9.

dalam pendidikan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku.[112] Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah.[113]

Pendidikan karakter mendapatkan tempat spesial dan urgen. Pendidikan karakter sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter akan menjadi *basic* atau dasar dalam pembentukan karakter berkualitas bangsa, yang tidak mengabaikan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, kegotong royongan, saling membantu dan menghormati dan sebagainya. Pendidikan karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki kemampuan kognitif saja, namun memiliki karakter yang mampu mewujudkan kesuksesan.

Upaya melakukan pendidikan karakter dalam pembangunan masyarakat masa depan yang memiliki daya saing mandiri, sangat perlu mensinergikan banyak hal. Sinergisitas tersebut pertama adalah nilai agama, kebudayaan, dan potensi individual, serta faktor lain. Kedua pembelajaran yang mendidik pengetahuan. Ketiga, perlu dilakukan upaya mengembangkan, mengubah, memperbaiki, tetapi dengan menggunakan nilai etos kerja keras, pengembangan mutu, jujur, efisien dan demokratis.[114] Ada beberapa nilai pembentuk (integritas) karakter yang utuh, yaitu menghargai, berkreasi, memiliki keimanan, memiliki dasar keilmuan, melakukan sintesa dan melakukan sesuai etika. Pendidikan karakter pertama melekat kepada pola asuh dalam keluarga, kedua tidak pada prosesnya harus mengalami pembelajaran di sekolah, ketiga setelah melalui proses pertama dan kedua baru bisa terbentuk pendidikan karakter pada masyarakat bahkan pemerintahan. Melalui interaksi lingkungan pendidikan inilah yang membentuk nilai-nilai inti karakter. Nilai inti karakter tersebut adalah kerja keras, kesadaran kultural sebagai warga negara, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, berperilaku baik, jujur, etis dan belajar bertanggung jawab.[115]

---

[112]Lanny Oktavia dkk., *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi pesantren.*, hlm. 11.
[113]Lanny Oktavia dkk., *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi pesantren.*, hlm. 11.
[114]Sri Nawanti, *Pendidikan Karakter* (Cet. I; Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 27.
[115]Sri Nawanti, *Pendidikan Karakter,* hlm. 28.

Muhammad Ilham Usman menyatakan bahwa pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Pendidikan karakter di sekolah didasari oleh sebuah kebutuhan dengan mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Pelaksanaan pendidikan karakter ini dibangun dengan tiga pilar pijakan, yaitu; *pertama,* visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai landasan yang paling kuat; *kedua,* komitmen, motivasi, dan kebersamaan, sebagai landasan berikutnya; dan *ketiga,* adanya tiga pilar yang ditegakkan secara bersama, yaitu; membangun watak, kepribadian, atau moral, mengembangkan kecerdasan majemuk, dan kebermaknaan pembelajaran.[116] Ketiga pilar pijakan ini harus bersinergi bersama sehingga tercipta lingkungan sekolah yang berpendidikan karakter dan menghasilkan lulusan yang berkarakter pula. Koesoema menyatakan bahwa mengajarkan seluruh keutamaan merupakan prinsip pendidikan karakter. Hal ini karena sekolah merupakan lembaga yang dapat menjaga kehidupan nilai-nilai sebuah masyarakat. Beberapa nilai yang sifatnya terbuka yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

1) Nilai keutamaan. Manusia memiliki keutamaan kalau menghayati dan melaksanakan tindakan-tindakan yang utama, yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nilai keutamaan ini, tampil dalam kekuatan fisik dan moral. Kekuatan fisik berarti ekselensi, kekuatan, keuletan, dan kemurahan hati. Kekuatan moral berarti berani mengambil risiko atas pilihan hidup, konsisten dan setia.
2) Nilai keindahan. Nilai keindahan tidak hanya ditafsirkan secara fisik semata, yaitu keindahan berupa hasil karya seni, melainkan menyentuh dimensi interioritas manusia itu sendiri yang menjadi penentu kualitas dirinya sebagai manusia. Nilai keindahan bukan hanya memproduksi hasil seni saja, namun juga mengembangkan dimensi interioritas manusia sebagai insan yang memiliki kesadaran religius yang kuat. Nilai-nilai estetis dan religoisitas ini mestinya menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter.

[116]Muh. Ilham Usman, *Pendidikan Berbasis Karakter,* Mamuju: STKIP DDI Mamuju, Makalah: tidak dipublikasikan, 2013. hlm. 3-5. Lihat Juga Abd. Latief, *Paradigma Pendidikan Dalam Memperkuat Karakter Bangsa Melalui Implementasi Kurikulum 2013*, Makalah tidak dipublikasikan, 2014, hlm. 5-6.

3) Nilai kerja. Manusia utama adalah manusia yang mau bekerja. Penghargaan atas nilai kerja inilah yang menentukan kualitas diri seorang individu. Kasus mencontek, tidak jujur, mencari bocoran soal, beli kunci jawaban, dan lain-lain yang terjadi di lembaga pendidikan merupakan perilaku yang bertentangan dengan semangat nilai kerja ini. Mengajarkan nilai kerja berarti pula mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan jerih payah.
4) Nilai cinta tanah air (patriotisme). Nilai cinta tanah air mengandung makna bahwa setiap warga negara harus memiliki semangat mengorbankan dirinya untuk kebaikan yang lebih tinggi. Nilai cinta tanah air mengajarkan peserta didik untuk memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah kelahirannya, dan Ibu Pertiwi yang membesarkannya.
5) Nilai demokrasi. Nilai demokrasi ini merupakan agenda dasar pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan karakter. Nilai-nilai demokrasi mempertemukan secara dialogis berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat sampai mereka mampu membuat kesepakatan dan konsesus atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama.
6) Nilai kesatuan. Nilai kesatuan mengajarkan peserta didik untuk menyadari adanya pluralitas dalam kehidupannya, dan bagaimana sikap harus menyikapi pluralitas tersebut dalam konteks untuk mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman.
7) Menghidupi nilai moral. Nilai ini oleh Socrates diakui sebagai sebuah panggilan untuk merawat jiwa. Jiwa inilah yang menentukan apakah seseorang itu sebagai individu merupakan pribadi yang baik atau tidak. Nilai-nilai moral ini merupakan hal yang vital bagi sebuah pendidikan karakter. Tanpa menghormati nilai-nilai moral ini, pendidikan karakter akan bersifat superfisial.
8) Nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan ini relevan diterapkan dalam pendidikan karakter karena masyarakat kita telah menjadi masyarakat global. Menghayati nilai-nilai kemanusiaan mengandaikan sikap keterbukaan terhadap kebudayaan lain, termasuk di sini kultur agama dan keyakinan yang berbeda.[117]

---

[117]Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter* (Cet. I; Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 208.

Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode ***knowing the good***, ***feeling the good***, dan ***acting the good***. ***Knowing the good*** bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah ***knowing the good*** harus ditumbuhkan ***feeling loving the good***, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi *engine* yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka ***acting the good*** itu berubah menjadi kebiasaan.

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (***golden age)***, karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua, dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak.[118] Sehingga dapat dipahami bahwa urgensi manajemen pendidikan karakter adalah untuk menjadi individu yang bertanggung jawab di dalam masyarakat, setiap individu mesti mengembangkan berbagai macam potensi dalam dirinya, terutama mengokohkan pemahaman moral yang akan menjadi panduan bagi praktis mereka di dalam lembaga. Oleh karena itu, pendidikan karakter bukan semata-mata mengurusi individu-individu, melainkan juga memperhatikan jalinan relasional antarindividu yang ada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri dengan lembaga lain di dalam masyarakat.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan karakter adalah:

a) pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;

[118]Abdullah Munir, *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah* (Sleman: Pedagogia, 2010), hlm. 14-16.

b) perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat;

c) penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.[119]

Sementara, menurut Sri Judiani tujuan pendidikan karakter adalah sebagai berikut ini.

(1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.

(2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.

(3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.

(4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.

(5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.[120]

Jadi fungsi utama pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, memperbaiki, serta menyaring pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak mental para peserta didik.

---

[119]Kementerian Pendidikan Nasional (Jakarta: Balitbang Kemendiknas, 2010), hlm. 7.

[120]Sri Judiani, *Implementasi Pendidikan Karakter Disekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balitbang Kemendiknas, Vol. 16, Edisi Khusus III, Oktober 2010), hlm. 282-283.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 3

DEMOKRASI PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Demokrasi

Membicarakan demokrasi pada awalnya adalah membicarakan aspirasi politik yang ditempuh melalui suatu proses yang berpusat dan berpangkal pada kedaulatan rakyat merupakan suatu sumber inspirasi dan sekaligus merupakan penentu arah seluruh proses pengambilan keputusan untuk dapat melahirkan suatu kebijakan publik yang diharapkan mampu melahirkan suatu keputusan yang aspiratif dan bermanfaat bagi kepentingan semua atau rakyat.

Mengingat gagasan dan praktik demokrasi.[121] pertama kali berkembang di Yunani sebagaimana telah dijelaskan, bila dirunut kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demokratia*. Kata ini merupakan kombinasi dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau undang-undang.[122] Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan atau undang-undang yang berakar pada rakyat. Dengan perkataan lain, dalam term politik bahwa kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat. Pengertian demokrasi inilah yang secara etimologi dapat diterima.[123] Demokrasi

[121]Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi Pengalaman Baru Muslim dalam transisi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gugus Pres, 2002) hlm. 6.

[122]Hasan Sadhily, *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid. IV, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980) hlm. 784-785.

[123]Al-'Amid Sulaiman Muhammad al-Thamawy, *al-Demokra¯hiyah wa al-Dustur al-Jadid,* (Cet. I; Mesir: al-Istilamat al-Mishriyah, 1971), hlm. 7.

dengan demikian, merupakan suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintah atau garis kebijakan di belakang keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya dapat terjadi jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat.

Secara praktis, demokrasi adalah cara untuk menetapkan otoritas, di mana rakyat memilih pemimpin-pemimpin mereka. Jika di dalam sistem politik lainnya, orang-orang tertentu dapat menjadi penguasa karena keturunan, kekayaan, penunjukkan, nasib atau paksaan dengan kekerasan, maka dalam demokrasi ada dua kemungkinan. *Pertama,* penguasa dan rakyat identik, sebagaimana dalam demokrasi langsung ala Yunani Kuno. Atau para penguasa dipilih oleh rakyat dengan memberikan suaranya. Sebuah negara bangsa modern mempunyai suatu sistem politik yang demokratis hingga tingkat di mana pembuat-pembuat kebijakannya yang paling berpengaruh ditentukan lewat pemilihan umum yang jujur, adil, diadakan secara berkala, para kandidat secara bebas bersaing untuk memperoleh suara terbanyak, dan praktis semua penduduk yang telah memenuhi syarat dapat menyatakan pilihanya, menurut definisi prosedural, karenanya pemilihan umum merupakan esensi demokrasi.[124]

Para pemikir dan pakar politik modern menjadikan rujukan konsep demokrasi pada arti kata tersebut di atas, yaitu pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, yaitu pemerintahan yang dibangun di atas dasar persekutuan antarindividu yang banyak dalam menyalurkan hak-hak kedaulatannya, dan pemerintahan politik bangsa yang melibatkan seluruh rakyat, serta pemerintahan di mana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Demikanlah beberapa definisi para pakar politik tentang arti demokrasi.

Meskipun pengertian di atas dapat diterima, tetapi yang perlu diingat adalah demokrasi bukan mayoritas dan elitis meskipun demokrasi secara prosedural, berjalan di atas prinsip mayoritas. Meskipun begitu, karena sejarah kemunculan dan perkembangannya seperti yang telah dijalaskan, sebagai gerakan politik yang menentang feodalisme atau dominasi aristokrasi, maka demokrasi bukanlah mayoritas, tetapi menjunjung tinggi prinsip mayoritas yang di dalamnya

[124]Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis,* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media, 2002), hlm. 17.

tercakup kompromi yang adil, yang tidak mengganggu kepentingan mayoritas yang paling fundamental. Demokrasi adalah *"majority rule, minority right"* [125] suatu negara disebut demokratis sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan beragama), bagi kelompok minoritas sekalipun. Sistem politik demokrasi adalah sistem menolak diktatorisme, feodalisme, dan totalitarianisme. Dalam demokrasi hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk di dalamnya kaum minoritas, bukanlah hubungan kekuasaan, tetapi berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut.[126]

Demokrasi bangunan politik mempunyai korelasi positif dengan *polisentrisme*, yaitu suatu paham yang mengenal adanya banyak pusat.[127] Dengan kata lain, polisentrisme merupakan suatu paham yang berkecenderungan untuk mengayomi atau menyangkut masyarakat secara umum, khususnya masyarakat politik. Lawan kata *polisentrisme* adalah *monosentrisme*, yaitu suatu paham serba satu dalam pusat kegiatan yang melahirkan *resimentasi* yang totaliter. Sistem suatu partai tunggal dalam perspektif politik dan absolutisme dalam perspektif pendidikan Islam adalah kongritisasi dari gejala itu.[128] Sementara itu, demokrasi menghendaki sebanyak mungkin alternatif atau kebenaran.

Kalau demokrasi seperti yang dikatakan di atas adalah bahwa kedaulatan di tangan rakyat, maka menurut Masdar Farid Mas'udi, perlu dibedakan antara demokrasi yang *formal-prosudural* dan demokrasi pada level *material-subtansial*.[129] Menurutnya yang pertama bicara soal bentuk dan termasuk di dalamnya aturan main tentang siapa yang berhak mengambil keputusan, maka yang kedua bicara soal isi, soal substansi, tentang *siapa yang harus diuntungkan dengan keputusan*. Lebih jauh ia

---

[125]Nurcholis Majid, *Demokrasi dan Demokratisasi,* dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokratisasi Politik, Ekonomi, dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa ORBA,* (Cet. I; Jakarta: Para Madinah, 1994), hlm. 217.

[126]Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historist*., hlm. 21.

[127]Nurcholis Majid, *Islam Kerakyatan dan ke Indonesiaan,* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1993) hlm. 181.

[128]Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani,* (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 182.

[129]Masdar Farid Mas'udi, *Demokrasi dan Islam* dalam M. Masyur Amin dan Muhammad Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial,* (Cet. I; Jakarta: LKPSM NU, 1993), hlm. 4.

menguraikan, bahwa demokrasi sebagai doktrin kedaulatan rakyat, nampaknya masih berputar pada tingkatan yang pertama, tingkatan formal prosedural. Bahkan pengumpulan pada level formal prosedural pun banyak yang berhenti di tengah jalan, sedangkan, demokrasi pada level kedua, material subtansial, semakin diabaikan.[130]

Sementara, momen penting dari demokrasi adalah kebebasan bicara dan berkehendak. Artinya, di dalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada di dalam masyarakat, dengan perkataan lain, pluralisme dan relativisme kebenaran pada akhirnya muncul untuk menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan yang kini tampak menjadi haus dan usang oleh petasan transformatif sosial budaya dan perubahan masyarakat modern.[131]

Menurut KH. Abdurrahman Wahid, demokrasi dilihat dari segi sifatnya, ada yang sifatnya pokok dan ada yang sifatnya derivasi atau lanjutan dari yang pokok itu. Nilai pokok demokrasi, menurutnya adalah kebebasan, persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan.[132] Beliau juga mengutip pendapat-pendapat Syeikh Ali Abdurraziq yang menyatakan bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan, dan *syrah*.

Kedua tokoh di atas apabila penulis mencoba untuk mengkompromasikan adalah tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh Masdar di atas. Demokrasi dapat dibedakan kepada formal prosedural yang berupa *syrah*. Artinya *syrah* atau permusyawaratan sering dianggap demokrasi. Hal ini benar kalau dilihat dari bentuk (*form*). Dengan kata lain, bentuk demokrasi dapat berupa *syrah* dan lainnya. Dan demikian pula demokrasi dapat kita rujukan kepada material subtansial yang berupa nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan dan keadilan.

Dari beberapa pemikiran tentang demokrasi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa demokrasi merupakan: *pertama* paham politik. Hal

---

[130]*Ibid*., hlm. 4.

[131]*Iibid*., hlm. 5.

[132]KH. Abdurrahman Wahid, *Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi*, dalam M. Masyur Amin dan Muhammad Najib (ed), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial,* (Cet. I; Jakarta: LKPSM NU, 1993), hlm. 89.

ini dapat kita lihat pada semangat akan terealisasinya kebebasan dan persamaan politik bangsa, baik secara pribadi sendiri maupun melalui perwakilan. *Kedua*, demokrasi dibangun atas dasar realisasi persamaan dan kebebasan politik. Dan *ketiga* demokrasi merupakan paham yang berkecenderungan pada masyarakat.

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka yang dimaksud dengan demokrasi pendidikan adalah demokrasi pendidikan yang berlandaskan ketentuan-ketentuan agama Islam. Karena berbicara mengenai segala sesuatu, termasuk demokrasi pendidikan, menurut pandangan Islam selalu harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, sebagai sumber identik ajaran Islam.

B. Nilai-nilai Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Nilai-nilai dan cita-cita demokrasi, dalam era modern, merebak hampir bersamaan dengan revolusi industri. Karena sudah bukan hal yang tabu, revolusi industri melahirkan berbagai perubahan dalam kehidupan, baik lingkup keluarga dan dalam hubungan kerja yang menyebabkan kehidupan yang bersifat individualistik, sehingga masyarakat memerlukan tatanan sosial yang baru yang harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dan cita-cita demokrasi.[133]

Untuk membentuk lembaga pendidikan yang sesuai dengan proses globalisasi harus melakukan berbagai upaya dengan mengadaptasi argument William J. Mathis dalam Dede Rosyada, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpenetrasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga sekolah harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat konstituennya secara *fair*, karena mereka adalah *stake holder*-nya, dan sekaligus *client* dari sekolah tersebut. Masyarakat adalah konstributor terhadap sekolah, dan mereka memiliki hak untuk dilayani.
2. Perubahan dunia semakin cepat, dan para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan tersebut. Tantangan terdepan adalah keragaman permintaan pasar, dan sekolah harus mampu mempersiapkan orang-orang yang mengisi kebutuhan

[133]Zamroni, *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi,* (Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 46-47.

tersebut. Dan sumber daya manusia yang diterima oleh sekolah juga mengandung keberagaman, sehingga tidaklah *fair* apabila semua siswa harus memiliki hanya satu keterampilan yang sama.

3. Kemajuan teknologi dalam semua *sector industry* dan pelayanan akan menggeser posisi manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mempersiapkan SDM agar tidak tergeser oleh alat-alat modern tersebut.
4. Peranan wanita semakin menguat dan posisi wanita tidak lagi marginal. Mereka memiliki hak dan peluang yang sama dalam hal pekerjaan dan karier. Tidak ada deskriminasi atas dasar gender.
5. Pemahaman doktrin keagamaan kian terbuka dan inklusif. Agama tidak menjadi halangan untuk kemajuan, tetapi justru mendorong perubahan-perubahan untuk perbaikan.
6. Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal dan peran media masa yang semakin menguat.[134]

Dari gambaran di atas, terdapat suatu upaya dalam demokratisasi pendidikan. Peran pendidikan dalam mewujudkan demokratisasi adalah mengembangkan kepribadian dan watak individu bagi terwujudnya warga negara yang baik. *The Association for Education in Citizenship* (1947) menegaskan bahwa setiap peserta didik hendaknya:

a. diberikan kesempatan penuh mengembangkan dirinya sendiri sebagai seorang individu yang memiliki kepribadian sehingga mampu menikmati hidupnya dengan mengembangkan kemampuannya sendiri dan dapat hidup sesuai dengan realita yang dihadapi;
b. memiliki kemampuan memainkan peran peran sosial dan politik secara aktif sebagai warga masyarakat;
c. disiapkan dengan kemapuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan minat dan interesnya;
d. dikembangkan kemampuannya untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dan budayanya dengan senantiasa meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya.[135]

Dalam kaitannya dengan pendidikan demokrasi, Snauwaret dalam Zamroni berpendapat bahwa pendidikan demokrasi senantiasa harus

---

[134]Dede Rosyada,, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 11-12.

[135] *Ibid.*, hlm. 62.

berdasarkan diri terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri peserta didik *emphaty*, respek pada yang lain, dan memiliki pandangan sebagai warga negara, bangsa dan global.[136]

Demokrasi suatu sistem sosial politik yang menekankan bahwa kebebasan individu harus disertai tanggung jawab. Oleh karena itu, demokrasi senantiasa menekankan keberadaan pendidikan yang memadai untuk mengembangkan sikap dan perilaku disiplin warga bangsa. Tanpanya, kebebasan yang dimiliki warga harus dibayar dengan mahal dan akan menciptakan anarki.[137]

Demokrasi yang didasarkan pada keyakinan akan martabat dan kehormatan setiap individu hanya akan berhasil apabila didampingi dengan pendidikan yang bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus menekankan pada pengembangan intelektual *skill* yang ditekankan pada *critical thinking* peserta didik, *personal skill* dikembangkan pada percaya diri dan *political self efficacy*, dan *social skill* ditekankan empati dan respek pada orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi dan memiliki toleransi. Dan hal ini akan terjadi apabila sekolah dapat menstransfer pengajaran yang bersifat akademis sempit ke dalam realitas kehidupan yang amat luas di masyarakat.

Dan secara singkatnya, pendidikan demokrasi memiliki empat tujuan:

1) Mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga memiliki sikap empati, respek, toleransi dan kepercayaan pada orang lain.
2) Mengembangkan kesadaran selaku warga suatu bangsa dan warga dunia.
3) Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional efisiensi individu.
4) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi di antara sesama warga.

Pendidikan untuk demokrasi memerlukan dua hal: kultur sekolah dan kurikulum, khususnya ilmu pengetahuan sosial yang memadai untuk mengembangkan demokrasi. Kultur sekolah dan dinamika

[136]Zamroni, *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi,* (Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 46.

[137] Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis,* hlm. 36.

hubungan, serta interaksi yang terjadi di sekolah merupakan faktor yang amat penting bagi setiap peserta didik untuk menghayati *the way of life* dan nilai-nilai yang mempengaruhi hubungan antarpribadi di antara mereka. Dan pendidikan demokrasi akan berjalan apabila sekolah itu sendiri bersifat demokratis, memiliki kultur demokrasi yang mengilhami nilai-nilai, cita-cita, prinsip-prinsip yang akan mendorong setiap warga sekolah dalam praktik sehari-hari akan mencerminkan suatu kehidupan sosial yang demokratis. Selain itu, kurikulum sebagai jantung pendidikan harus memberikan kesempatan peserta didiki untuk memperoleh pengalaman untuk mengembangkan watak, keyakinan, cita-cita, dan sikap, serta perilaku yang cocok dengan nilai-nilai demokrasi.[138]

Dalam konteks ini, proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses untuk dapat memecahkan masalah (*oroblem solving*). Manusia memerlukan kemampuan untuk melihat dunia secara nyata yang penuh dengan masalah yang harus dipecahkan. Hal tersebut diperlukan kemampuan menganalisis, mencari jalan mengatasinya, serta mencoba cara-cara pemecahan yang telah dirumuskan (*trial and error*). Dari pengalaman-pengalaman tersebut, diperoleh jalan yang paling tepat dalam upaya pemecahan masalah.[139] Pemecahan masalah ini dalam implementasinya, bukan kembali pada tatanan yang seperti semula, namun berupaya menciptakan sistem baru yang lebih baik. Sistem pembelajaran yang baik, sistem sosial masyarakat yang ideal sehingga dalam hal ini dibutuhkan kerja sama oleh seluruh komponen masyarakat.[140]

Pendidikan demokrasi mengubah watak subjek dalam pembelajaran, melihat kondisi masyarakat saat ini dan beberapa kemungkinan mendatang yang begitu menantang di mana arus komunikasi dan teknologi telah mengglobal sehingga menuntut masyarakat berpikir futuristik dan kreatif. Dalam dunia pendidikan, posisi dan peran subjek dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa) adalah sangat menentukan. oleh karena itu, dibutuhkan subjek pembelajaran yang memiliki watak masa depan dan meninggalkan pola pikir lama dan menghambat perkembangan kualitas proses pembelajaran. Dosen mau tidak mau

[138]*Ibid.,* hlm. 66.
[139]Lihat *Ibid.,* hlm. 77.
[140]Lihat *Ibid.,* hlm. 78.

harus meninggalkan perang otoriternya di dalam proses pembelajaran dan mahasiswa harus memiliki kesadaran kritis dalam memahami secara komitmen bahwa dirinya adalah subjek belajar yang aktif.[141]

Proses pembelajaran diarahkan pada subjek pendidikan menuju dewasa, bersikap kritis, mencari solusi terhadap masalah, dan secara jitu dan serius menuju penciptaan sistem alternatif, dan lain sebagainya. Menurut paradigma lama, dosen adalah maha tahu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga watak tersebut harus diubah menjadi tenaga pengajar sebagai sosok yang bisa salah, bukan sosok yang otoritatif. Dalam sisi profesionalitas, kebebasan profesional seorang dosen untuk memilih bahan pelajaran dan menyampaikan di kelas harus dihargai semua pihak. Tanpa adanya kebebasan profesional, suasana pendidikan yang demokratis dan kreatif sebagaimana yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tidak akan terwujud dan model pendidikan bakal stagnan dan tidak berkembang.[142]

Peserta didik diharapkan dapat berpikir reflektif dan terus-menerus akan sesuatu yang lebih benar dan tepat. Karena itu, fokus dari proses pendidikan ini bukan untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi semata, tetapi juga untuk menguasai hubungan-hubungan antara pelajaran (fakta-fakta mata pelajaran) yang sedang dipelajari atau diteliti. Dengan demikian, proses pendidikan adalah proses untuk terus-menerus bertanya dan mencari keputusan mengenai fakta-fakta yang ditemukan (*Education as inquiry*).[143]

Sumber pembelajaran, sistem pendidikan yang sehat selalu berusaha memahami zamannya dan berusaha pula memenuhi tuntutan-tuntutannya. Setiap pendidikan yang dewasa selalu berusaha mempersiapkan masyarakat yang dilayaninya mengembangkan wawasan-wawasan baru untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan yang tampak akan datang. Interaksi lembaga pendidikan dengan masyarakat seperti ini akan melahirkan watak yang dinamis pada sistem pendidikan. Dinamika ini tercermin pada perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi. Berbagai wawasan sekarang dan masa depan

---

[141]Lihat Polo Freire, *Pedagogy of The Oppressed* (Cet. I; New York: Preiger, 1998), hlm. 31.

[142]Lihat Mochtar Bukhari, *Pendidikan Antisipatoris* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 25.

[143]Lihat *ibid.*, hlm. 26.

yang perlu diakomodasikan dalam proses pembelajaran, terkait erat dengan sumber pembelajaran atau sumber ilmu pengetahuan itu sendiri.

Fakta sosial termasuk peristiwa-peristiwa kemanusiaan dalam konteks global yang dapat diakses melalui pengalaman langsung, media cetak, media elektronik, internet, dan lain-lain sebagainya yang merupakan sumber pembelajaran sangat penting untuk kemudian dikaji dan diteliti secara mendalam sehingga tercipta solusi-solusi bagi masa depan masyarakat tersebut. Tentunya proses pembelajaran tidak terpaku pada buku-buku teks saja, tetapi juga melibatkan pengalaman-pengalaman langsung. Belajar sambil berbuat adalah paradigma yang tepat untuk proses pembelajaran, sejalan dengan hal itu, proses pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis dan kreatif berpusat pada kebutuhan belajar mahasiswa, dan bukannya terkait pada jam pelajaran yang telah diatur di dalam kurikulum oleh para birokrat.[144]

Secara umum, tujuan pendidikan transformatif yang berorientasi pendidikan kritis bagi masyarakat adalah terbentuknya satu kehidupan yang berkeadilan, mandiri, tidak ada ketergantungan kepada pihak lain, keberpihakan kepada yang lemah, memposisikan sama, dan sebagainya, sedangkan bagi peserta didik manfaat pendidikan transformasi adalah menyiapkan bekal dalam menghadapi dan memecahkan *problem* hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai sebagai warga negara. Hal ini akan membentuk masyarakat yang lebih apresiatif terhadap toleransi pluralistik dan perbedaan, meskipun hal itu terkesan ambivalen. Hal itu menjadikan peserta didik dalam pendidikan sebagai subjek yang harus diisi. Peserta didik dibentuk oleh sistem wacana yang signifikan, dengan cara mendesentralisasikan peserta didik melalui bahasa, kehidupan sosial, dan ketidaksadaran Hal itu ditegaskan oleh Lovlie, bahwa kritik postmodernisme telah menumbangkan hampir seluruh pusat budaya Barat, khususnya dalam personal-otonomi dan tujuan pendidikan[145]

Hal yang sangat signifikan hadirnya dalam negara kepulauan Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, agama, bahasa,

---

[144]Lihat, H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik untuk Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2008), hlm. 237.

[145]Lihat H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 43.

dan sebagainya. Saling menghormati, menghargai pandangan, dan menghargai prinsip orang lain akan selalu terwujud sehingga akan menghindari konflik horizontal antarsuku bangsa ataupun mampu dan berani melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa mana pun.

Adapun tujuan pendidikan demokrasi terhadap pendidikan Islam, adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Epistemologi Pendidikan Islam

Pada prinsipnya, jika secara epistimologis sudah tidak ada lagi yang menjadi sentral keilmuan dan yang lain menjadi konsumen pengetahuannya, maka diharapkan akan terjadi perubahan (transformasi) di sisi pengetahuannya, yang tentunya kalau sudah terjadi demikian, perjuangan perubahan juga akan terjadi dalam struktur sosial.[146] Problematisasi terhadap seluruh kesimpulan pengetahuan dengan nalar Transvaluasi, *The Will To Power, The Eternal Recurrence, Ubermensch*, Arkeologi, dan dekonstruksi dalam konteks antroposentris akan menjadi hal yang sangat signifikan dalam mengubah kebuntuan epistemologi pengetahuan pendidikan modern kaum Muslim yang tidak bisa lepas dari kungkungan modernisme yang penuh dengan penindas antara satu dengan yang lainnya, khususnya oleh kaum dominan terhadap kaum marjinal. Kaum Muslim Indonesia akan mampu berdiri di kakinya dalam menentukan takdir hidupnya tanpa terpengaruh oleh bentuk-bentuk dominasi, baik dalam bentuk pengetahuan yang bersifat diskursif maupun bentuk sosial dalam bentuk institusi.[147]

Bagi Habermas, refleksi kritis akan menciptakan perubahan karena refleksi kritis dapat meraih kekuatannya secara tepat dan efektif. Refleksi kritis bisa mengambil jarak secukupnya dari tumpukan beban prasangka untuk kemudian menundukkannya di bawah kritik rasional. Hal ini dapat dilakukannya dengan melangkah keluar dan tradisi dan menjadi yang lain, atau dengan menciptakan jarak (distingsi) yang cukup tegas antara kesadaran konvensional dengan kesadaran *post*-kovensional. Menjadi yang lain, kemudian merangkul kemampuan akal

[146]Lihat Mansoer Fakih, *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 23.

[147]Muhammad Karim, *op. cit*, h. 177. Bandingkan M. Ngalim Purwanto, *Sosial Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 95.

dan rasionalitas untuk mendefinisikan dirinya dan mempertahankan tujuannya menjadi teori emansipatoris, yang pada akhirnya akan membuat perubahan di struktur pengetahuan maupun sosial.[148]

Implikasi yang jelas dan pendekatan pembelajaran kritis tersebut adalah munculnya dua macam pemahaman pendidikan. Dua pemahaman pendidikan tersebut, pada hakikatnya mempunyai perbedaan baik dari sisi metode maupun fungsi pelaksanaannya, yaitu apa yang disebut dengan "pedagogi" dan apa yang disebut sebagai "andragogi". Pedagogi adalah suatu seni mengajar yang menempatkan subjek peserta didik meskipun dilihat dari realitas biologis subjek-subjek sudah menunjuk tingkat kedewasaan, sedangkan andragogi menempatkan peserta belajar sebagai subjek yang dianggap dewasa meski secara biologis belum mengindikasikan adanya tingkat kedewasaan tertentu.

2. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam

Selama ini, pola pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam masih terlalu melangit sehingga kurang membawa semangat praksis emansipatoris dan lebih parahnya, masih tidak mumpuni dalam melakukan analisis kritis terhadap fakta yang terselubung di ruang sosial sehingga berakibat pada kurangnya maksimalnya pengaruh Pendidikan Islam terhadap perubahan yang lebih baik, berkeadilan, dan memberi perlindungan akan hak-hak orang kecil (*mustadhifin*) di masyarakat. Malahan, kecenderungan pendidikan Islam masih menjadi penjaga moral (akhlak) murni individu yang bersifat personal. Pendidikan Islam belum menyentuh jeratan dan sistem sosial yang membuat kaum *mustadahfin* tidak terbebaskan dan tanpa kreativitas.[149]

Di sisi lain, epistimologi pengembangan kurikulum masih lebih nenekankan pada semangat vertikal.[150] Keadaan ini berakibat pada

---

[148]Mauludin, *Menafsir Hermeneutika, dalam Jurnal Gerbang* (Cet. II; Surabaya: eI-SAD, 2003), hlm. 29.

[149]Muhammad Karim, *Op.Cit.*, hlm. 161. Bandingkan Lihat Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: Bumi aksara, 2009), hlm. 6.

[150]Kata vertikal yang diubah menjadi horizontal tidak berpengertian anti-Tuhan. Dalam pendidikan kritis transformatif, perbincangan vertikal masih dalam konteks sangat antroposentris, bukan teosentris. Vertikal dalam arti ini adalah 'ada sekelompok elir ilmu pengetahuan yang disakralkan dengan memposisikan yang lain menjadi objek mati'. Hal itulah yang ditentang. Untuk lebih lanjut, baca bab III dalarn membincang pertautannya paradigina kritis transformatif dalam Al-

terlalu bermetafisikanya pemahaman pendidik dan peserta didik, yang pada akhirnya membuat struktur kehidupan sosial mengalami kesulitan perubahan dan bahkan, mudah direkayasa oleh kebudayaan lainnya yang lebih dominan. Untuk mengarahkan pengembangan kurikulum pendidikan Islam agar memuat berbagai paradigma kritis transformatif, maka pengembangan kurikulum tersebut itu harus bersifat horisontal,[151] yaitu pendidikan yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara teori dan praktik atau antara ilmu dan amal dalam kehidupan sehari-hari.

Paulo Freire beranggapan selain melibatkan guru dan murid, muatan kurikulum juga harus memperlihatkan realitas konkret peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip dinamis, bukan prinsip-prinsip statis, seperti pada "pendidikan yang bersistem bank". Penerapan kurikulum yang benar akan menumbuhkan kesadaran kritis dan mampu mendorong cara berpikir siswa dalam memandang realitas diri dan masyarakatnya.

3. Perubahan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Islam

Metode pengajaran adalah cara-cara pelaksanaan suatu proses pengajaran atau hal-hal yang menyangkut persoalan suatu bahan pengajaran yang diberikan kepada peserta didik secara teknis, atau dengan kata lain, metode adalah cara yang dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu.[152]

Metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam masih berlandaskan subjek-objek yang pada akhirnya membuat kesenjangan semakin terbuka lebar. Sebagian besar dosen masih tampil menjadi "pahlawan" yang harus ditiru, dan pilihan materinya pun masih terlalu melangit (tidak sesuai dengan pengalaman nyata di lapangan). Pendidik harus bekerja dengan berdasarkan pengalaman peserta didik dalam proses

---

Qur'an. Lihat Ki Hadjar Dewantara, *Asas-Asas dan dasar-Dasar Taman Siswa* (Cet. II; Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa 1974), yang dikutip oleh H.A.R. Tilaar dalam *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 132.

[151]Kurikulum yang bersifat horizontal adalah ezra pandang kurikulum yang emansipatoris, partisipatoris, dan merupakan kebalikan dan kurikulum yang bersifat vertikal dan subjek objek sehingga memahami betul tentang peserta didik, masalahnya dan lingkungannya. Lihat Muhammad Karim, *Op.Cit.,* hlm. 162.

[152]B. Suryo Subroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), him. 148.

yaitu pendidikan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara teori dan praktik, atau antara ilmu dan amal dalam kehidupan keseharian.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kemampuan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata di dalam masyarakat selanjutnya, diidentifikasi pokok-pokok bahasan/topik keilmuan ini yang diperlukan, dan dikemas dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah, dari sini pemberian bekal kepada peserta didik dengan apa yang telah dipelajari pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah dan diharapkan dapat membentuk kekritisan yang transformatif yang nantinya diperlukan pada saat yang bersangkutan memasuki kehidupan nyata di masyarakat yang sarat dengan ketidakadilan. Pendidikan bukan menerapkan kurikulum yang memproduksi kesenjangan sosial. Guru harus mengubah pengalaman dominasi dalam diri peserta didik dan memberdayakan mereka agar terbebas dalam tatanan demokrasi.[153]

Hubungan universitas dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, universitas sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dan sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Universitas dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.[154]

C. Tinjauan Demokrasi tentang Kurikulum

Pendidikan Islam yang berbasis demokrasi merupakan salah satu kurikulum yang urgen untuk mendidik dan meningkatkan kapabilitas generasi muda sehingga mampu mengembangkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki untuk menjalankan hak dan kewajibannya, memikul tanggung jawab terhadap diri keluarga, dan

[153]H.A.R. Tilar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 44.

[154]E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekalah: Konsep, Strategi, dan implementasi* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 50.

turut serta secara aktif untuk kemajuan masyarakat dan bangsa.[155] Masa depan suatu bangsa akan ditentukan oleh generasi mudanya, kualitas suatu bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh anak-anak sekarang, terutama melalui pendidikan formal yang diterima di sekolah. Apa yang akan dicapai di sekolah ditentukan oleh kurikulum sekolah itu. Maka dapat dipahami bahwa kurikulum sebagai alat yang begitu vital bagi perkembangan bangsa dan negara dapat pula dipahami betapa pentingnya mengembangkan kurikulum itu, khususnya yang berbasis demokrasi. Setiap guru merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kurikulum, maka ia harus pula memahami seluk-beluk kurikulum.

Fungsi kurikulum pendidikan Islam yang berbasis demokrasi dapat dilihat dalam beberapa cara, antara lain; pertama, dari pihak yang memanfaatkannya. Kedua, dari segi fungsinya secara umum, tanpa melihat pihak yang memanfaatkan. Adapun fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang berbasis demokrasi, kurikulum dapat dipandang dari berbagai segi sebagai berikut. Pertama, sebagai alat untuk pencapaian tujuan pedidikan nasional, dengan menjabarkannya secara berturut menjadi tujuan nasional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional, pada setiap jenis dan jenjang lembaga pendidikan (sekolah). Kedua, sebagai program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik atas bimbingan para guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, sebagai pedoman bagi guru/dosen dan peserta didik dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar, agar tujuan pendidikan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Jenis pengetahuan/keahlian, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh lulusan suatu sekolah dapat diketahui melalui kurikulum sekolah tersebut.

Oleh sebab itu, anggota masyarakat yang mempunyai minat untuk membantu memajukan suatu sekolah dapat mengajukan saran-saran perbaikan kurikulum sekolah tersebut, di samping perbaikan komponen-komponen lain dalam sistem persekolahan tersebut. Bantuan yang demikian perlu bila ada anggota masyarakat yang berhasil mengidentifikasi adanya kelemahan-kelemahan dalam kurikulum suatu

[155]Lihat Omar Mu¥ammad al-Taom³ al-Sya'ban³, *Falsafah al-Tarbiyat al-Islam³*, diterjemahkan oleh Hasan Langulung dengan Judul *Falsafah Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 476.

sekolah. Dengan kata lain, kurikulum merupakan alat kontrol bagi masyarakat *(social control)*.[156]

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena ia merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Tujuan pendidikan di suatu bangsa ditentukan oleh falsafah dan pandangan hidup bangsa atau negara tersebut. Berbedanya falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa atau negara menyebabkan berbeda pula tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan tersebut, dan sekaligus akan berpengaruh pula terhadap kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam negara tersebut.[157] Begitu pula perubahan politik pemerintahan suatu negara mempengaruhi pula bidang pendidikan, yang sering membawa akibat terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, kurikulum berbasis demokrasi bersifat dinamis guna menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi.

Pada dasarnya, kurikulum mempunyai aspek utama yang menjadi ciri-cirinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan Langgulung, yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum itu.
2. Pengetahuan (*knowledge*), ilmu-ilmu data-data, aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu.

---

[156]Lihat. Hj. Baego Ishak, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Teknik* (Cet. I; Ujungpandang: CV. Berkah Utami, 1998), hlm. 23-25.

[157]Pendidikan Islam yang berfalsafahkan Al-Qur'an sebagai sumber utamanya, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama penyusunan kurikulumnya. Muhammad al-Jabiri mengemukakan bahwa, Al-Qur'an al-Karim adalah kitab terbesar yang menjadi sumber filsafat pendidikan dan pengajaran bagi umat Islam. Sudah seharusnya kurikulum pendidikan Islam disusun sesuai dengan *Al-Qur'an al-Karim*, dan ditambah dengan al-Hadis untuk melengkapinya. Di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, ditemukan kerangka dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka dasar tersebut adalah tuntutan Al-Qur'an bahwa yang menjadi kurikulum inti pendidikan Islam adalah *"tauhid'* dan harus dimantapkan sebagai unsur pokok yang tak dapat diubah. Pemantapan kalimat tauhid ini sudah dimulai semenjak bayi dilahirkan dengan memperdengarkan *azan* dan *iqamah* terhadap anak yang baru dilahirkan. Selanjutnya adalah, perintah "membaca". Lihat Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 65

3. Metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka ke arah yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang.
4. Metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancangkan dalam kurikulum.[158]

Beranjak dari keempat aspek utama kurikulum tersebut, maka jika dikaitkan dengan falsafah pendidikan yang dikembangkan oleh pendidikan Islam tentu akan menyatu dan terpadu dengan ajaran Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikulum dalam pendidikan Islam adalah sejalan dengan tujuan falsafah pendidikan Islam yaitu membentuk akhlak yang mulia dalam kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia. Untuk mencapai tujuan akhir dimaksud tidak dapat dilakukan sekaligus, melainkan harus melalui tahap-tahap tertentu yang setiap tahap harus menuju kesasaran yang sama, yaitu pengabdian (menyembah kepada Allah Swt.) Firman Allah Swt.:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Terjemahannya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (*Q.S. aZ-Dzariyat/51: 56*).

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu, maka sekolah menyediakan program tertentu, sebagai bahan yang dipaketkan dalam bentuk kurikulum. Oleh karena itu, memahami dan menguasai apa dan bagaimana seluk-beluk kurikulum itu adalah sangat penting terutama guru sebagai kunci utama dalam pelaksanaan kurikulum.

Kurikulum dapat diberi arti sebagai sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Apa yang direncanakan biasanya bersifat ide, suatu cita-cita tentang manusia atau warga negara yang akan dibentuk.

Kurikulum Pendidikan Islam mempunyai ciri khusus menurut Omar Muhammad al-Taomi al-Sya'bani. Ciri-ciri tersebut secara ringkas dapat disebutkan, yaitu: Pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya, kandungan-kandungan, metode-metode,

[158]Lihat *ibid*., hlm. 59.

alat-alat dan tekniknya bercorak religus; Kedua, luas cakupannya, serta menyeluruh kandungannya. Yaitu kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran-ajaran yang menyeluruh dalam segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologi, dan sosial; Ketiga bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan; Keempat, bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik; kelima kurikulum yang disusun selalu disesuaikan daya minat dan bakat anak didik. Dari ciri tersebut, dapat memberikan arah bahwa kurikulum yang kecenderungannya mengarahkan kepada pengembangan untuk mencapai pada tujuan agama, dalam hal ini adalah iman dan akhlak yang harus dimiliki oleh anak didik bila nanti berada di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.[159]

Berbagai tafsiran tentang kurikulum, dapat kita tinjau dari segi lain, sehingga kita peroleh penggolongan sebagai berikut.

a. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan.
b. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran, tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa, misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, dan lain-lain.
c. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
d. Kurikulum sebagai pengalaman peserta didik. Pandangan ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada setiap siswa. Ada kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.[160]

---

[159]Lihat *ibid*., hlm. 486.
[160]Lihat S. Nasution, *Op.Cit*., hlm. 9.

Dengan adanya berbagai tafsiran tentang kurikulum tak perlu dipersoalkan, karena justru dapat memberi dorongan untuk mengadakan inovasi mencari bentuk-bentuk kurikulum baru. Pandangan yang berbeda-beda itu memberi dinamika dalam perkiraan tentang kurikulum secara kontinu tanpa henti-hentinya.

Kurikulum bermacam-macam bentuknya. Bentuk yang paling di kenal dan sangat meluas pemakaiannya, ialah *subject curriculum* (mata pelajaran atau berpusat pada mata pelajaran). Kurikulum ini banyak mempunyai ciri-ciri yang menguntungkan, namun juga banyak mempunyai kelemahan. Karena kelemahan itu banyak timbul kritik dari para ahli kurikulum lain.

Maka timbullah berbagai bentuk kurikulum lain yang dianggap sebagai reaksi terhadap subjek kurikulum itu. Mereka yang menganggap bahwa kurikulum memberi pengetahuan yang otomatis atau fragmentaris menganjurkan kurikulum yang *integrated* atau dipadukan, yang tidak mengenal batas-batas antara mata pelajaran. Para ahli mengecam kurikulum ini karena dalam proses belajar anak itu hanya pasif, menganjurkan suatu bentuk kurikulum yang lebih mengaktifkan anak-anak dalam proses belajar, yang mereka sebut *activity curriculum*.[161]

Bagaimanapun perbedaan pengertian kurikulum itu dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan peserta didik atau anak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan-kegiatannya diharapkan akan menimbulkan berbagai perubahan dalam tingkah laku peserta didik atau anak sesuai dengan falsafah dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, lembaga pendidikan tidak hanya menghadapi para peserta didik atau anak didik, tetapi juga kehidupan dan perkembangan dalam masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam dalam hal ini, berfungsi sebagai alat untuk mempertemukan kedua pihak, sehingga peserta didik atau anak didik dapat mewujudkan bakatnya secara optimal dan belajar menyumbangkan jasanya untuk meningkatkan mutu dalam masyarakat.[162]

Maka menurut penulis bahwa kurikulum bukan hanya terbatas pada bahan pelajaran yang akan diserap oleh para peserta didik atau anak didik, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang didapatnya sebagai

[161]*Ibid*., hlm. 10.
[162]Mappanganro, *Op.Cit*., hlm. 3.

akibat interaksi edukatif dan interaksi sosial. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan mutu hidupnya dengan memberikan ilmu atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat.

Selanjutnya, penulis berusaha memotret macam-macam kurikulum.

1) Kurikulum Terpisah *(separate-subject curriculum)*

Kurikulum ini disebut demikian, sebab segala bahan pelajaran disajikan dalam mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Jenis kurikulum ini dianggap berasal dari zaman Yunani Kuno. Orang Yunani telah mengajarkan berbagai bidang studi seperti kesusastraan, matematika, filsafat, dan ilmu pengetahuan ditambah dengan musik dan atletik. Orang Romawi menerimanya dari orang Yunani sambil mengadakan perubahan. Mereka mengadakan dua kategori utama yakni *triviun* (gramatika, retorika, dan logika) dan *quadrivium* (aritmetika, geometri, astronomi, dan musik), yang kemudian dikenal sebagai *"the seven liberal arts"* yang memberikan pendidikan umum. Pada abad ke-19 mulai berkembang mata pelajaran dengan pesatnya. Setiap mata pelajaran harus lebih dahulu berjuang sebelum diakui dan diterima sebagai mata pelajaran di sekolah seperti bahasa ibu, bahasa asing, fisika, biologi, dan sebagainya. Juga timbul berbagai mata pelajaran yang dianggap nonakademis seperti tata buku, pertanian, pendidikan jasmani, dan sebagainya. Kini, terdapat ratusan mata pelajaran di madrasah maupun di universitas. Inilah jenis kurikulum yang umumnya terdapat di kebanyakan negara, juga di Indonesia.

2) Kurikulum Terpadu *(correlated curriculum)*

Para pendidik yang melihat kelemahan-kelemahan *separate-subject curriculum* dan merasa tidak puas dengan kurikulum itu berikhtiar mencari jalan untuk memberikan kepada murid pengalaman-pengalaman yang ada hubungannya. Ada yang menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lain dengan memelihara identitas mata pelajaran, ada pula yang menyatukan mata pelajaran dengan menghilangkan identitas mata pelajaran dalam bidang studi tertentu.

3) Kurikulum Campuran (*integrated curriculum*)

Integrasi berasal dari kata *"integer"* yang berarti unit. Integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan keseluruhan. *Integrated curriculum* meniadakan batas-batas antarberbagai-bagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Yang penting bukan hanya bentuk kurikulum ini, akan tetapi juga tujuannya. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan kita membentuk anak-anak menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan (demokrasi), dan menghargai perbedaan (bersikap plural).[163]

Sementara menurut Abuddin Nata, macam-macam kurikulum setidaknya dapat dibagi ke dalam empat macam, yaitu kurikulum bercorak humanistik dan demokrasi, rekonstruksi sosial, teknologis, dan akademik.[164]

a) Kurikulum yang bercorak demokrasi

Kelompok yang berorientasi pada nilai-nilai kebersamaan dan memberikan pengalaman pada setiap pribadi maupun kelompok secara memuaskan. Pendukung kurikulum ini melihat kurikulum sebagai proses yang memberikan kebutuhan bagi pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang bebas dan bertanggung jawab.

b) Kurikulum yang bercorak rekonstruksi sosial

Pendukung yang berorientasi kepada rekonstruksi sosial melihat kurikulum sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

c) Kurikulum yang bercorak teknologis dan pragmatis

Kurikulum ini berorientasi pragmatis untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijaksanaan.

d) Kurikulum yang bercorak akademik

Kurikulum akademik ini berorientasi melihat kurikulum sebagai upaya peningkatan intelektual dengan cara memperkenalkan para siswa terhadap berbagai macam pelajaran yang terstrukturisasi atau terorganisir dengan baik.

---

[163]S. Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 176-216.

[164]Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam, Jilid. I* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

Pada dasarnya, pendidikan Islam menuntut hadirnya kurikulum yang dibangun di atas landasan konsep Islam tentang demokrasi, kehidupan manusia. Yang terpenting adalah kurikulum Islami harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

(1) Kurikulum harus memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia, serta bertujuan untuk memanusiakan manusia, serta memeliharanya dari penyimpangan.
(2) Kurikulum harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang fundamental, memurnikan ketaatan kepada Allah Swt. Untuk meluruskan dan mengarahkan kehidupan manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan Islam.
(3) Tingkatan setiap kurikulum harus sesuai dengan tingkatan pendidikan, baik dalam tingkatan usia, tingkatan pemahaman jenis kelamin, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dicanangkan dalam kurikulum.
(4) Kurikulum harus memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat realistis, menyangkut penghidupan, bertitik tolak dari keIslaman yang ideal.
(5) Sistem kurikulum harus bebas dari kontradiksi selaras dengan integritas psikologis yang telah Allah ciptakan untuk manusia, serta selaras dengan kesatuan pengalaman yang hendak diberikan kepada anak didik, baik yang berhubungan dengan, kaidah, sistem, maupun realitas alam semesta.[165]

Dari kelima karakteristik kurikulum di atas, telah memberikan gambaran kepada kita, bahwa di dalam menyusun kurikulum hendaknya tidak terlepas dari pada apa yang ingin dicapai untuk membentuk kepribadian seorang anak yang sesuai dengan perkembangan jiwanya selaras dengan isi kurikulum yang telah dilaksanakan oleh seorang guru di sekolah.

[165]Lihat Shihabuddin, *Uihul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibih± f³ al-Baiti wa al-Madrasati wa al-Mujtama*, diterjemahkan oleh Abdurrahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam, di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), hlm. 196-197.

D. Tinjauan Demokrasi tentang Pendidikan Islam

Bertolak dari asumsi bahwa *Life is education*, dalam arti pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan, dan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan, maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan hidup Islam[3], yang diharapkan tercermin dalam sikap hidup dan keterampilan hidup orang Islam.[166]

Apa pandangan dan sikap hidup kita? hal ini bisa dipahami dari makna hidup itu sendiri yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hay±*. makna *al-hay±* (hidup) adalah *al-harakah* (bergerak atau kegiatan). Karena itu, pandangan hidup yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup seseorang seharusnya tercermin nilai-nilai kebersamaan.

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi seiring dengan tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan-perubahan zaman yang sangat cepat. Muctar Buchari mengidentifikasi tiga kemampuan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan, yakni (1) kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan, (2) kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi, dan (3) kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Adapun kegagalan untuk mengembangkan ketiga kemampuan tersebut akan mengakibatkan sistem pendidikan terperangkap ke dalam rutinitas.[167] Dua pendapat di atas, setidaknya bisa dijadikan acuan dalam upaya menyiapkan komponen-komponen yang akan menjadi bekal bagi peserta didik atau *output* madrasah ketika mereka kembali ke pangkuan masyarakatnya.

Patut diakui bahwa hal tersebut tidaklah mudah, terlebih lagi bila melihat realitas bahwa *input* pendidikan Islam kebanyakan adalah, boleh dikata bukan kualitas prima. Di samping itu, dihadapkan pula pada tantangan umum dunia pendidikan sebagaimana diungkapkan

---

[166]Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 39.

[167]Lihat Muchtar Buchori, *Pendidikan dan Pembangunan* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 45.

oleh Battle. Ia melihat kenyataan ironis yang terjadi secara umum, dan terlebih lagi untuk negara berkembang, adalah *problem* yang dihadapi oleh dunia pendidikan, bahwa perkembangan zaman selalu lebih cepat dari perkembangan pendidikan.[168]

Seperempat terakhir abad ke-20 telah muncul fenomena yang menggembirakan. Dengan semakin menguatnya orientasi Islam ke kehidupan perkotaan, maka dapat dimaklumi bahwa gerakan pembaharuan pemikiran Islam dan gerakan "Islam modern" yang pro demokrasi menjadi lebih solid, sehingga pada akhir abad ke-20 terasa bahwa bobot Islam modern sudah dominan dari pada Islam tradisional. Hal ini nampak jelas dengan munculnya ulama-ulama hasil pendidikan Islam kota yang kini memiliki pengaruh luas dalam skala nasional. Ditambah lagi semakin tersedianya peluang bagi pendidikan Islam yakni; dengan semakin meningkat dan semakin meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peningkatan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya sarana pendidikan agama pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan, termasuk prasekolah yang pelaksanaannya sesuai dengan UU yang berlaku.[169] Terciptanya kesadaran dan semakin meningkatnya kekuatan, serta peluang tersebut, kiranya merupakan modal yang sangat besar bagi upaya peningkatan citra dan pembenahan pendidikan pada saat-saat ini. Untuk itulah Departemen Agama melalui Lembaga Pendidikan Islam, memiliki dua program prioritas, yaitu; kualitas pendidikan dan kualitas terpadu. Artinya kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang memadai, serta pemantapan kesejahteraan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Peningkatan ini antara lain melalui *Basic Education Project* (BEP) dan *Development of Madrasah Aliyahs Project* (DMAP), program penyetaraan pendidikan guru dan sebagainya (sebagian besar didanai dari pinjaman

[168]Lihat Battle, J.A., *The New Ideal of Education*, (New York: Harper & Row Publisher, 1986), hlm. 45.

[169]Lihat Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Cet. I; Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 134.

ADB).[170] Proyek-proyek dan kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi lokomotif dalam upaya menggerakkan peran serta aktif masyarakat. Juga lembaga pendidikan dalam rangka memajukan pendidikan Islam yang lebih demokratis menumbuhkan kemandirian.

Isu tentang manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) sebenarnya merupakan tema sentral dalam reformasi pendidikan di berbagai negara. Manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai "suatu pengalihan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dari birokrasi sentral kepada pengelola terdepan, yaitu pendidikan dan komunitasnya.[171]

Sementara, rumusan Bappenas menyatakan bahwa SBM adalah upaya konkret otonomi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui; antara lain keleluasaan mengelolah sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara, peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui kontrol dan partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan propesionalisme guru dan kepalah sekolah, berlakunya sistem insentif, dan lain-lain.[172]

Manfaat utama SBM (dalam konteks madrasah; MBM) adalah tergabungnya perang serta aktif masyarakat (*stakeholder*), meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan kepalah sekolah dan guru, tumbuhnya kreativitas, inisiatif, serta inovasi dari kepalah sekolah, guru, bahkan juga tenaga administrasi sekolah. Lembaga Pendidikan Islam harus mampu merespons pasar, serta tuntutan *stakeholder*, tentunya ditumpukan di atas kemampuan lembaga pendidikan "berimprovisasi"

Tidaklah penting apakah guru menyadari bahwa pendidikan itu membelenggu atau tidak, karena intinya terletak pada manipulasi kedudukan guru dan siswa, di mana siswa dibuat menjadi objek pasif dari tindakan guru. Sebagai pihak yang pasif, siswa tidak dituntut untuk berpartsipasi aktif dalam proses belajar, karena siswa hanya diisi dengan kata-kata oleh guru. Dalam kerangka budaya pendidikan ini, guru mengajarkan kepada siswa seolah-olah dirinya terpisah dari

[170]Lihat Ismail Sm dkk., *Op.Cit.,* hlm. 266.
[171]Lihat *ibid*.
[172]Lihat *ibid*.

kehidupan nyata, seolah-olah bahasa pemikiran itu bisa muncul tanpa kenyataan yang ada. Dalam praktik pendidikan seperti ini, struktur sosial tidak pernah didiskusikan karena tidak dianggap sebagai masalah yang perlu dipecahkan. Sebaliknya, struktur sosial tersebut justru dibuat menjadi tidak jelas dengan berbagai cara yang mengakibatkan siswa yang memiliki kesadaran yang salah.[173]

Dalam mengkritisi pendidikan ini baik di tingkat dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi, perlu kejelasan apakah guru yang berasal dari kalangan borjuis dapat menghindar dari cara memperlakukan siswa sebagai objek. Pendidikan yang berbasis demokrasi merupakan proses di mana pendidik mengkondisikan siswa untuk mengenal dan mengungkap kehidupan yang senyatanya secara kritis. Pendidikan yang membelenggu berusaha untuk menanamkan kesadaran yang keliru kepada siswa sehingga mereka mengikuti saja alur kehidupan ini; sedangkan pendidikan yang berbasis demokrasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar usaha guru untuk memaksakan kebebasan pada siswa.[174]

Secara umum, ada tiga pola keterkaitan yang berlangsung antara posisi dasar dalam etika sosial, serta teori pendidikan:

1. keterkaitan logis, yang terjadi di mana ada hubungan yang relatif jelas dan perlu, yang tersimpul di antara posisi-posisi moral dan politis; atau keterkaitan yang jelas antara posisi-posisi itu yang secara umum dipandang dalam perpaduan, sebagai etika sosial dengan ideologi pendidikan. Ada umpamanya, sebuah hubungan logis yang cukup jelas antara rasionalisme filosofis atau teologis di ranah moral dengan sebuah komitmen politis dalam salah satu bentuk meritokrasi, seperti juga ada hubungan yang cukup terbuka antara meritokrasi politis dengan pemakaian sekolah-sekolah untuk mengembangkan sebuah elite intelektual atau elite moral.
2. keterkaitan psikologis yang terjadi di mana, seperti telah diungkapkan tadi, mungkin tidak ada kepastian hubungan logis antara sebuah filosofi sosial tertentu dengan pendirian tertentu dibidang pendidikan; namun ada hubungan timbal balik yang

[173]Lihat Paulo Frier, *Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan.*, hlm. 175.

[174]*Ibid.*, hlm. 17.

cukup jelas terlihat antara keduanya, yang muncul dengan lebih dihubungkan dengan dinamika kejiwaan (psikodinamik)[175] yang mengatur pilihan atas keduanya (atau mungkin ditentukan oleh sesuatu yang lain sama sekali, namun tetap bersifat penentu dari luar), ketimbang adanya hubungan alamiah.

3. Keterkaitan sosial adalah asosiasi yang nampak jelas yang ada di antara posisi moral dan filosofis di dalam budaya tertentu di suatu saat tertentu dalam sejarah. Posisi-posisi konservatif tertentu (seperti fundamentalisme sekular dan jenis-jenis konservatisme sekular), khususnya merumuskan diri sendiri dalam peristilahan tradisi-tradisi budaya atau pola-pola keyakinan dan perilaku yang lestari. Keduanya terkenal sulit dirumuskan dengan ketepatan dan ketegasan, dan keduanya jelas sekali sangat dikondisikan oleh wajah budaya tertentu di suatu saat tertentu. Sudut pandang semacam itu, hanya bisa didiskusikan secara cerdas di dalam kerangka kerja batasan-batasan budaya dan sejarah yang dirumuskan lebih dulu dengan tegas.[176]

Adapun faktor pendukung terciptanya pendidikan yang berbasis demokrasi, yaitu; *Pertama*, format politik. Pelaksanaan pendidikan nasional termasuk di dalamnya pendidikan agama (Islam) erat kaitannya dengan pola atau sistem secara format politik yang dianut oleh suatu bangsa. Pengertian format pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang instrumental[177] bagi proses pendidikan di suatu negara dan karenanya memerlukan perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus.

---

[175]Psikodinamik sering mencontohkan *strip story* dalam pengembangan pengajaran. Teknik *strip story* dengan memakai media kepingan kertas, mula-mula dicetuskan oleh Prof. R.E. Gibson dalam majalah TESOL Quarterly (vol. 9, no. 2) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Mary Ann dan John Boyd (1978) dalam TESOL Newsletter dan dijelaskan dengan pengelaman langsung di lapangan oleh Carol Lamelin (1978) di majalah yang sama. Teknik lewat media ini bertitik tolak dari suatu *approach* yang mengutamakan aktivitas komunikasi yang sesungghunya agar kelak siswa dapat dengan mudah dan tidak sungkan untuk mempraktikkan (berkomunikasi). Lihat Azhar Arsyad, *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya; beberapa pokok pikiran* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 36.

[176]Lihat William F. O'neil, *Op.Cit.,* hlm. 125.

[177]Lihat AM. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), hlm. 41.

Maka format politik yang lebih demokratis dan aspiratif, kiranya lebih menjanjikan akan tercapainya demokrasi pendidikan di negara yang bersangkutan. Di mana keinginan akan adanya perubahan dan pembaharuan dalam pemikiran dan kependidikan (Islam), dinilai sesuatu yang bersifat alami, sesuai dengan tingkat perkembangan kesadaran dan kedewasaan intelektual masyarakat pendidikan, serta tuntutan dan kebutuhan zaman, selama tetap berada dalam bingkai nilai-nilai fundamental. Karenanya, kritik dan perbedaan pandangan dalam perspektif pendidikan Islam tidak perlu disikapi dengan sikap kecurigaan, serta sikap tertutup yang protektif oleh masyarakat pendidikan (tenaga pendidik, peserta didik, dan civitas akademika lainnya).

Kedua, persamaan dan kebersamaan. Memperlakukan masyarakat pendidikan pada posisi yang sama merupakan syarat mutlak terciptanya demokrasi pendidikan Islam. Karena untuk memberikan makna kualitatif terhadap pelaksanaan demokrasi pendidikan Islam harus mengedepankan nilai persamaan dan kebersamaan seperti telah dikemukakan di muka dalam bentuk metafora cerita Nabi Ya'qub bersama putra-putranya[178], dan menolak perilaku anarkisme, nepotisme, fanatisme, absolutisme dan isme-isme yang lain yang menunjuk kepada perilaku diskriminasi intelektual. Konsep persamaan dan kebersamaan ini di dalam perspektif demokrasi pendidikan Islam membersihkan nilai positif di mana memandang individu pada cita Islam yang sama, yaitu mereka sama-sama berjuang untuk mencari kebenaran dari rida Allah. Tanpa persamaan dan kebersamaan cita ini, rasanya sulit demokrasi pendidikan Islam dibangun dan diwujudkan.

Ketiga, kedewasaan intelektual dan emosional.[179] Kedewasaan intelektual seseorang akan mendorongnya untuk tidak sempit pandangan dalam menyikapi rana perseteruan pemikiran yang berkembang. Sementara, kedewasaan atau kematangan aspek emosional seseorang akan membentuk jiwa pribadi yang utuh dan tidak mudah dikotori oleh serpihan-serpihan nepotisme, fanatisme, anarkisme, absolutisme dan sebagainya.

---

[178] Q.S. Yusuf: 67.

[179]Lihat Nurcholis Majid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1993), hlm. 182.

Kedewasaan intelektual dan emosional ini akan diperoleh dengan banyak membaca, berdiskusi dan berdialog, serta berinteraksi dengan berbagai macam pembacaan dan diskusi pemikiran yang bersifat demokratis dan responsif terhadap fenomena yang terjadi. Dengan demikian, terbentuknya kemudian sikap terbuka, terhadap orang lain, baik sangka (*husnudh§an*), dan sebagainya yang merupakan elemen-elemen penting dalam terciptanya demokrasi pendidikan Islam.

Dalam konteks kebangsaan, berbicara tentang pendidikan demokrasi dan keadilan berarti kita berbicara tentang dasar filosofis-konstitusional negara kita, khususnya sila keempat dan sila kelima Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terminologi demokrasi tidak tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya sebagai hasil rumusan pada 18 Agustus 1945, istilah kerakyatan dalam sila keempat di atas mengacu pada sistem pendidikan demokrasi.[180]

Bung Hatta dalam tulisannya tentang demokrasi yang kini telah menjadi klasik mengatakan bahwa di kalangan kaum pergerakan nasional, jauh sebelum kita merdeka telah melihat ada tiga sumber cita-cita demokrasi di Indonesia; Pertama, paham sosialis Barat karena dasar dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan sekaligus menjadi tujuannya. Kedua ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara umat manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, pengetahuan tentang masyarakat Indonesia yang ditegakkan atas prinsip kolektifisme.[181] Sumber ketiga ini menurut penulis mengandung unsur-unsur sebagai ciri demokrasi yaitu; musyawarah, mufakat, gotong royong, dan hak mengajukan protes bersama.

Dengan melihat negara seperti yang tergambar sebelumnya dengan akar sejarah yang cukup kuat, akan semakin jelaslah bagi kita bahwa cita-cita demokrasi sebenarnya sudah menyatu dalam dunia pendidikan. Dan kerinduan bagi tegaknya demokrasi sebenarnya bersifat universal dan merupakan tuntutan abadi umat manusia di manapun di muka bumi ini.

---

[180] Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas dalam Kegalauan* (Cet. I; Jakarta: PSAP, 2004), hlm. 165.

[181] Lihat *ibid*., hlm. 165.

Di dalam dunia Islam saat ini tidak satu teori politik pun bekerja dengan baik. Perubahan-perubahan drastis telah terjadi dalam institusi-institusi politik, dari khilafa ke monarki, pemerintahan militer diktator, hingga pemerintahan terpilih secara demokratis. Tentu saja kita dapat mengatakan secara meyakinkan, pemerintahan yang terpilih secara demokratis lebih dekat dengan spirit Islam.[182]

Namun demikian, tidak ada keseragaman dalam skenario kontemporer di dunia Islam. Semua bentuk pemerintahan yang pernah ada dalam sejarah dapat kita jumpai di dunia Islam saat ini, dari monarki, kediktatoran militer hingga demokrasi terkontrol. Suatu hal terlihat jelas, tidak satu negara Muslim pun memiliki demokrasi bebas. Di negara-negara tersebut sebagian ulama tradisionalis menolak keras sistem yang mengarah kepada legislasi modern, termasuk dalam sistem pendidikan. Mereka merepresentasikan ortodoksi dan dokmatisme.

Dalam negara-negara Islam bertengger pada aturan etos konservatif. Sekularisme dan demokrasi dianggap sebagai anti-Islam dalam atmosfer tersebut. Rezim-rezim militer di Pakistan merupakan contoh kasus bagaimana konservatisme keagamaan sengaja diciptakan untuk menopang pemerintahan yang kehilangan legitimasi sipil. Karena itu, pendidikan demokrasi di negara-negara Muslim menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Hanya dengan pendidikan demokrasi, masyarakat di negara-negara tersebut akan menikmati kebebasan demokrasi, dan melalui demokrasi pula negara-negara tersebut akan bersih dari rezim-rezim pro-Barat. Hanya dengan demokrasi masyarakat Muslim akan dapat menggapai konsep kewargaan dan penghormatan HAM dalam sebuah negara Muslim modern.

Pernyatan di atas telah dikuatkan oleh temuan-temuan fakta (*fact finding*) yang dilakukan oleh lembaga *Freedom House* yang bermarkas di Amerika Serikat. Tak diragukan lagi, *Freedom House* merupakan lembaga pengamat kinerja HAM di seluruh dunia yang sejauh ini paling disegani. Lembaga ini, didirikan pada 1941, sudah menerbitkan laporan tahunan mengenai situasi "kebebasan" di seluruh dunia sejak 1951. laporannya disusun berdasarkan masukan-masukan dari para ahli kawasan, wartawan, konsultasi internasional, berbagai organisasi

[182] Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Gugus Press, 2002), hlm. 30.

nonpemerintah (NGO), dan pakar-pakar HAM. Landasan klasifikasi *Freedom House* adalah studi komparatif dan empiris dengan mengunakan seperangkat kriteria sebagai rujukan. Laporan itu, yang makin terkenal sejak perubahan-perubahan mendasar terjadi di dunia pada 1989, menunjukkan bahwa kebebasan bisa diukur dan dioprasionalisasikan.

Seperti disebutkan oleh Raymond D. ganti dalam *Freedom and the World: Political Rights & Civil Liberties* 1987-1988, kebebasan didefinisikan sebagai "adanya peluang untuk bertindak secara spontan di berbagai bidang di luar kontrol pemerintah dan pusat-pusat dominasi potensial lainya." Kemudian, konsep kebebasan ini dipecah ke dalam tujuh hak politik. Atas dasar itu, kinerja HAM setiap negara di dunia mendapat nilai: mulai dari satu yang paling bebas sampai tujuh yang paling tidak bebas. Dan berdasarkan data indeks kebebasan *Freedom House* yang dikeluarkan Desember 2001, dapat ditemukan adanya jurang pemisah yang cukup dramatis antara negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan negara-negara nonmuslim.[183]

Tetapi, dari kasus-kasus itu ada satu hal yang bisa dipelajari dan patut menjadi renungan kita bersama. apabila proses demokratisasi berlangsung secara mulus dan terjadi di negara-negara yang memiliki heterogenitas cukup besar, baik dilihat dari sisi etnik, suku, ras, maupun agama, tidak jarang justru melahirkan disintegrasi. Eropa Timur merupakan contoh tepat untuk ini. beberapa negara di kawasan tersebut justru mengalami disintegrasi setelah ada demokratisasi.[184]

Hal ini terjadi karena perubahan bentuk otoritas lama kepada yang baru belum tergabung secara baik. Di negara-negara otoriter atau totaliter bentuk otoritas-nya serupa, yaitu selalu datang dari atas. Sementara itu, penegakannya dilakukan melalui represifikasi dan penggunaan ideologi yang bersifat doktriner. Demokrasi berarti mengubah bentuk otoritas seperti itu. Datangnya otoritas tidak lagi bersifat *top down,* melainkan berasal dari bawah. Ini karena demokrasi secara konsepsional selalu mengedepankan pemberian otoritas yang bersifat *bottom up,* hanya saja karena perangkat kelembagaan kultur

[183] Lihat *ibid.,* hlm. 10.

[184] Ali Maschan Moesa, *NU Agama dan Demokrasi; Komitmen Muslim Tradisionalis terhadap Nilai-nilai Kebangsaaan* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Da'I Muda, 2002), hlm. 245.

demokrasinya belum mapan, tidak jarang proses menuju demokratisasi justru melahirkan guncangan-guncangan. ketika bentuk otoritas yang bersifat *top dawn* dihancurkan misalnya, tidak bisa secara tiba-tiba digantikan oleh bentuk otoritas yang bersifat *bottom up* dan betul-betul disepakati bersama oleh seluruh komponen negara-bangsa. Konsekuensinya, pemimpin negara baru tidak memiliki otoritas kuat untuk mengatur warganya.[185]

Dalam situasi seperti itu, penggunaan otoritas tidak bisa lagi efektif mengingat tingkat warga negara tidak cukup memadai bagi tegaknya otoritas. Bahkan, tidak jarang terjadi pembangkangan warga negara. Yang terjadi kemudian sejumlah wilayah atau kelompok yang merasa tidak perlu taat kepada pemerintah pusat, memisahkan diri dan membentuk negara sendiri-sendiri.

Kalau masyarakat yang menganggap pemimpin negara tidak *legitimate* itu bersifat pasif barangkali tidak ada masalah. Yang terjadi adalah, sebagian kelompok yang tidak puas melakukan aksi pembangkangan kolektif. Dan yang lebih para lagi, adanya konflik politik di tingkat elite, berimbas juga terhadap munculnya aksi seperti itu, baik secara langsung maupun hanya berfungsi sebagai kipas yang membuat suasana jadi semakin panas. Aksi pembangkangan kolektif itu memang bervariasi. paling kecil adalah adanya berbagai aksi penodongan maupun kekerasan kecil di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. aksi yang cukup besar adalah dalam bentuk penjarahan dan pembakaran gedung-gedung atribut kenegaraan lainnya. Di samping itu juga, ada aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para mahasiswa. Dan paling besar adalah perlawanan terhadap negara secara langsung seperti terjadi di Aceh baru-baru ini. Pembangkangan kolektif yang menginginkan berdirinya negara sendiri tidak dilakukan oleh wilayah, melainkan lewat kelompok yang sejak sebelum terjadinya reformasi memang sudah melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Sehingga, betapapun yang terjadi di Aceh, Ambon dan Irian Jaya cukup serius, tetapi karena tidak dilakukan oleh wilayah masing-masing secara keseluruhan untuk membangkang terhadap pemerintah pusat, aksinya tidak *sekonyong-konyong* melahirkan disintegrasi wilayah.[186]

---

[185]Lihat *ibid*., hlm. 247.
[186] Lihat *ibid*., hlm. 248.

Meskipun demikian, aksi semacam itu juga patut menjadi perhatian serius karena dalam banyak kasus sudah melibatkan isu SARA, misalnya saja aksi di Ketapang, Kupang, Ambong, dan beberapa daerah lainnya, sudah melibatkan konflik antara agama dan ras.

Kalau berbagai aksi pembangkangan kolektif itu tidak memperoleh perhatian pada dunia pendidikan, termasuk bagaimana menepis problema itu, bukannya tidak mungkin disintegrasi politik di negeri ini akan semakin parah. bahkan adanya disintegrasi wilayah, dalam bentuk lahirnya negara baru dari Indonesia bisa dimungkinkan. Maka menurut hemat penulis, pemerintah dan kaum intelektual cukup urgen untuk menepis problematika tersebut, dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat sebagai peserta didik.

Kenyataan ini dengan mudah para pengamat melompat pada kesimpulan bahwa pendidikan Islam merupakan faktor yang paling bertanggung jawab atas tidak bekerjanya demokrasi di dunia Muslim. lihatlah penjelasan elia Kedourie, "gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mind-set I*slam." menurut Kedourie, demokrasi telah dicoba di dunia Islam pada paruh pertama abad kedua puluh, dan ternyata gagal, tampaknya demokrasi tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena warisan kultural komunitas Muslim yang sudah terbiasa dengan "otokrasi dan kepatuhan pasif".[187]

Sebenarnya menurut penulis, secara doktrinal, tidak ada teks-teks keagamaan yang bisa ditafsirkan sebagai justifikasi sikap sewenang-wenangan dan otoritarian. Semua Indikator dari apa yang disebut demokratik dalam masyarakat poliarkis, bukan saja Islami, melainkan agama Islamlah yang memperkenalkannya secara preskriptif keagamaan. Al-Qur'an menjadikan musyawarah yang melibatkan publik secara kolektif yang dikenal di dalam Al-Qur'an dengan istilah *syra* sebagai kewajiban keagamaan.

Namun demikian, pengalaman demokrasi dalam sejarah Islam memang sangat terbatas. dalam eksprimentasinya yang sederhana, barangkali, demokrasi hanya terwujud pada masa Nabi dan empat khalifah pertama (Khulafa Rasyidun). Proses suksesnya kekuasaan dari Nabi ke Abu Bakar dan kemudian tiga khalifa berikutnya terjadi secara relatif demokratis. Nabi sendiri menolak untuk menunjuk

[187] Lihat *ibid*., hlm. 11.

seseorang sebagai penggantinya, karena bisa berakibat infalibilitas (penguasa yang mengaku tidak bisa berbuat salah) dan pada akhirnya akan menghilangkan prinsip akuntabilitas publik.

Sekarang adalah saat yang tepat merevitalisasi semangat dinamis agama yang pernah melahirkan peradaban besar, membawa perubahan revolusioner pada periode-periode awal. Demokrasi dalam dunia pendidikan dapat menjadi harapan untuk pemulihan perang konstrukti agama di dunia Islam. Feodalisme dan kolonialisme telah merampas Islam dari dinamikanya. Dulu Islam pernah menjadi *liberalting religion*, agama yang membebaskan umat manusia dari berbagai kekuatan yang membelenggu. Karena itu, kaum Muslim tak punya pilihan lain, kecuali mengapresiasi dan mengembalikan peran liberalatif pendidikan Islam.[188]

Pendidikan merupakan akan kunci pembuka ke arah kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang maju dan kuat akan mempercepat terjadinya perubahan sosial. Namun jika pendidikannya yang mundur, maka bisa dipastikan akan kontra produktif terhadap jalannya proses perubahan sosial, dan justru akan menimbulkan ketidakharmonisan tatanan sosial.

Demokrasi dalam tinjauan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan umat manusia termasuk penganut Islam dalam mewujudkan keserasian, kedamaian, dan masa depan yang gemilang dan terjamin. Hanya saja, pelaksanaan terhadap demokrasi pendidikan Islam baru dapat terwujud bila dilakukan oleh semua pihak.

Demokrasi pendidikan Islam sebagai upaya membangun cipta, rasa, dan karsa manusia, yang berlandaskan Islam senantiasa peka terhadap perubahan yang berlangsung. Di era reformasi yang sedang bergulir dewasa ini perlu diresponsi dalam berbagai cara, paling tidak setiap pribadi Muslim dapat mengambil manfaat dari kritik yang muncul untuk memperluas wawasan, bersikap demokratis, toleran, terbuka terhadap kebenaran, dan tidak eksklusif. Berlangsungnya era reformasi yang dimotori oleh kritik-kritik yang muncul, bangsa Indonesia maju selangkah lagi dalam membenahi bangsa ini menuju perbaikan.

Tekad membangun dan mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis sebagai konsekuensi dari reformasi yang dipelopori generasi muda haruslah menjadi milik bersama dan menasional. Karena hal itu

[188]Mun'im A. Sirry, Op.Cit., hlm. 31-32.

bukan saja merupakan solusi dan alternatif mengantisipasi keterpurukan bangsa sejak tiga dekade terakhir, tetapi juga karena pendidikan di Indonesia yang diharapkan adalah sebuah masyarakat yang demokratis. Istilah demokrasi pendidikan telah diperkenalkan oleh pakar-pakar pendidikan, tetapi bagaimana konsep pendidikan yang demokratis itu tampaknya belum konkret dan karenanya menjadi masalah.[189] Berbagai visi dikembangkan, dan itu merupakan hak masing-masing pakar.

Pendidikan yang berbasis demokrasi dengan tolok ukur pendidikan yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw., adalah pendidikan dalam negara Madinah yang secara totalistik dibangun di atas dasar ideologi (*ideological basic*), mencerdaskan, dan menyatukan Semenanjung Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah di bawah bendera Islam, merupakan babak baru dalam sejarah politik jazirah Arab. Dikatakan bahwa Islam membawa perubahan transformasional dalam kehidupan individual dan sosial masyarakat, karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan.[190]

Kalau kita membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an dan hadis banyak ajaran-ajaran Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan secara umum. secara deduktif misalnya, dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat ditarik berbagai benang merah yang menempatkan manusia pada posisi penting (sentral) dan relevan dengan pendidikan: manusia makhluk berakal, makhluk yang dapat belajar dan dididik, serta dapat membaca, makhluk bicara dan mampu mengkomunikasikan ide-idenya, dan makhluk yang dapat berhitung.[191]

Dalam perspektif pendidikan Islam, konsepsi demokrasi pendidikan yang dimaksud, adalah kebebasan akademik. Yaitu seorang dosen untuk mengajar, serta hak seorang mahasiswa untuk belajar tanpa adanya pembatasan dan pencampuran dengan hal-hal tidak *akliyah* (rasional). Penulis telah melihat kata akademik sendiri telah mempunyai pengertian keadaan di mana orang-orang bisa menyampaikan dan menerima

---

[189]Lihat Abd. Muin Salim, "Membangun Indonesia Baru di Era Reformasi dalam Perspektif Islam". *Makalah*. Makassar: IAIN Alauddin, 1999, hlm. 1.

[190]Lihat Hj. Andi Rasdiyanah, "Membangun Indonesia Baru di Era Reformasi dalam Perspektif Islam". *Makalah*. Makassar: IAIN Alauddin, 1999, hlm. 2.

[191] M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia, dalam Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Cet. II; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 29.

gagasan, pemikiran dan ilmu pengetahuan sekaligus menguji secara jujur, terbuka dan leluasa (pengujian yang bersifat demokratis).[192]

Kebebasan masing-masing civitas akademika merupakan cermin landasan moral demokrasi pendidikan di lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan tinggi, tidak perlu heran, apalagi khawatir, dalam proses dinamis interaksi-edukatif dan tradisi ilmiah siswa dan guru, mahasiswa dan dosen terjadi intersubjektivitas (perbedaan pendapat). Perbedaan yang dimaksud penulis adalah dalam arti luas dan merupakan sifat intern dalam manusia, yaitu sebagai benturan, *conflictus*, antara dua gagasan yang saling mengasah, sehingga terlahir gagasan baru yang tarafnya lebih tinggi. Maka menurut anggapan penulis adalah jalan atau sarana untuk melangka maju. Jadi, perbedaan yang dimaksud bukanlah yang melahirkan permusuhan, tetapi melainkan secara dialektis dalam hubungan interaksi edukatif siswa dan guru atau mahasiswa dan dosen menuju kesempurnaan akademis.

[192]A. Malik Fadjar dan Muhadjir Efendy, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan* (Cet. I; Jakarta: P3UMM, 1991), hlm. 31.

BAB 4

DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA ERA DEMOKRASI

A. Pendidikan Islam di Era Demokrasi

Perkembangan Pendidikan Islam pada era demokrasi merupakan suatu kajian yang secara spesifik menelaah tentang pendidikan Islam secara historikal. Kata sejarah dalam bahasa arab disebut *tarikh*, dari segi bahasa berarti ketentuan masa. Sementara menurut istilah, berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Kata *tarikh* juga dipakai dalam pengertian perhitungan tahun, seperti keterangan mengenai tahun sebelum atau sesudah Masehi dipakai sebutan sebelum atau sesudah tarikh Masehi. Kemudian, yang dimaksud dengan ilmu *tarikh*, adalah suatui pengetahuan yang gunanya untuk mengetahui keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang telah lampau maupun yang sedang terjadi di kalangan umat".[193] Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut *history* berarti pengalaman masa lampau dari umat manusia. Pemaknaan selanjutnya bahwa sejarah adalah catatan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa silam yang diabadikan dalam laporan tertulis dan dalam ruang lingkup yang luas. Sebagai ilmu yang mengungkap peristiwa masa silam buka hanya terfokus pada satu sisi saja, akan tetapi apa saja yang muncul ke permukaan, baik yang berhubungan dengan peristiwa sosial, politik, ekonomi, maupun agama dan budaya dari suatu bangsa, negara dan dunia.

[193]Munawar Khalil, Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, Saw., (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 15.

Pokok persoalan sejaran senantiasa akan syarat dengan pengalaman-pengalaman penting yang menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. Dalam sudut pandang yang lain, sejarah bukanlah peritiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa itu, dan pengertian mengenai hubungan-hubungan nyata dan tidak nyata, yang menyalin seluruh bagian-bagian, serta memberinya dinamisme dalam waktu dan tempat[194]

Bila dicermati makna sejarah, maka hal-hal yang terkait adalah peristiwa penting yang menjadi khazanah pembelajaran, alat atau informasi yang dapat mengawal perubahan masyarakat dan juga sebagai peletak dari dinamika yang berkembang dalam masa yang berbeda.

Terdapat tiga istilah pendidikan Islam, yang lazim digunakan, yaitu *ta'dib, ta'lim* dan *tarbiyah*. *Ta'dib* bermakna pendidikan khusus yang di dalamnya mencakup kognisi, afeksi dan psikomotorik. Meskipun *ta'dib* lebih menekankan pada aspek afektif, yaitu aspek akhlak dan kesopanan. Kata *ta'lim* berarti mengajar. Di kala Nabi Muhammad mengajar (*ta'lim*), maka "nabi mengajar membaca disertai dengan perenungan tentang pengertian, pemahaman, tanggung jawab dan penanaman amanah".[195] Sementara, *tarbiyah* lebih bermakna mendidik, artinya "mempersiapkan peserta didik dengan segala macam cara, supaya dapat mempergunakan tenaga dan bakatnya dengan baik sehingga mencapai kehidupan yang sempurna di masyarakat. *Tarbiyah* dapat mencakup pendidikan jasmani, pendidikan *aql*, akhlak, perasaan, keindahan dan kemasyarakatan".[196] Dalam kegiatan *tarbiyah,* guru membahas, menyelidiki, mengupas, serta memikirkan soal-soal yang sulit dan mencari jalan untuk mengatasi kesulitan dengan tenaga pikiran sendiri. Menurut Abuddin Nata, dalam bahasa arab kata pendidikan biasanya diwakili oleh kata tarbiyah, *ta'dib*, *ta'lim*, *tadris*, dan *tadzkirah* yang secara keseluruhan menghimpun kegiiatan yang terdapat dalam pendidikan, yaitu membina, memelihara, mengajarkan, mensucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-hal yang baik".[197]

---

[194] Sayid Kutuib, *Konsepsi Sejarah dalam Islam*, Jakarta: Yayasan al Amin, tt), hlm. 18.

[195] Abd. Halim Soebahar, *Wawasan Baru Pendidikan Islam,* (cet. I, Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 6.

[196] *Ibid*., hlm. 7.

[197] Abuddin Nata, Menejemen *Pendidikan, Mengatasi Kelememahan Pendidikan Islam Indonesia,* (Ed. I, Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 9.

Dalam konteks di atas, maka pendidikan Islam mencakup makna yang sangat luas, yang buka hanya pengajaran yang berhubungan dengan Al-Qur'an, Hadis, Fikih, dan sejarah Islam, seperti yang berlangsung selama ini, terutama pendidikan Islam Indonesia. Karena itu akan beragam penilaian dan pemahaman terhadap pendidikan Islam itu, mungkin ada masyarakat yang menilainya positif dan ada pula yang menilainya negatif. Keragaman pemahaman masyarakat tersebut, mengharuskan pendidikan Islam untuk dilakukan rekonstruksi sehingga dapat kembali kepada makna yang sesungguhnya dan menjadi pionis perubahan peradaban masyartakat.

Pendidikan Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan, menempati porsi penting dalam perjalanan umat manusia, banyak ilmuan Muslim yang ikut menentukan corak kehidupan dunia dengan keahlian yang tidak diragukan, misalnya "Hasan ibn Nafi (ahli dalam bidang seni dan sastra), Zakaria Ar-Razi (ahli dalam bidang kedokteran kliniks), al Farabi (seorang falsafah, logika, matematika, dan pengobatan), al-Biruni (bapak Antropologi), Umar Khayam (ahli dalam bidang astronomi). Dan masih banyak ilmuan Islam yang memiliki kapasitas keilmuan sebanding dengan yang telah kami sebutkan. Tokoh-tokoh di atas tersebut, sejak abad ke VII, di kala Bagdad terpecah menjadi banyak dinasti.

Lazimnya sejarah ditulis berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kehidupan yang bermakna peradaban suatu bangsa. Sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungnan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik formal, informal maupun nonformal. Hal tersebut sejalan dengan peranan agama Islam sebagai agama dakwah, yaitu menyeruh kepada kebaikan, dan mencegak kemungkaran, menuju kehidupan sejahtera lahir maupun batin, material maupun spritual.

Mengenai metode sejarah pendidikan Islam, walaupun terdapat hal-hal yang sifatnya khusus, tetapi berlaku kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan sejarah. Sejarawan harus menguasai alat-alat analisis untuk menilai kebenaran materi sumbernya dan perpaduan untuk mengumpulkan dan menafsirkan materi-materi sejarah ke dalam kisah yang penuh makna. Sebagai seorang ahli, sejarawan harus mempunyai suatu kerangka berpikir kritis, baik dalam mengkaji materi maupun dalam menggunakan sumber-sumbernya. "pengetahuan yang diperlukan

untuk menulis sejarah cukup banyak, tetapi yang perlu diketahui lebih dahulu adalah ilmu bumi dan ilmu negara".[198]

Sampai pertengahan abad XIX, sejarawan umumnya mengambil tema-tema luas, menampilkan seluruh sejarah nasional dalam berbagai fakta-fakta besar. Sejak waktu itu, penulisan sejarah diarahkan kepada lebih banyak topik-topik khusus, dengan berbagai cara penetapan sesuati dengan kecenderungan penulisnya, atau kepada masalah-masalah nasionalnya atau kepada sumber materi yang belum digali. Hubungannya dengan sejarah pendidikan Islam, topik kajian sejarahnya menekankan pada tokoh dan institusi yang mempunyai relevansi dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dari hal tersebut, nampak bahwa metode deskriptif dan analisis merupakan kunci dalam penyusunan sejarah pada umumnya.

Objek sejarah pendidikan Islam sangat syarat dengan nilai-nilai agama, filosofi, psikologi dan sosiologi, maka perlu menempatkan objek sasarannya secara utuh menyeluruh dan mendasar. Sesuai dengan sifat dan sikap itu, maka metode yang harus ditempuh pertama-tama; deskriptif, kemudian komparasi dan analisa sintesis tanpa menyingkirkan nilai-nilai agama. Dengan cara deskripsi dimaksudkan bahwa ajaran Islam sebagai agama yang di bawah oleh Nabi Muhammad Saw.

Kemudian dengan komparasi dimaksudkan bahwa ajaran Islam dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam kurung, serta di tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu, sehingga diketahui pula adanya kaitan antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional.

Ketiga, yaitu dengan pendekatan analisa sintesis. Pendekatan analisis artinya secara kritis membahas, meneliti istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang diberikan oleh Islam, sehingga diketahui adanya kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Dan sintesis dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil guna memperoleh suatu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan, serta manfaat penulisan sejarah pendidikan Islam.

---

[198]Munawar Cholil, Kelengkapan *Tarikh* Nabi Muhammad Saw., Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 15.

Perjalanan pendidikan Islam, melewati tiga fase, yaitu fase pendidikan Islam sebelum kemerdekaan, fase kemerdekaan dan fase reformasi. Pendidikan Islam sebagai proses dan dinamika kehidupan bangsa yang turut mempengaruhi kebijakan suatu bangsa. Oleh karenanya, setiap fase orientasi bangsa sangat memberikan corak terhadap pendidikan Islam.

Paling tidak, pendidikan Islam menempati kedudukan penting dalam pembangunan bangsa. *"Corak bangsa dalam segala aspeknya tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan Islam. Indonesia sebagai bahagian dari bangsa lain, tetap pada karakter sebagai bangsa yang santun, religius dan ramah"*[199] sebagai wujud dari pesan keagamaan, baik yang berhubungan dengan dimensi keTuhanan maupun pada aspek sosial kemasyarakatan. Seseorang yang memiliki refleksi keTuhanan akan terwujud menjadi manusia yang toleran, peduli terhadap sesama, saling menghargai di antara sesama, saling menyayangi dan hidup dalam kedamaian.

Untuk lebih memudahkan pemahaman perkembangan pendidikan Islam pasca kemerdekaan, penulis ingin membagi dua periode yaitu; pendidikan sebelum kemerdekaan, pendidikan Islam sesudah kemerdekaan, dan masa reformasi.

1. Pendidikan Islam Sebelum Kemerdekaan

Islam masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari arab, Persia, dan India sampai ke kepulauan Indonesia sejak abad VII. Para pedagang dalam menjalankan misi dakwah melalui pengajaran

[199]Indonesia memiliki identitas yang selalu berubah dan terbuka untuk diberikan makna. Indonesia dikenal dengan masyarakat yang santun, religius dan ramah. Sebutan tersebut menurut Azyumardi Azra, perlu direnungkan kembali sejauh mana kebenaran dan eksistensinya. Meskipun menurut penulis istilah tersebut pernah menjadi ikatan dan norma kultur yang kuat, sehingga dapat dimunculkan di permukaan. Tidak pernah suatu bangsa hidup terpisah dari akar tradisinya sebagaimana tidak ada pula suatu bangsa yang hidup tanpa pengaruh dari luar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budayanya yang mengadaptasi unsur-unsur luar yang dianggap baik dan memperkaya nilai-nilai lokal. Ketidakmampuan beradaptasi dengan budaya luar acapkali menempatkan bangsa tersebut ke dalam kisaran kehilangan identitas, namun tidak pula dapat berhasil hidup dengan identitas baru yang diadopsi dari luar. Lihat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan*, Edisi I, cet I, Jakarta; ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 100.

agama Islam pada masyarakat lemah (miskin) dan kelompok bangsawan. Pengajaran sangat sederhana, mula-mula mengajarkan Islam dengan syahadat sebagai landasan keIslaman, selanjutnya berkembang dengan pengajaran materi "fiqh dengan mazhab syafii"[200]. Dalam tradisi pendidikan Islam pembelajaran ini dikenal dengan sistem *khalaqa*. Sistem tersebut berkembang menjadi pesantren.

Pada masa pemerintahan Maulana Malik Ibrahim, perhatian akan pendidikan Islam tergolong besar. Selama 20 tahun lamanya, raja terus melakukan pengkaderan *muballigh* dengan menggunakan sistem pesantren. Pendidikan Islam melalui pesantren berlangsung juga, pada semua daerah kerajaan, seperti halnya di Kalimantan "sistem pengajian kitab, terutama cara menerjemahkan dalam bahasa daerah. Lain halnya di daerah Maluku, keberlangsungan pendidikan Islam tidak begitu eksis, hal tersebut disebabkan karena, tantangan masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam adalah "komunitas masyarakat Kristiani bersatu dan gencar melakukan mengembangan missi. Sementara tantangan dari luar adalah VOC selain mengembangkan misi dagang dengan hasil bumi, juga sebagai corong mengembangkan misi kristiani. Pihak VOC memberikan dukungan dan keleluasaan kepada pihak kristiani dalam usaha kristenisasi di Maluku".[201]

Pendidikan Islam, sesungguhnya dapat memenuhi, kebutuhan kemanusiaan baik secara individu maupun sosial, sehingga pendidikan Islam berlangsungnya muda dan cepat diterima masyarakat. Beda halnya dengan kaum penjajah (Belanda) yang menggunakan agama sebagai tameng penjajahan. Dalam asumsi agamanya sebagai berikut; 1). Agama sangat diperlukan bagi pemerintah penjajah, 2). Agama dipakai untuk menjinakanm dan menaklukan rakyat, 3). Setiap aliran agama yang dianggap palsu oleh pemeluk agama yang bersangkutan harus dibawah untuk memecah belah agar mereka berbuat untuk mencari bantuan kepada pemerintah, 4). Janji dengan rakyat tak perlu ditepati, 5). Tujuan dapat menghalalkan segala cara"[202] Karena itu pendidikan Islam tahan akan rintangan dan tantangan apa pun yang menghadangnya. Sebagai suatu proses dakwah pendidikan Islam merupakan sebagai penguat atau

[200] Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam,* (Cet, VI, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 136.

[201] *Ibid*., hlm. 142.

[202] *Ibid*., hlm. 147.

pengikat yang kuat antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Perkembangannya akan terus mengalir berdasarkan perkembangan masyarakatnya. Pendidikan Islam yang oleh penganjurnya menggunakan perdagangan sebagai media untuk melangsungkan dakwah di masyarakat, sasarannya adalah untuk memberdayakan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat, mengarahkan agar menemukan dirinya yang sesungguhnya. Kegiatan perdagangan bukan dijadikan sebagai jalur untuk melakukan pencaplokan, agresi dan hegemoni terhadap sebuah kemunitas. Praktik dagang dan pencaplokan hanya dilakukan oleh dunia barat terhadap masyarakat di sekitarnya.

Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan barat, yang turut mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pesantren adalah sistem pendidikan Islam yang sudah lama dan mengakar dalam masyarakat, yang dalam sistemnya sangat berbeda dengan sistem yang diperkenalkan oleh Belanda. Dengan demikian, sistem yang digunakan di Indonesia terpecah menjadi dua kelompok yaitu; "1). Sistem yang ditawarkan Belanda adalah sistem persekolahan yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama. dan 2). Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pesantren yang hanya mengenal agama saja"[203]. "Pendidikan yang dikelola oleh Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi, yaitu pendidikan umum. Sementara pada lembaga pendidikan Islam, lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi penghayatan agama".[204]

Adapun pendidikan Islam yang dibangun di Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu; 1).Madrasah Adabiyah School di Padang Panjang yang didirikan oleh H. Abdullah tahun 1907. Sekolah ini mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis. Sekolah tersebut tidak bertahan lama, dan diganti dengan Madrasah al Iqbal al Islamiyah yang diprakarsai oleh Syekh Taher Jamaluddin dari Singapura. Pada tahun 1914 madrasah Abadiyah dihidupkan kembali yang merupakan HIS pertama di Minangkau. 2). Madrasah Diniah School yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Yunisi 1915 di Minangkabau

[203] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (cet II, Jakarta: Prenada, 2008), hlm. 298.

[204] Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 23.

dengan menggunakan sistem modern dengan menggunakan alat tulis dan alat peraga".[205] 3). Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tahun 1923 di Yogyakarta. 4). Madrasah Sumatra Tawalib, yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah tahun 1921 di Padang Panjang. 5). Madrasah Sajadah Abdiyah yang didirikan oleh Teuku Beureuh pada tahun 1930 di Sigli (Aceh).

2. Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Pendidikan orde lama termasuk pendidikan Islam, bercirikan sesuai dengan semangat penguasa. Soekarno memiliki pandangan multikulturalisme yang dijadikan sebagai perekat dan penguat kehidupan bangsa. *"Pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial masyarakat apa pun, apabila mereka berasal dari kelas atas, menengah maupun bawah. Tidak hanya itu saja, sosialisme memberikan penghargaan setinggi-tingginya terkait derajat yang sama di depan hukum dan kemanusiaan, sehingga tidak ada yang dibedakan karena faktor suku, agama dan ras. Oleh karena itu, orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara satu warga negara termasuk dalam bidang pendidikan".*

Setelah kemerdekaan Indonesia, dalam banyak hal mengalami perubahan yang bukan hanya dalam bidang pemerintahan, akan tetapi perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan pendidikan bersifat mendasar, yaitu menyangkut masalah penyesuaian kebijaksanaan pendidikan dengan dasar dan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Perubahan-perubahan tersebut *"meliputi perubahan landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia".*[206]

Untuk menyempurnakan pendidikan termasuk kedudukan pendidikan agama, maka dibentuklah badan pekerja yang dikenal dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia (KNIP) kepada Kementerian Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 1945 sebagai berikut; 1). Untuk menyusun masyarakat baru, perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan

[205] Hayati Nizar, *Analisis Historis Pendidikan Demokrasi di Minangkabau (Majallah Hadharah PPS IAIN Imam Bonjol Bapang,* vol 3 edisi Pebruari 2006), hlm. 143.

[206] *Ibid.,* 32.

pengajaran. Paham perseorangan hingga kini berlaku haruslah diganti dengan paham kesusilaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, 2). Untuk memperkuat persatuan rakyat Indonesia, hendak diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat. Berdasarkan keadilan sosial semua sekolah harus membuka untuk tiap-tiap penduduk negara, baik laki-laki maupun perempuan, 3). Metodik yang berlaku di sekolah hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja agar rakyat kita kepada pekerjaan bisa berkembang seluas-luasnya. 4). Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur dan saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah.

Bantuan tersebut berupa; a). Pengajaran tinggi hendaklah diadakan seluas-luasnya dan jika perlu menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru besar. Lain dari itu, hendaklah berlakunya penerimaan pelajar-pelajar keluar negeri untuk keperluan negara, b). Kewajiban belajar dengan lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun, bisa berlaku dengan sempurna dan merata, c). Pengajaran dan ekonomi terutama pengajaran pertanian, industri, pelayaran dan perikanan hendaklah mendapat perhatian istimewa, d). Pengajaran kesehatan dan olahraga hendaklah diatur sebaik-baiknya sehingga kemudian terdapat kecerdasan rakyat yang harmonis, e). Di sekolah rendah tidak dipungut bayaran uang sekolah. Untuk sekolah menengah dan perguruan tinggi hendaklah diadakan aturan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan jangan menjadi halangan bagi pelajar yang kurang mampu.

Atas usul Badan Pekerja, kemudian Menteri Pengajaran dan Kebudayaan membuat Surat Keputusan Nomor 104/Bhg. tanggal 1 Maret 1946 untuk membentuk panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan K. Hajar Dewantoro. Adapun tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu; *"merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah, menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang*

praktis dan jangan terlalu berat, menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah termasuk fakultas"[207]

Pokok-pokok pikiran yang ada dalam konsideran pembaruan pendidikan menjadi penting untuk pencitraan kehidupan berbangsa yang masih baru lepas dari penjajah Belanda. Secara kultur, bangsa Indonesia membutuhkan corak pendidikan yang sesuai dengan budaya, tradisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. *"mengapa bangsa Afrika terjebak dalam kehidupan panjang yang penuh dengan kemiskinan. Jawabannya karena budaya mereka yang menekankan pada budaya kekerasan sebagai jalan keluar dari setiap permasalahan. Mengapa ekonomi bangsa Amerikan mengalami pertumbuhan yang menakjubkan. Jawabannya adalah karena munculnya kultur wirasuasta. Benarkah kultur suatu masyarakat atau bangsa menentukan keberhasilan bangsa dan masyarakat tersebut".*[208]

Pemerintah kolonial Belanda dan Jepang yang menduduki bangsa Indonesia menyisakan persoalan kebangsaan yang sangat luar biasa, menghilangkan emosi kebangsaan, *"nasionalisme",*[209] sehingga kecintaan kepada Belanda dan Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan menghargai bangsa sendiri. Di masa penjajahan Belanda mengalami persoalan dalam kegiatan pendidikan, karena penjajahan diikat oleh doktrin agama Kristiani *"dalam kegiatan pendidikan sebagai perwujudan dari pemikiran mengenai pemisahan antara negara dan gereja, maka gereja harus melepaskan*

---

[207] *Ibid., hlm.* 34.

[208] Zamroni, *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi,* (Cet. I, Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 30.

[209] Nasionalisme berarti kedaulatan, integrasi dan identitas bangsa. Tekanan agar ada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nasionalisme Indonesia merupakan kelanjutan dari semangat revolusi pada masa perjuangan kemerdekaan, dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar. Nasionalisme Indonesia bersifat kosmopolitan, artinya Indonesia sebagai suatu bangsa tidak dapat melepaskan dari perkembangan dan kemajuan bangsa lain. Dalam konteks kecenderungan global, akan semakin banyak orang yang membayangkan menjadi warga dunia *(world citizen)* dan terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks nasionalisme kosmopolitan, terdapat hal-hal yang harus disemangati yaitu; multikulturalisme merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses globalnya demokrasi, kedua, multikulturalisme merupakan proses perkembangan baru dari mundurnya modernisme dan berpengaruhnya post-modernisme, ketiga, multikulturalisme merupakan bagian yang tak terhindarkan dari runtuhnya sekat-sekat primordialisme. Lihat, A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan,* (cet I, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah 2000), hlm. 120-121.

diri dari keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan"[210]. Perjalanan panjang yang dilewati oleh bangsa Indonesia, baru memiliki ruang-ruang untuk mengembangkan pendidikan sebagai pilar bangsa dan masyarakat. Pada abad XIV yang ditandai dengan zaman Renaisance atau Aufklarum dapat memberikan angin segar *"yang dianggap polopor dan membewah sistem pendidikan baru yaitu pendidikan yang diselenggaran oleh negara yang kemudian menjelma dalam bentuk sekolah-sekolah negeri. Sebagai pengaruh dari Aufklarum diterbitkan keputusan raja Belanda tertanggal 30 September 1848 nomor 95 yang memebri wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan biaya pendidikan f.25.000 setahun bagi pendiri sekolah-sekolah bumi putra di pulau Jawa dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri. Sebagai langkah yang dilakukan dengan mendirikan sekolah Dasar sebanyak 20 SD tiap keresidenan (untuk Bumi Putra). Pada tahun 1684 meningkat menjadi 186 buah. Pada tahun 1882 menjadi 512 buah tersebar di seluruh Hindia Belanda".*[211]

Berbeda dengan pendidikan yang dilakukan oleh penjajah Jepang. Jepang, menghapuskan sistem pengelompokan, baik menurut golongan bangsa maupun status sosial. Dengan demikian, terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis. Perubahan-perubahan tersebut berupa; *"jenjang sekolah dasar menggunakan istilah sekolah rakyat atau "Kukumin Gakko" yang terbuka bagi semua golongan penduduk tanpa pembedaan status sosial. Lama pendidikan 6 tahun, jenjang sekolah diantaranya sekolah lanjutan pertama (umum) SMP disebut Shoto Chu Gakko juga terbuka bagi semua golongan penduduk yang memiliki ijazah sekolah rakyat. Sekolah menengah kejuruan yang ada ialah sekolah pertukangan dan sekolah pertanian yang lama belajarnya 3 tahun. Sementara yang lain adalah sekolah menengah tingkat tinggi (SMA)".*[212]

Pola pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di masa pemerintahan Jepang turut memberi pengaruh terhadap semangat kebangsaan. Khazanah dan kekayaan kebudayaan Indonesia sebagai suatu bangsa tetap lestari seirama perkembangan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat Indonesia *"Bahasa Indonesia hidup dan berkembang secara luas di seluruh Indonesia, baik sebagai bahasa pergaulan, pengantar maupun sebagai bahasa ilmiah, buku-buku dalam bahasa asing yang*

[210] Ary H. Gunawan, *Op.Cit.,* hlm. 13.
[211] *Ibid.,* hlm. 14.
[212] *Ibid.,* hlm. 28.

diperlukan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dengan mengabaikan hak-hak cipta internasional karena dalam suasana perang. Bahasa asing yang dibenarkan digunakan di Indonesia hanyalah bahasa Jepang, kreativitas guru berkembang dalam memenuhi kebutuhan buku pelajaran dengan menyadur atau mengarang sendiri, termasuk kreativitas dalam menciptakan alat peraga dan model dengan bahan dan alat yang tersedia[213], seni bela diri dan latihan perang-perangan sebagai kegiatan kurikuler di sekolah telah membangkitkan keberanian pada para pemuda yang ternyata sangat berguna dalam perang kemerdekaan yang terjadi kemudian, diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, agama ditiadakan, sehingga

[213] Alat pendidikan adalah semua yang digunakan guru dan murid dalam proses pendidikan. Termasuk perangkat keras dan lunak. Perangkat keras misalnya; gedung sekolah dan alat laboratorium, sedangkan perangkat lunak berupa kurikulum, metode dan administrasi pendidikan. Pada permulaan Islam, alat yang digunakan dalam pengajaran amat sederhana. Pada masa Nabi Muhammad pengajaran dilaksanakan di rumah nabi dan di rumah Arqam bin Abi Arqam pernah digunakan oleh para sahabat untuk mempelajari pokok-pokok ajaran agama Islam dan pengajaran hafalan Al-Qur'an. Setelah pengajaran berlangsung, para sahabat melihat pengajaran tidak berlangsung secara efektif, oleh karenanya tempat pengajaran dipindahkan dari rumah ke masjid tempat belajar. Masjid-masjid yang yang dijadikan tempat belajar adalah al Azhar yang dibangun Jauhar al Tsaqili, terletak di dalam kota Kairo Mesir. Pada zaman pemerintah Mu'iz Lidiniyah al Fatimy. Tat kalah pemerintahan Malik al Nashir Qalawun di samping masjid dibangun sebuah ruangan untuk mengajarkan Al-Qur'an. Fiqh yang diajarkan di sini ialah fiqh mazhab Abu Hanifah. Menurut catatan pada tahun 1283 dial Azhar sudah terdapat kira-kira 325 Ulama dan dosen, serta 10.780. Selain itu, masjid al Manshur dibangun oleh Abu Ja'far al Manshur dan diperbaharui pada masa pemerintahan Harun al Rasyid. Masjid Umamiyah di Damaskus dibangun oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, yang menghabiskan hasil pajak negara selama tujuh tahun, dikerjakan selama delapan tahun. Masjid tersebut dibangun untuk pengajaran Al-Qur'an. Pada zaman Abbasiyah kaum Muslim banyak bergaul dengan bangsa lain yang memiliki kebudayaan. Kebudayaan itu mempengaruhi kaum Muslim. Orang Muslim ingin mengetahui kebudayaan asing itu. Buku-buku asing diterjemahkan ke dalam bahasa arab, mencakup filsafat orang Romawi, serta sainsnya. Ulama-ulama Islam berlomba-lomba mengumpulkan karangan-karangan dari luar Islam mereka mengumpulkan di Perpustakaan Darul Hikmah dengan maksud untuk mempelajarinya. Muncullah ulama besar Muhammad bin Musa al Khawarismi dan Abu Ja'far Muhammad. Bila semua alat pendidikan di kalangan umat Islam amat sederhana, maka pada zaman pertengahan Islam sudah ada ruangan yang luas untuk tempat perkuliahan, sudah ada asrama untuk mahasiswa juga rumah-rumah pengajar, dilengkapi pula tempat-tempat rekreasi, kamar mandi, dapur dan ruang makan. Lihat, Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam,* (cet II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 92-94.

semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah diseragamkan dan sekolah-sekolah swasta dinegerikan dan berkembang di bawah pengaturan kantor pengajaran, karena pengaruh indoktrinasi yang ketat untuk men Jepangkan rakyat Indonesia, justru perasaan rindu terhadap kebudayaan sendiri dana kemerdekaan nasional berkembang dan bergejolak secara luar biasa, dan bangsa Indonesia dilatih dan dididk untuk memegang jabatan walapun di bawah pengawasan orang Jepang".[214]

Pada masa, pemerintah kolonial Belanda sistem persekolahan didasarkan pada golongan, baik berdasarkan golongan bangsa maupun status sosial. Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan kepada segala lapisan masyarakat sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Selanjutnya dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Tahun 1950 Bab XI Pasal 17, menyebutkan: tiap-tiap warga negara Repoblik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid sesuatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Hal di atas tersebut, berarti bahwa pemerintah Indonesia memberikan kesempatan belajar yang sama pada setiap anak pada pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi, dan juga berarti pula bahwa setiap anak dari setiap golongan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu. Persyaratan yang diperlukan hanyalah prestasi belajar anak yang bersangkutan. Prestasi belajar yang baik, maka kesempatan belajar terbuka luas baginya. Bagi anak yang kurang mampu; tetapi prestasinya baik, maka pemerintah mengusahakan pemberian beasiswa, walaupun dalam jumlah yang terbatas.

Pendidikan Islam sama tuanya dengan kedatangan Islam di Indonesia".[215] Para pemeluk agama baru (agama Islam) tentu berlangsung kegiatan pendidikan Islam dengan mempelajari pengetahuan yang bertalian dengan kesempurnaan beragama seperti; pandai shalat, berdoa dan

[214] *Ibid*., hlm. 30.

[215] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,,* (Jakarta: Hidakarya, 1985), hlm. 6.

membaca Al-Qur'an. Kegiatan belajar mengajar berlangsung di rumah-rumah, langgar/surau dan *"masjid yang kemudian berkembang menjadi pesanren"*[216] mulai tahun 1931 lembaga pendidikan Islam Indonesia memasuki warna baru yang disebut dengan tahun modernisasi pendidikan. Lembaga Pendidikan Islam yang dilahirkan sebelumnya baru berinteraksi dengan Timur Tengah, baik yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam maupun orang-orang Indonesia yang menuntut ilmu di Mekkah".[217]

Perjalanan bangsa Indonesia, sangat ditentukan oleh peran pendidikan Islam. Dari segi pendidikan fatwa ulama menghadapi kemerdekaan menjadi penting, *"1). Para ulama dan santri dapat mempraktekan ajaran jihad yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab fiqh dipondok atau di madrasah, 2). Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap tuhan yang Maha Esa".*[218]

Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidiakn agama, termasuk pendidikan agama formal yang dikelola oleh Depatemen agama RI dengan Departemen P & K. Pendidikan agama Islam di sekolah umum mulai diatur secara resmi, oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelumnya, pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri dari masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR sampai dengan kelas VI. Pada masa itu, keadaan keamanan Indonesia belum mantap, sehingga SKB dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak memberikan pendidikan agama kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam tahun 1947 yang dipimpin oleh K. Hajar Dewantoro dari Departemen P & K dan Prof. Drs. Abd,. Sigit

---

[216] Samsu Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam,* (cet, II, Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 340.

[217] Mahmud Yunus, *Op.Cit.,* hlm. 102.

[218] Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam,* (cet II, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), hlm. 152.

dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Pada tahun 1950, kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P & K hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 1951 yang isinya; (a). Pendidikan agama diberikan untuk kelas IV sekolah rakyat, (2). Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat misalnya di Sumatra, Kalimantan dll., maka pendidikan agama diberikan mulai dari kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV, (c). Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan Kejuruan) diberikan pendidikan agama 2 jam seminggu, (d). Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya, (e). Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama".[219]

Dalam sidang pleno MPRS pada bulan Desember tahun 1960 diputuskan sebagai berikut; *"melaksakan Manipol Usdek di bidang mental/ agama/kebudayaan dengan syarat spritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia, serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II, pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 dari pasal tersebut, dinyatakan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali murid dewasa menyatakan keberatannya"*[220].

Pada tahun 1966, MPRS bersidang lagi. Agenda pokok waktu itu adalah membersihkan sisa-sisa mental G.30 S/PKI. Dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan, yaitu dengan menjadikan pelajaran agama sebagai vak wajib mulai dari sekolah dasar sampai perguruan Tinggi Umum seluruh Indonesia.

---

[219] *Ibid.,* hlm. 153.
[220] Zuhairini, *Op.Cit.,* hlm. 154.

3. Orde Baru

Kehidupan sosial politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang besar. Periode ini disebut dengan zaman *"Orde Baru"*[221] dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkiatan 66. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat secara simultan.

Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung pada pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan jasmani dan rohani.

Adapun sasaran pembangunan jangka panjang dalam bidang adalah terbinanya Iman bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi antara lahir dan rohani, mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong sehingga bangsa Indonesia sangat meneruskan perjuangan dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 disebutkan isi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional untuk selanjutnya disingkat menjadi UUSPN yang berisi; pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang, mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam Pasal 39 UUSPN yang jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang

[221] Orde Baru adalah masa di mana pemerintahan didasarkan atas penerapan UUD 1945 yang otentik secara konsisten dan kekuasaan hukum yang disebut Demokrasi Pancasila. Banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan secara efektif, sementara kita berjuang untuk mencapai aspirasi kita. Dalam upaya menemukan jawaban yang paling cocok untuk manusia, kita selalu harus mendasarkan usaha kita atas falsafat Pancasila dan berpegang teguh pada UUD 1945, Lihat, Muhammad Sirozi, *Politik Kebijaksanaan di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2004). hlm. 48.

wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan agama yang dipahamkan oleh undang-undang adalah merupakan upaya yang dimediasi oleh negara agar setiap orang dapat memahami dan menjalankan ajaran agamanya dengan tetap menghargai agama dan orang lain. Bangsa Indonesia akan semakin kokoh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan falsafat negara Indonesia. Dengan mempelajari agama yang benar dan secara utuh, seseorang dapat terhindar dari sikap fanatisme keagamaan yang sering tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Dengan mempelajari dan memahami ajaran agama yang dianut, seseorang dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain dan dari perbuatan yang mungkar dan merusak.[222]. Hanya mereka yang beriman dan bertakwa yang diandalkan untuk meneruskan pembangunan nasional dan menjaga keutuhan bangsa dan negara republik Indonesia.

Sebaliknya apabila bangsa dan generasi muda Indonesia tidak memahami dan mengamalkan ajaran agamanya, sudah dapat dipastikan,baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya. Pengalaman pada masa orde lama (zaman PKI) bahwa mereka yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dan anti agama, sekaligus anti Pancasila, puncaknya adalah pemberontakan G30S PKI tahun 1965.

Dengan dasar pemikiran di atas, apabila pelaksanaan pendidikan agama Islam berjalan lancar dan dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan dalam rangka keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi generasi muda Indonesia, maka dapat dipastikan bahwa sesungguhnya Indonesia lebih berhasil meletakan dasar yang kuat bagi kelangsungan hidup berbangsa. Program pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu prioritas tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena itu, pendidikan agama Islam tidak terpisahkan dari sistem pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menjadi bumerang bagi kehidupan umat apabila tidak diimbangi dengan

[222] Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Islam,* (cet I, Jakarta: Amiscon, 1996), hlm. 61.

kemajuan dalam bidang agama yang di dalamnya memuat nilai-nilai toleransi, humanitas, tolong menolong dan tumbuhnya sikap kepedulian terhadap sesama.

Untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam, maka dalam jajaran Departemen Agama dibuat strukturiasi penyelenggara berdasarkan Kepres No. 30 Tahun 1978 tentang restruksturisasi susunan organisasi departemen agama, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dengan membawahi empat Direktur, yaitu; Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum negeri, Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam, dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Sebagai tindak lanjut dari KEPRES No. 30 1978, maka dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1979 tentang Penetapan Tugas-tugas Pokok Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum negeri, yaitu melaksanan sebagian tugas-tugas pokok Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di bidang pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum negeri. Berdasarkan tugas-tugas pokok tersebut, Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum negeri dengan fungsi sebagai berikut; *"1). Mempersiapkan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan agama Islam pada sekolah umum, 2). Melaksanakan pembinaan Pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan Kejuruan yang meliputi kurikulum, tenaga guru dan sarana Pendidikan Agama Islam, 3). Melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan kejuruan, 4). Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan kejuruan, 5). Mengumpulkan dan menglolah data yang diperlukan bagi penyusunan rencana peningkatan, penyempurnaan pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum dan kejuruan, serta pembinaan pengawasan penilik pendidikan agama Islam, 6). Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap penilik dan pengawas Pendidikan Agama Islam".*[223]

Selanjutnya, Direktur Pembinanaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah Umum membawahi empat sub Direktur, yaitu; a). Sub Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, b). Sub Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada SLTP, c). Sub Direktur Pembinaan Pendidikan Agama Islam

[223] *Ibid.,* hlm. 63.

pada SLTAS dan Kejuruan, d). Sub Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Pendidikan agama (Penilik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam).

Penyempurnaan dan pengembangan kurikulum pendidikan agama pada sekolah umum dilakukan oleh tim Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam paket kurikulum nasional tahun 1994. Dalam kurikulum tersebut, alokasi waktu untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum dan kejuruan untuk semua tingkat dan jenjang sebanyak 2 jam seminggu. Adapun karakter kurikulum adalah; 1). Materi/bahan kajian untuk masing-masing tingkat atau jenjang satuan pendidikan diupayakan tidak berulang (tidak terjadi dipublikasi atau pengulangan, 2). Pemilihan bahan kajian untuk semua jenjang pendidikan diupayakan yang esensial dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan jiwa dan kemampuan intelektual anak, 3). Aspek-aspek pemahaman keagamaan yang mengandung masalah khilafiyah dihilangkan, 4). Materi atau bahan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik bagi peserta didik diperkenalkan secara profesional, 5). Pokok bahasan/kajian pendidikan agama Islam diorientasikan juga untuk keterpaduan dengan bidang studi yang lain, sehingga pengetahuan umum dan pemahaman keagamaan bagi peserta didik tidak bersifat dikotomis.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada sekolah umum sesuai dengan amanat GBHN dan UU SPN maka dibuat kebijaksanaan teknis, yaitu; a). Pemerataan Pendidikan agama Islam, b). Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan/Guru pendidikan agama Islam, c). Penyempurnaan sosialisasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum (bersama-sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, d). Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agama Islam, e). Peningkatan efektivitas metodologi, f). Peningkatan Pengendalian dan pengawasan pendidikan agama Islam, g). Peningkatan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa dalam bulan ramadhan, h). Mengembangkan pola pembinaan pendidikan Agama Islam terpadu.

Pendidikan agama Islam pada sekolah umum negeri belum berjalan secara optimal. Pendidikan agama Islam belum menjangkau semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Di beberapa wilayah terpencil, masih terdapat sekolah negeri yang belum dapat melaksanakan pendidikan

agama Islam karena tidak tersedianya tenaga guru pendidikan agama Islam. Untuk sekolah-sekolah swasta, baru sebagian yang dapat dijangkau oleh program pendidikan agama. Demikian juga baru sebagian sekolah swasta yang menerapkan ketentuan kurikulum pemerintah (kurikulum yang disusun dengan prinsip-prinsip ilmiah, tidak memihak pada satu aliran paham keagamaan tertentu atau paham yang menyesatkan.

Untuk membantu keberhasilan upaya memperluas cakupan pendidikan agama Islam pada sekolah umum diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan dan bersinergi. Pemerintah harus memahami kondisi sosiolgis masyarakat, untuk meningkatkan partipasi aktif dalam mendorong terlaksananya pendidikan tersebut secara sempurna. Masyarakat dalam konteks pendidikan disebut sebagai *"trilogi"*[224] (pusat pendidikan), perkembangan suatu masyarakat dalam dimensi keagamaan ikut menentukan corak dan kualitas pendidikan di sekolah umum.

Perluasan pendidikan agama Islam dimaksudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, yang mencakup; 1). terlaksananya pendidikan agama Islam di sekolah umum dan kejuruan, 2). Keberhasilan bersifat *aut came* dari program pendidikan agama Islam adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan ke Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh anak didik dengan kriteria; a). Peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan benar, b). Peserta didik dapat menghargai agama lain dalam rangka kerukunan hidup beragama dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, c). Peserta didik dapat memiliki budi pekerti luhur yang dibentuk atas dasar nilai-nilai luhur Islam, d). Peserta didik dapat mengangkat pengaruh negatif dan perbuatan tidak terpuji yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia.

[224] Trilogi Pendidikan (tiga Pudat Pendidikan) atau tempat berlangsungnya pendidikan yang meliputi; pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. Secara simultan, terpadu dan bertahap mengembang suatu tanggung jawab pendidikan bagi generasi muda. Pendidikan tersebut diharapkan dapat melakukan kerja sama, baik langsung maupun tidak langsung dengan saling menopang kegiatan yang sama secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Lihat, Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan,* (cet. 5 III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 37.

4. Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Salah satu dampak positif dari reformasi pemerintahan adalah terjadinya pergeseran paradigma politik pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentrasilsasi dengan keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah[225] dan diregulasi Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dunia pendidikan dilakukan regulasi sebagai wujud tuntutan reformasi. Dalam UU Nomor XX tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat; *"sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan evesiensi menejemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuatu dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan"*[226]. Dari segi pelayanan pendidikan disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Regulasi dalam bidang pendidikan termasuk dalam bidang pendidikan agama, telah didasarkan pada pendekatan dan proses dalam langkah percepatan penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam bidang pendidikan agama masih terdapat berbagai macam kendala sebagai akibat "pemahaman, interpertasi dan implementasi yang tidak komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan agama".[227]

---

[225] Otonomi Daerah bisa bermakna mandiri yang suatu daerah dalam kaitan dengan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Arti lain adalah Desentralisasi, yaitu transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani. Desentralisasi dimaksudnya adalah; 1). Untuk terciptanya efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, 2). Sebagai sarana pendidikan politik, 3). Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karier politik, 4). Stabilitas politik, 5). Kesetaraan politik dan 6). Akuntabilitas publik. Lihat Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan,* (cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 150/156.

[226] Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam,* (cet. II, Jakarta: Prenada Media Goup, 2008), hlm. 286.

[227] *Ibid.,* hlm. 286.

Sekalipun demikian masih saja terdapat perbedaan asumsi dalam masyarakat, yang memposisikan madrasah sebagai lembaga yang termarjinalkan. "Walaupun mempunyai kedudukan yang yang setingkat dengan sekolah umum, perjalanan madrasah tetap berbeda dengan sekolah umum tersebut. Madrasah masih dianggap lembaga pendidikan kelas dua, di mana ada pandangan dari pada tidak sekolah lebih baik masuk di Madrasah. Ironinya pandangan ini muncul dari kalangan umat Islam sendiri. Namun, apakah mereka patut disalahkan, selama madrasah tidak mampu membenahi diri agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, maka mereka tidak disalahkan".[228]

Di tengah hiruk pikuknya persoalan madrasah, peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh termasuk di dalamnya madrasah, menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 14. Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang isinya meliputi yaitu: 1). Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, 2). Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, ketakwaan dan akhlak mulia, 3). Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas, 4). memiliki kopotensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, 5). Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya, 6). Memperoleh kesempatan yang ditentuian sesuai dengan prestasi kerja, 7). Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, 8). Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 9). Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keprofesionalan guru.

Dengan UU di atas tersebut, guru diharapkan terjadi perimbangan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perimbangan itu berupa, meningkatnya peran dan fungsi-fungsi pengajaran secara profesional. Guru sebagai sumber perubahan sebagai inovatif, motivator dan progresivitas dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran. Di samping itu, guru akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan, dengan adanya kenaikan gaji bagi yang telah mengikuti sertifikasi.

Mungkin terdapat asumsi yang berbeda-beda di kalangan tenaga pengajar, baik guru maupun dosen. Bagi kalangan tertentu, sertifikasi

[228] *Ibid.*, hlm. 293.

adalah pintu penting meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk bertumpuknya pendapat sebagai refleksi dari perselingkuhan politik antara rakyat dan pemerintah. Tenaga pengajar yang mendapat pendapatan besar dengan sangat asyiknya menikmatinya yang sudah sangat lama ia dambakan, dinina bobokan dengan berlimpahnya pendapatan melalui gaji yang diterima setiap bulan. Yang sudah menerima menurut hemat penulis asyik, bukan? Namun, dalam fenomena yang lain, para menguasa asyik dengan bebasnya menguras uang negara dengan cara korupsi, nepotisme dan kelusi. Penguasa yang sedang asyik menjalankan aksinya merasa bebas, karena tidak terdeteksi oleh sebagian rakyat karena asyik menikmati tambahan pendapatan yang baru saja datang. Keasyikan bagi guru dan dosen apakah akan berakhir setahun atau dua tahun atau tidak tahu lamanya sampai kapan. Semakin lama semakin baik kata Yusuf, karena penguasa akan semakin leluasa menjalan aksinya menjarah hak dan kepentingan rakyat.

Korupsi masih menjadi kata menarik dalam era hari ini. Korupsi berada pada tataran pemerintahan. Dalam konteks histori, pelaku korupsi hari ini, adalah generasi angkatan tahun 66 yang turut menggagas ide reformasi dengan harapan bangsa ke depan lebih baik dari masa sebelumnya. Sekalipun keadaan berbalik arah. Korupsi misalnya. Bila di zaman Suharto, yang dikenal masyarakat melakukan korupsi hanyalah Suharto, keluarga dan koleganya. Namun hari ini, yang korupsi adalah seluruh lini, sosial masyarakat, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun nonpemerintah. Mengahiri zaman Suharto sangat mudah dan kosnya murah, cukuplah merayu tentara, dan menggerakan mahasiswa menduduki istana dan DPR, lalu Suharto dipaksa mundur, yang pada akhirnya Suharto mundur. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa permasalahan bangsa sudah selesai setelah Suharto mundur dalam gelanggang politik. Sebagian yang lain, permasalahan masih banyak dan perjalanan bangsa masih panjang yang mungkin masih sangat banyak yang siap menusuk dalam perjalanan bangsa.

Liku perjalanan bangsa tidak selesai dengan meraih reformasi. Masih terbentang masalah baru, terutama korupsi yang digeluti oleh para pelaku negara. Ternyata hampir seluruh pusat-pusat kekuasaan menjadi tempat paling empuk berlangsungnya korupsi, mulai dari pemilihan anggota legislasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tidak jarang didengar bahwa calon ini menghabiskan uang

milliaran rupiah untuk meraih kedudukan. Demikian halnya dengan calon eksekutif, mulai dari ketua RT sampai Presiden. Yang pasti dalam fenomena bangsa hari ini, bahwa kekuasaan harus dengan garis tangan, tanda tangan dan buah tangan. Garis tangan dalam pengertian memang Allah mentakdirkan menjadi penguasa sehingga dapat meraihnya. Tanda tangan dalam pengertian seorang calon mendapat lisensi dari kolega tertentu untuk memperlancar mendapatkan kekuasaan. Sementara, buah tangan adalah ketersediaan uang dalam jumlah besar, untuk membiayai proses politik dengan cara membuat baleho besar di pinggir jalan untuk memberi kesan bahwa calon penguasa adalah tokoh pinggir jalan, yang sangat mustahil dia datang untuk memperbaiki bangsa, uang pun digunakan untuk memperbanyak tim sukses untuk menghindari politik uang.

Persoalan korupsi di Indonesia sangat menarik, oleh karena mayoritas masyarakatnya dan penyelenggara negaranya adalah orang Islam. Islam mungkin simbolnya/label atau identitas yang melengket pada dirinya. Akan tetapi, mungkin norma Islam dalam pengetahuan, semangat hidup, dan daya kontrol kekuasaannya tidak dengan norma Islam. Dalam fenomena keseharian terutama orang-orang yang berpengetahuan agama Islamnya pas-pasan atau orang mendapat perkolegaan dengan komunitas lain, adalah kesempatan paling empuk untuk menyudutkan Islam sebagai agama. Korupsi bukan hanya berlangsung dalam masyarakat Muslim, namun juga pada masyarakat nonmuslim. "(1). Indonesia yang mayoritas Muslim pada tahun 2000 mencapai titik ke 9, (2). Rusia yang mayoritas penduduknya Kristen data tahun 2000 mendapat peringkat 9, (3). Pakistan, Bangladesh dan Nigeria yang mayoritas penduduknya Muslim memiliki indeks korupsi rata-rata 7, (4). Argentina, Meksiko, Philipina dan Kolumbia yang penduduknya mayoritas Kristiani mencapai indeks rata-rata 7, (5). Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Budha indeks korupsinya mencapai rata 8, sedangkan (8), Iran, Arab Saudi, Syuria dan Malaysia yang mayoritas penduduknya Muslim indeks korupsinya lebih rendah".[229]

Melihat kondisi di atas bahwa agama tidak begitu berpengaruh, terhadap kehidupan sosial masyarakat. Menurut Azyumardi Azrah,

[229] Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, (Jakarata: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 55.

tinggi rendahnya kriminal seperti korupsi tidak banyak terkait dengan agama, tetapi disebabkan oleh karena; a). Lemahnya penegakan hukumn karena itu semua bisa diatur dengan sogok menyogok, *money* politik, b). Mewabahnya gaya hidup hedonistik, dan c). Kurang adanya politikal will dan keteladanan dari pejabat publik untuk memberantas korupsi dan penyakit sosial lainnya. Lanjut Azrah karena itu tidak adil bila ada orang yang secara simplisit mengkambinghitamkan agama.

Permasalahan sosial bukan hanya dalam aspek korupsi seperti yang penulis tuturkan di atas, masih banyak aspek lagi yang turut menggangu kelangsungan dan stabilitas masyarakat. Misalnya "disiplin makin longgar, tingkat penindasan yang kuat terhadap yang lemah sebagaimana tampak dalam tingkah laku samrawut dan saling menindas para pelaku lalu lintas yang tidak kunjung berkurang, semakin meningkatnya tindakan kriminal, tindakan kekerasan, anarkisme, premanisme, KKN yang melanda hampir semua institusi pemerintah".[230]

B. Korelasi Pendidikan dengan Demokrasi

Rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 lima tahun ke depan tentang pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu. Hal ini ditujukan agar peserta didik memiliki akhlak mulia, bersikap kreatif dan inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas dan sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejalan dengan misi pendidikan nasional tersebut dan merespons perkembangan global abad ke-21, maka arah kebijaksanaan pendidikan nasional bisa dirumuskan dengan beberapa langkah. *Pertama*, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. *Ketiga*, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan. *Keempat*, memberdayakan lembaga pendidikan dan peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat. *Kelima*, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Dan terakhir,

[230] *Ibid.*, hlm. 54.

mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara terarah, terpadu dan menyeluruh.[231]

Karena itu, pembinaan pendidikan Islam yang dilaksanakan selama ini diarahkan pada empat tema kebijakan. Yaitu, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi penyelengaraaan pendidikan.[232] Keempat tema ini menurut penulis masih relevan dengan kebijaksanaan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

Aktivitas yang diaktualisasikan di alam jagat raya ini, diciptakan Tuhan sesuai dengan tujuannya. Berkenaan dengan ini, Tuhan memberitahu manusia bahwa segala yang diciptakan-Nya bukanlah tidak bertujuan. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah dalam surah Al-Imran: 191:

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahannya:

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (*Q.S. Al-Imran: 3: 191*).

Jika kita merunut dan merenungkan firman Allah di atas, kiranya memberikan pelajaran yang amat mulia bagi umat manusia, yaitu bahwa setiap usaha yang dilakukan hendaknya didahului dengan perencanaan (*planing*) dan tujuan yang jelas. Sebab, sebagaimana telah disebutkan di muka, segala usaha tanpa adanya antisipasi ke depan akan banyak dimungkinkannya berbagai ketimpangan dan bahkan penyelewengan. Dan dengan berorientasi kepada tujuan yang dikehendaki, manusia dalam menit usahanya dapat mengakhiri, mengarahkan dan bahkan mengembangkan kembali ke arah tujuan hidup dan kehidupan.

---

[231]Lihat Indra Djati Sidi, *Op.Cit.*, hlm. 69.
[232]Lihat *ibid.*, hlm. 70.

Demikian pula dalam usaha pendidikan Islam, tidak boleh mengabaikan tujuan yang ingin dicapai olehnya, tujuan yang dikehendakinya mungkin dapat berarti sebagai pemberi nilai bagi gerak proses pendidikan Islam itu sendiri. Sementara, berbicara mengenai tujuan akhir dari proses pendidikan Islam, tidak boleh dilepaskan dari tujuan luhur diciptakannya manusia, karena tujuan pendidikan Islam adalah tujuan hidup diciptakannya manusia itu sendiri.[233] Dan pendidikan itu sendiri hanyalah sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya agar tetap survival, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.[234] Dengan demikian, tujuan hidup manusia di pentas bumi ini merupakan pangkal dari tujuan pendidikan Islam.

Ada dua hal pokok yang ingin penulis katakan berkenaan dengan tujuan hidup manusia sebagai pangkal tujuan pendidikan Islam. Kedua tujuan pokok yang dimaksud adalah manusia dididik untuk menjadi '*abdullah* (manusia pengabdi)[235] dan *khalifatullah* (pemimpin di muka bumi).[236]

Dari sini dapat kita katakan, bahwa manusia dididik agar ia menjadi dewasa sebagai hamba Allah dan *khalifatullah* di muka bumi, baik jasmani maupun rohani. Kendatipun kedewasaan rohaniah manusia sulit ditentukan, karena sifatnya lebih abstrak dari pada kedewasaan jasmaniah. Dan kedewasaan rohaniah manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu proses.[237] Karenanya, hal ini bergantung kepada orang yang melihat dan menilainya. Itulah tujuan pendidikan Islam ideal yang harus memberi kontribusi kepada tiap pendidikan Muslim dalam mengemudikan perahu pendidikannya.

Penghambaan diri kepada Allah merupakan bentuk pengakuan yang tulus bahwa kita tidak dibenarkan mengarahkan dan menggantungkan hidup ini kepada sesuatu apa pun selain Allah, serta merupakan petik pelepasan akan absolutisme dan eksploitisme manusia terhadap manusia yang lainnya. Di sinilah demokrasi pendidikan memberikan

---

[233]Lihat AM. Saefuddin, *Op.Cit.,* hlm. 41.

[234]Lihat Hasan Langgulung, *Op.Cit.,* hlm. 34-35.

[235] Q.S. Al-Dzariyat 51: 56.

[236] Q.S. Al-Baqarah 2: 30.

[237]Lihat Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Cet. VIII; Bandung: Ma'arif, 1989), hlm. 47.

arti penting bagi pencapaian tujuan pendidkan Islam, sebagaimana dimaksud di atas. Di mana demokrasi pendidikan yang memberikan nilai kebebasan, *syura*, kesamaan dan persamaan dalam pendidikan, serta sikap-sikap ilmiah lainnya, kiranya akan menjadi landasan bagi pencapaian tujuan pendidikan Islam tersebut.

Oleh karena itu, tugas pendidikan bukan hanya sekadar alih informasi pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu pendidikan harus profesional dalam membentuk kepribadian peserta didik. Maka bagi seorang guru yang notabene sebagai pemandu jalannya proses pendidikan dan pembelajaran harus mampu secara psikis memahami bidang studi yang dipegangnya dan mengerti, memahami sampai mengaktualisasikannya. Menurut penulis, bahwa sasaran pendidikan bukan hanya untuk membuka peluang *having*, memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan dan kemahiran; lebih dari itu, di sisi lain pendidikan tidak boleh mengabaikan tugasnya untuk membangun pribadi sebagai penanggung eksistensi manusia. Bahkan pendidikan lebih ditujukan kepada mantapnya kesejatian pribadi.

Penghambaan dalam konteks pendidikan Islam ini, tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga diarahkan kepada tanggung jawab sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Quthub:

Beribadat itu tidak terbatas hanya pada tata cara peribadatan yang telah ditentukan, melainkan mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan luas sekali, meliputi seluruh aktivitas dan bidang kehidupan, dan mencakup seluruh perbuatan, karsa dan rasa. Semua aktivitas hidupnya ditujukan buat Tuhan, diperhatikan sekali apa yang diperbolehkan-Nya, menjaga diri dari segala yang membuat-Nya marah dan mengerjakan segala apa yang disenangi-Nya".[238]

Formulasi tujuan pendidikan Islam seperti di atas, akan mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwa tujuan ideal pendidikan Islam, sebagai yang disinggung oleh Muslih Usa, adalah berusaha mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara menyeluruh. Dengan perkataan lain, pendidikan Islam berusaha

[238]Lihat Muhammad Quthub, *Sistem pendidikan Islam*, (Cet. I; PT. Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 21-22.

membentuk manusia yang *iha¥i¥* pribadi dan *iha¥i¥* sosialnya, yang padanya terpahat *'aqlun iha¥i¥ wa qalbun salim*. Dan hal ini dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan ataupun pancaindra.

Sementara, tujuan pendidikan Islam yang bertipekan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, Prof. Dr. Hasan Langgulung menandaskan demikian:

> "Tujuan akhir (*ultimate main*) pendidikan Islam dalam Islam adalah pembentukan pribadi khalifah bagi anak didik yang memiliki fitrah, roh di samping badan, kemauan yang bebas dan akal. Dengan kata lain, tugas pendidikan adalah mengembangkan keempat aspek ini pada manusia agar ia dapat menempati kedudukan sebagai khalifah".[239]

Dari pernyataan Hasan Langgulung di atas, makna manusia khalifah yang dimaksud adalah manusia yang mampu mengintegrasikan dan sekaligus mengembangkan unsur-unsur tersebut, serta dapat mengaplikasikan dalam segala sektor kehidupan, berupa pola pikir, pola sikap dan perilaku yang dinapasi oleh nilai kemanusiaan dan nilai keTuhanan. Seperti yang tercermin dalam konsepsi tauhid di atas, bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai *il±hiyah* (teologis-sebagai landasan etis-normatif) dan nilai-nilai *ins±niyah* dan alamiyah (kosmologis dan antropologis) sebagai nilai-nilai operasional.

Keberpihakan pendidikan Islam kepada tujuan ideal di atas, didasarkan pada seruan Islam akan adanya persamaan dan kesempatan yang sama bagi umat manusia untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki, karena itu proses pendidikan dan pengajaran dalam rangka pendidikan Islam, menurut *A¯hiyah al-Arbasyi*, amat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi.[240] Jadi, demokrasi pendidikan yang penting bagi pencapaian pendidikan Islam.

Kontribusi penting itu dapat kita baca pada pikiran al-Abrasy[3] dalam bukunya "*al-Tarbiyah al-Isl±miyah*" di atas, sebagaimana dikutip oleh Abdul Munir Mulkhan, bahwa prinsip utama pendidikan Islam

---

[239]Lihat Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), hlm. 67.

[240]Lihat Athuiyah al-Arbasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

adalah pengembangan berpikir bebas dan mandiri secara demokratis dengan memperhatikan kecenderungan peserta didik secara individual yang menyangkut aspek kecerdasan akal dan bakat yang dititik beratkan pada pengembangan akhlak.[241]

Lebih lanjut al-Abrasy[3] menyatakan, dengan merangkum pandangan para filsuf Islam terkemuka, bahwa pendidikan Islam berdasarkan atas dua belas prinsip. Prinsip-prinsip itu secara garis besar adalah: demokrasi dan kebebasan, pembentukan *akhlakul karimah*, sesuai kemampuan akal peserta didik, diversifikasi metode,[242] pendidikan kebebasan, orientasi individual, bakat keterampilan terpilih, proses belajar dan mencintai ilmu, kecakapan berbahasa dan dialog (debat), pelayanan, serta universitas dan rangsangan penelitian.[243]

Berdasarkan tujuan dan pernyataan al-Abrasy berkenaan dengan prinsip pendidikan Islam, dapatlah penulis katakan bahwa demokrasi pendidikan merupakan pilar bagi proses pendidikan dan pengajaran untuk mengantarkan kepada tujuan ideal pendidikan Islam di atas.

Dengan demikian, dapat kita mengerti pada kesamaan maksud antara penghambaan semata hanya kepada Tuhan (sebagai akhir tujuan pendidikan Islam) dan kebebasan dan kesamaan (sebagai nilai demokrasi pendidikan). Sebab bila tujuan pendidikan Islam diarahkan pada pembentukan manusia pengabdian hanya kepada Allah. ('Abudullah penghambaan diri hanya keada Allah) dan sebagai wakil-wakil-Nya di

---

[241]Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah* (Cet. I; Yogyakarta: SIPRESS, 1993), hlm. 236.

[242]Fungsi dari metode itu sendiri adalah mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan perkembangan objek sasaran tersebut. Dalam Al-Qur'an, metode dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi dengan melaksanakan pendekatan, di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki potensi rohaniah dan jasmaniah yang keduanya dapat digunakan sebagai saluran penyampaian materi pelajaran. Menurut Hasan Langgulung bahwa penggunaan metode didasarkan atas tiga aspek pokok, yaitu: 1). Sifat-sifat dan kepentingan yang berkenaan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu pembinaan manusia mukmin yang mengaku sebagai hamba Allah. 2). Berdasarkan dengan metode-metode yang betul-betul berlaku yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau disimpulkan dari padanya. 3). Membicarakan tentang pengerakan (*motivation*) dan disiplin dalam Istilah Al-Qur'an disebut ganjaran (*sawab*) dan hukuman (*iqab*). Lihat Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 94. Lihat pula Rama Yulis, *Op.Cit.,* hlm. 78.

[243]Lihat *ibid.*, hlm. 237-237.

muka bumi, maka secara otomatis kebebasan dan kesamaan manusia harus ditempatkan pada pilar awal bagi tercapainya tujuan tersebut.

C. Model Pengembangan Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi

Model pengembangan pendidikan dalam berbasis demokrasi, menjadi suatu hal yang amat signifikan dalam memerdekakan dan membela hak-hak manusia atas dirinya. Pengembangan pendidikan tidak boleh mempersiapkan orang dengan sesuatu hal yang lain ataupun menjadi menyimpang dari aktivitas lain. Pengembangan pendidikan harus merupakan suatu aktivitas yang benar-benar dimaksudkan untuk membantu manusia agar dapat memperoleh dan mempertahankan kekuasaan atas dirinya sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Kehadiran pendidikan harus benar-benar dirasakan sebagai wahana pembebasan, sehingga kerja-kerja pendidikan harus senantiasa memberi kesempatan dan kebebasan kepada orang untuk lebih banyak mengetahui dan mempelajari banyak hal tanpa harus membatasinya.[244]

Untuk lebih awal bahwa pendidikan demokrasi senantiasa berusaha membangkitkan kesadaran kritis dari kalangan kaum tertindas untuk kemudian melakukan suatu aksi memperjuangkan hak-haknya sendiri.[245] Arah pendidikan demokrasi adalah bagaimana pendidik dan peserta didik mengusahakan pendidikan yang berorientasi terhadap pembebasan kesadaran dengan cara "dialogika". Memancing dan membiarkan peserta didik untuk mengungkapkan, membebaskan, menamai, dan memaknai dunianya dengan selanjutnya mengubahnya. Wajah pendidikan demokrasi adalah terlihat dari pemihakannya terhadap proses kemanusiaan yang sejati.

Secara historis kehadiran institusi pendidikan tidak lain dari suatu aktivitas bangsa Yunani kuno untuk mengisi waktu mereka yang luang dengan belajar pada orang-orang pandai.[246] Dari kebiasaan

---

[244]Lihat Neil Postman, *The End Of Education* Diterjemahkan oleh Ade Ma'ruf bersama Siti Farida, dengan judul *Matinya Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Jendela. 2001), hlm. 165-166.

[245]Paulo Freire, *Sekolah Kapitalisme yang Licik,* (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 1998), hlm. 34.

[246]Lihat. Roem Topatimasang, *Sekolah itu Candu* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6-8.

inilah sehingga lembaga pendidikan secara sistematis diatur sampai menjadi aktivitas formal. Dengan menganalisis dari kesejarahan lembaga pendidikan, maka cukup terang, bahwa menjadikan pendidikan sebagai alat dominatif yang sangat hegemonik terhadap rakyat, apalagi memanfaatkan pendidikan untuk melakukan proses pembodohan politik demi kelanggengan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu sangatlah bertentangan dengan niat awal dan konteks sejarah kelahiran aktivitas belajar.

Mengembalikan pendidikan pada niat awalnya sebagai lembaga sosialisasi bagi umat manusia, menjadi tanggung jawab yang penting untuk diwujudkan. Tugas ini adalah tugas kemanusiaan, yang tidak dapat diserahkan pada kelas dominan untuk melakukannya, sebab menuntut kepada kelas dominan untuk mengubah wajah pendidikan pada niat awalnya, hanya akan menjadi utopia, bagaimanapun kelas dominan tidak akan pernah mau dan rela untuk melakukan "bunuh diri kelas". Akan tetapi, ini menjadi sebuah kemungkinan bila dimulai dari gerakan kultural yang melibatkan masyarakat lokal.[247]

Kekuatan pembebasan (*liberation force*) harus betul-betul merealitas dalam gerak laju pendidikan yang humanis. Gerakan humanisasi pendidikan ini menuntut adanya reformasi yang mendasar dalam pendidikan baik dalam metodologi belajar-mengajar sampai kepada manajemen dan perencanaan pendidikan.

Pengembangan pendidikan Islam bermaksud memberikan apresiasi yang berlebihan, namun dipahami bahwa proses pendidikan sangat menentukan bahwa apakah tujuan pendidikan dapat dicapai dengan optimal atauka justru sebaliknya, tujuan pendidikan mengalami disorientasi bahkan gagal total. Praktik pembelajaran dalam artian sederhana ialah serangkaian proses belajar yang terdiri dari berbagai komponen belajar, baik subjek belajar, objek belajar, strategi, media, alat belajar maupun evaluasi yang berorientasi pada terciptanya tujuan yang hendak dicapai. Belajar dalam konteks untuk menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin merajalela perlu dilakukan upaya-upaya pencarian watak kembali pada praktik pembelajaran yang ideal.[248]

---

[247]Lihat, H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Cet. III; Bandung: Rosda Karya, 1998), hlm. 32-33. Lihat pula. William F. O'neil, *Educational Ideologies*. Diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul *"Ideologi-Ideologi Pendidikan"* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 471.

[248]Muhammad Karim, Op.Cit., hlm. 138.

Selama ini, watak yang berkembang dalam pola pikir peserta didik adalah minimnya kreativitas pembelajaran, kurang keberanian berpendapat, hanya mengikuti buku panduan semata, dan lain sebagainya. Pembelajaran transformatif, yaitu dialogis, partispatoris, pendidikan yang membebaskan, peserta didik bukan bejana kosong dan berbagai istilah yang serupa lainnya yang dipublikasikan dalam berbagai seminar, diskusi, maupun dalam berbagai kajian. Namun dalam kenyataannya, kondisi yang ideal yang diharapkan sebagian masyarakat tersebut hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Buktinya, praktik pembelajaran terutama dalam kelas masih didominasi guru dan dosen yang mengajar dengan metode doktriner pada peserta didik, metode yang tidak kontekstual, objek kajian yang terbatas pada silabi, sumber belajar terbatas pada buku-buku yang sudah lama.[249]

Pembelajaran transformatif penekanannya pada model pembelajaran kritis dan kreatif, dalam pembelajaran ini, bermaksud mengidealkan adanya sebuah proses belajar secara bersama dengan prinsip bahwa manusia (dosen dan mahasiswa) adalah menjadi subjek pembelajaran sehingga terjadi interaksi yang kritis dalam mengkaji sumber-sumber belajar yang ada dan tidak terbatas pada teks-teks yang tertulis, namun belajar dari teks yang tidak tertulis (pengalaman, peristiwa, fakta masyarakat, kemiskinan, kebodohan bencana alam, terorisme, korupsi, dan lain sebagainya) sehingga dialektika mutualis akan terjadi. Sebab, antara fenomena sosial yang bersifat empiris dapat dikaji ulang dan didialogkan dengan teks yang bersifat teoretis dalam upaya pencarian solusi.[250]

Sering kali ada perasaan takut dan khawatir ketika sebuah pemikiran alternatif dimunculkan. Pemikiran alternatif (apa pun namanya) yang muncul ke permukaan sering diikuti perasaan takut, terlebih jika ia bersinggungan atau bahkan berhadapan dengan penyelenggara pendidikan. Pimpinan universitas, dosen, karyawan, dan lain sebagainya, takut gagal atau khawatir terhadap proses pendidikan dan belum bisa menerima sepenuhnya pemikiran-pemikiran yang inovatif karena dianggap menentang yang sudah ada. Tugas demokrasi ini memang berat, ibaratnya sedang berenang melawan arus. Namun,

[249]Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 34.

[250]*Ibid.*, hlm. 35.

pemikiran alternatif ini akan menjadi kenyataan apabila menjadikannya sebagai ideologi besar yang kemudian mampu melawan ideologi dominan yang selama ini mendominasi dunia pendidikan.[251]

Pengembangan pendidikan dan demokrasi sosial yang meniscayakan emansipasi tentu akan menggeser kekuatan ideologi pendidikan yang hanya sekadar pengalihan ilmu pengetahuan saja. Pendidikan demokrasi di sini menjadi penting karena melihat adanya tantangan yang kuat dalam era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah demokrasi nilai besar-besaran yang menciptakan konsekuensi logis munculnya budaya-budaya baru dan penguatan etos kerja sumber daya manusia (SDM). Jika pendidikan masih mengandalkan pada aspek kognitif semata, maka dunia pendidikan tentu akan ketinggalan jauh dengan bangsa-bangsa lain. Secara makro, era global adalah tantangan untuk merebut kompetensi sumber daya manusia antarbangsa. Peluang pendidikan yang berlaku bagi penyelenggara pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia untuk membangun kualitas bangsa. Kualitas bangsa dibangun dan kualitas individu yang memiliki tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat, serta menghayati jati diri bangsa dan tanah air.[252]

Tugas utama bagi penyelenggara pendidikan adalah menyusun perencanaan pendidikan yang diatur dalam sistem perundang-undangan pendidikan sehingga penerapan dan sistem perundang-undangan itu dapat digunakan para pelaksana atau oleh para pelaku pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Lalu, apakah penyelenggara pendidikan sudah memahami adanya peluang ini? Jawabannya sangat tergantung pada kemampuan memberdayakan potensi masyarakat yang memiliki kemampuan profesional di bidang pendidikan untuk menyusun format dan sistem pendidikan itu.[253]

Pengembangan pendidikan dan demokrasi sosial pada dasarnya adalah model pendidikan yang bersifat kooperatif terhadap segenap kemampuan peserta didik menuju proses berpikir yang lebih bebas dan kreatif. Model pendidikan ini menghargai potensi yang ada pada

---

[251]Musthofa Rembagi, *Pendidikan transformatif pergulan kritis merumuskan pendidikan di tengah pusaran arus globalisasi* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 98.

[252]*Ibid.*, hlm. 99.

[253]Djohar, M.S, *Pendidikan Strategik; Alternatif untuk pendidikan masa depan* (Cet. I; Yogyakarta: LESFI, 2007), hlm. 76.

setiap individu. Artinya, potensi-potensi individual peserta didik tidak dimatikan dengan berbagai bentuk penyeragaman dan sanksi-sanksi, akan tetapi dibiarkan tumbuh dan berkembang secara wajar dan manusiawi. Pendidikan transformatif menjelaskan adanya relasi sosial yang timpang, menindas, mendominasi, dan mengeksploitasi. Relasi-relasi itu perlu diubah agar menjadi setara, saling menghargai, tak ada diskriminasi, dan pada akhirnya memanusiakan.[254]

Ada beberapa prinsip umum sebagai upaya reorientasi pemikiran pendidikan demokrasi sosial dalam konteks masyarakat global saat ini, di antaranya: *Pertama*, tumbuhnya kesadaran kritis peserta didik, *kedua* berwawasan futuristik (masa depan), *ketiga* pentingnya skil/ keterampilan, *keempat*, orientasi pada nilai-nilai humanis, dan *kelima* adanya jaminan kualitas.[255]

Pendidikan demokrasi dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki kesadaran kritis, maka perubahan sosial di masyarakat tentu akan berjalan dengan cepat. Tetapi, benarkah pendidikan kita sudah mengarah pada pemikiran tersebut? Penulis merasa yakin bahwa pertanyaan ini akan mengusik kesadaran naif yang telah dibangun sebelumnya. Realitanya, ternyata dunia pendidikan masih didominasi oleh proses pengalihan ilmu pengetahuan semata dengan menghasilkan produk manusia mekanik yang tidak memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi riil yang terjadi di masyarakat, dan terkait dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang merdeka. Kesadaran kritis ialah kesadaran yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural lebih menganalisis secara kritis struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dan bagaimana kaitan tersebut berakibat pada keadaan masyarakat.

Pengembangan pendidikan Islam dalam teori demokrasi sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk mampu mengidentifikasi "ketidakadilan" dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu menganalisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mendemokrasikannya. Tugas teori sosial dalam pendidikan adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar masyarakat terlibat

---

[254]Darmaningtias, *Pendidikan pada dan setelah krisis* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 152.

[255]Musfata Rembangy, *Op.Cit.*, hlm. 100.

dalam suatu proses dialog penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik atau lebih adil.[256] Dalam kerangka pendidikan transformatif kesadaran ini sangat penting untuk ditumbuhkan dalam setiap peserta didik sebagai aktor perubahan sosial.

Sebagai konsekuensi logis, proses pendidikan dalam konteks demokrasi ini harus diorientasikan pada pola-pola pendidikan kritis. Pengertian pendidikan kritis pada dasarnya merupakan aliran atau paham dalam pendidikan untuk pemberdayaan dan pembebasan. Perdebatan mengenai peran pendidikan di lingkungan teoritisi dan praktisi yang menurut paham dan tradisi dan pemikiran kritis terhadap sistem kapitalisme dan dan tradisi pemikiran mereka yang mencita-citakan perubahan sosial dan struktural menuju masyarakat yang adil dan demokratis, suatu masyarakat tanpa eksploitasi dan penindasan, yakni seperti para penganut aliran gerakan sosial untuk keadilan maupun golongan penganut paham dan teori kritik lainnya.[257] Ada pijakan dasar tradisi pendidikan kritis, yakni pemikiran dan paradigma kritik ideologi terhadap sistem dan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Dengan demikian, pendidikan dalam perspektif paham ini merupakan media untuk resistensi dan aksi sosial.

Pendidikan transformatif merupakan proses perjuangan politik. Ketidakadilan kelas, diskriminasi gender, serta bagaimana bentuk ketidakadilan sosial lainnya seperti hegemoni kultural dan politik, serta dominasi melalui diskursus pengetahuan yang merasuk di dalam masyarakat, akan terefleksi dalam proses pendidikan, dan harus menjadi cermin kondisi sosial dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif kritis, proses pendidikan merupakan proses refleksi dan aksi (praksis) terhadap seluruh tatanan dan relasi sosial dan sistem dan struktur sosial dan bagaimana peran dan cara kerjanya dalam menyumbangkan ketidakadilan dan ketidakseteraan sosial. Karena tugas utama pendidikan dalam menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur yang diskriminatif terhadap kaum tertindas dan kaum yang tersingkirkan seperti kaum miskin, kaum buruh, para

---

[256]Poulo Freire, *Pedagogy of the oppressed* (Cet. I; New York: Preger, 1999), hlm. 31.

[257]Mansur Fakih, dkk, *Pendidikan populer membangun kesadaran kritis* (Cet. I; Yogyakarta: Read Book, 2001), hlm. 28.

penyandang cacat atau mereka yang memiliki kemampuan berbeda, kaum perempuan, anak-anak, serta bagaimana melakukan proses dekonstruksi dan berbagai aksi praktis maupun strategis menuju sistem sosial yang sensistif dan nondiskriminatif.[258]

Tujuan pendidikan bukan menyetor pengetahuan (apalagi hanya untuk mendapat gelar tertentu), akan tetapi memecahkan masalah-masalah nyata. Oleh karena itu, PMMS (Pendidikan yang Menonjolkan Masalah Sosial) tidak hanya memulai dengan asumsi tentang kemampuan peserta didik, tetapi juga dengan kesadaran bahwa peserta didik berada dalam dunia yang bermasalah.[259]

Selanjutnya, dalam konteks pendidikan kritis peserta didik dibimbing supaya struktur sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik tidak diterima begitu saja, tetapi justru dipersoalkan, pendidikan menolong peserta didik mengkritik kenyataan struktural yang tidak adil. Perlu dipahami bahwa pendidikan kritis itu merupakan revolusi teori dan praktik dalam pendidikan. Sehingga di sini perlu dikemukakan beberapa ciri-ciri umum pendidikan kritis, di antaranya sebagai berikut.

1. Adanya Dialog

Berdasarkan pemikiran para tokoh pendidikan kritis, dialog merupakan prinsip utama dalam pendidikan. Tanpa berdialog manusia tidak dapat mewujudkan dirinya. Manusia tidak dapat beremansipasi, baik terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain, apalagi terhadap dunia yang luas. Pendidikan pembebasan hanya dapat terwujud apabila terjadi dialog dengan dirinya sendiri melalui proses penyadaran. Kemampuan berdialog menuntut kemampuan pemahaman dan tindakan melalui kritisisme terhadap realitas. Realitas yang dihadapi dan yang dipahami adalah realitas yang membutuhkan demokrasi, yaitu memahami kemungkinan-kemungkinan dan hambatan yang ada di dalam lingkungan, maka segala ketidakadilan yang menghambat emansipasi individu tidak dapat diketahui. Seperti yang telah dijelaskan, teori tindakan revolusioner bersumber dan lahirnya kesadaran. lnilah fungsi pemberdayaan yang terkenal itu (*empowerment*).[260] Dialog dengan realitas

---

[258]*Ibid*.

[259]Mustafo Rembagy, *Op.Cit*., hlm. 107.

[260]*Ibid*., hlm. 104. Bandingkan dengan Harsono, *Model-Model Pengelolaan Perguruan Tinggi* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 156.

akan menghasilkan sikap kritis manusia atau peserta didik (siswa atau mahasiswa) apabila sudah diperolehnya kesadaran kritis dalam dirinya sehingga mampu membaca dan menganalisis dengan kesadaran kritis. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Shaffaat/37: 102.

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰىۗ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

Terjemahnya:

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar".

Proses dialog juga ditunjukkan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".[261]

Kandungan ayat di atas, menurut penulis bahwa Allah Swt. meminta pendapat kepada hamba-hamba-Nya, hal ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. mengajarkan sifat berdialog dalam urusan mereka sebelum dikembangkan atau diterjemahkan dalam aktivitas kerja praktisnya, maka dialog sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

[261]Departemen Agama, RI., *Op.Cit.,* hlm. 12.

2. Adanya Konstruksi Sosial Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan tidak hanya sekadar didapatkan dan tempat belajar yang terbatas atau ruang kelas, tetapi juga dan bangunan sistem sosial yang beraneka ragam (plural), multi karakter, multi etnis dan lain sebagainya. Manusia dilahirkan memiliki sejarah yang berbeda-beda, mulai dari proses kandungan, semasa dalam kandungan, hingga lahir, mereka memiliki posisi sosial yang berbeda-beda. Di sinilah letak sesungguhnya sumber ilmu pengetahuan.[262] Jenis pengetahuan emansipatoris merupakan jembatan antara ilmu pengetahuan teknis dengan praktis. Ilmu pengetahuan emansipatoris membantu manusia untuk mengetahui mengenai hubungan-hubungan sosial (*social relationship*), misalnya manipulasi terhadap hubungan-hubungan kekuasaan dan hak-hak istimewa dan suatu golongan. Demikian pula jenis pengetahuan akan membawa pengertian pada hal-hal yang irasional, dominasi kelas, dan penindasan, sehingga dapat mengetahui bagaimana mengatasinya. Dengan singkat, jenis pengetahuan emansipatoris merupakan dasar dan keadilan sosial, persamaan dan pemberdayaan.[263]

3. Adanya Pendidikan dan Perjuangan Politik

Ada anggapan bahwa pendidikan tidak memiliki sasaran puncak atau tujuan tertinggi selain tujuan pendidikan itu sendiri, yakni memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik sehingga ía dapat mengembangkan dan menyesuaikan kehidupan dirinya baik secara pribadi, dalam masyarakat, warga negara bahkan sebagai

---

[262]Contohnya, seorang siswa yang berbeda-beda tempat tinggalnya, ada yang jauh dan ada juga yang dekat. Di samping itu, pada siswa yang berdomisili beraneka ragam tersebut ketika berangkat ke tempat belajar tertentu, akan membawa pengalaman-pengalaman yang berbeda. Adanya hubungan sinergis tukar pengalaman sesama, maka pengetahuan akan didapat oleh siapa pun. Ilmu pengetahuan tidaklah terbatas pada ruang yang sempit, seperti ruang perpustakaan, ruang kelas. Realitas mi menjadi penting untuk dikenalkan kepada peserta didik karena sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kelas belajar justru sangat bertentangan dengan kondisi inl yang terjadi di masyarakat. Lihat Neil Postman, *The End of Education: Redenifing the Value of School* (Cet. I; New York: Vintage, 1995), hlm. 29.

[263]Musthofa Rembagy, *Op.Cit.,* hlm. 106.

anggota masyarakat. Dalam perspektif pendidikan transformatif, yang bermula dari tradisi kritis bahwa pendidikan sebagai jalan menuju pencapaian tujuan yang terletak di luar proses pendidikan itu sendiri. Bagi Aristoteles, pendidikan adalah untuk membantu mencapai kehidupan yang lebih baik, kebahagiaan, keadaan yang final. Bukan hanya pendidikan yang menjadi penopang upaya mencapai tujuan itu.

Aristoteles mencanangkan tujuan yang sama bagi kegiatan-kegiatan lain yang bersifat politis. Anggapan bahwa pendidikan adalah cara atau alat menyebabkan diaturnya unsur-unsur pendidikan mengikuti arus zaman dan tempat, seperti kini pendidikan dianggap sebagai cara mencapai penyesuaian sosial, mencapai profesi yang memadai, atau mencapai kepemimpinan dalam masyarakat.[264]

Pendidikan merupakan media untuk melakukan demokrasi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, demokrasi dalam memperjuangkan sistem sosial yang tidak adil, tidak humanis, dan sistem yang bertentangan jauh dengan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan diharapkan mampu menjadi garda depan memperjuangkan sistem sosial yang mapan sekarang, Peran hegemoni negara terhadap berbagai aspek kehidupan manusia merupakan sasaran perjuangan bagi pendidikan kritis. Dalam aspek yang kecil praktik pendidikan yang sedang berjalan tidaklah terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang tidak akomodatif, pluralis dan emansipatoris. Pendidikan sendiri diorientasikan secara teknis dan praktis dalam mempersiapkan lulusannya demi kepentingan politik pasar. Tuntutan *stakeholders* (masyarakat), tuntutan profesional, dan semacamnya menandakan bahwa selama ini pendidikan semata-mata diorientasikan pada persoalan yang pragmatis dan materil. Nasib pendidikan bagi rakyat miskin yang semakin terpuruk bukanlah kehendak mereka melainkan korban sistem yang telah merampas hak-hak politik mereka secara kurang wajar. Amanat UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, poin (1), mengemukakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural dan kemajemukan bangsa.[265]

---

[264]Ivan Illic, dkk., *Mengugat Pendidikan* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 419.

[265]UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3.

Dengan demikian, sistem pendidikan akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, pluralis dan humanisme, dengan menghargai hak-hak politik masyarakat yang beranekaragam karena memperoleh pendidikan yang bermutu adalah hak bagi warga negara, meskipun mereka berada di daerah terpencil atau terbelakang sekalipun.

4. Adanya Pendidikan Untuk Pembebasan

Upaya pendidikan yang diselengarakan harus berprinsip pada pendidikan sebagai media melakukan pembebasan, membebaskan kelompok masyarakat yang selama ini tertindas atau membebaskan kelompok masyarakat yang menindas. Manusia adalah makhluk yang bebas dan tidak ada pihak lain pun yang bisa menghalangi kebebasan mereka untuk berekspresi, aktualisasi, menyalurkan pendapat, dan sejenisnya. Membebaskan masyarakat sekitar yang tengah dibelenggu oleh sistem sosial yang hegemonik yang mengakibatkan kreativitas dan sikap kritis mereka terancam, baik secara internal dunia pendidikan sendiri maupun dalam konteks melakukan demokrasi di masyarakat.[266]

Prinsip pendidikan sebagai arena pembebasan bukan hanya pada wilayah pendidikan secara internal, dalam konteks global, pendidikan harus mampu mengawal secara kritis manusia global sekarang yang sedang mengalami tantangan karena adanya arus globalisasi. Di samping itu, fenomena kemiskinan, masyarakat korban bencana alam, masyarakat terpencil yang susah dalam mengakses informasi dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dalam menjalankan prinsip tersebut.[267]

Pendidikan dalam konteks tersebut mendapat sebuah tantangan serius untuk mempertahankan eksistensinya sebagai wahana peneguhan kemanusiaan. Sebab ternyata pendidikan oleh sebagian orang lebih dipahami sebagai wadah demi mengakumulasi kepentingan kapital dan mendapatkan keuntungan. Suatu hal yang sangat ironi, betapa sebuah visi kemanusiaan pendidikan yang sudah dibangun berabad-abad selama ini, dengan begitu cepat digantikan oleh sebuah visi yang

---

[266] Musthofa Rembagy, *Op.Cit.,* hlm. 109.

[267]Lihat Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan* (Cet.III; Yogyakarta: Insit, 2006), hlm. xi. Lihat pula Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme* (Cet. I; Malang: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 76-77.

meletakkan pendidikan sebagai komoditi. Mungkin kita bertanya apa yang mendorong terjadinya komoditisasi pendidikan?[268]

Dari realitas di atas, peran pasar begitu besar dalam menentukan segala segmen kehidupan manusia, maka peran pendidikan betul-betul teruji sebagai wahana pembebas dan peneguhan kemanusiaan. Namun kenyataannya cukup memprihatinkan bahwa pendidikan juga ikut dalam lingkaran *dehumanisasi*. Ideologi kapitalis selanjutnya diinternalisasi oleh pendidikan dalam kerja-kerja sejak dalam kurun waktu yang cukup lama dan berimplikasi terhadap kaburnya visi perjuangan pendidikan menuju penegakan dan perjuangan hak asasi manusia, serta pendidikan tidak lagi menjadi instrumen pembebas bagi kaum tertindas. Peserta didik tidak lagi bisa menaruh harapan besar terhadap peran transformatif pendidikan yang telah jatuh dalam internalisasi ideologi kapitalis. Pendidikan telah berbalik menjadi momok bagi masyarakatnya sendiri, pendidikan sudah kering dari perjuangan kemanusiaan, yakni dalam menolak dan menentang segala realitas yang dehumanis, sebaliknya pendidikan telah berubah wajah menjadi wadah demi mengakumulasi modal.

Dalam kerangka menciptakan model pembelajaran transformatif yang berwawasan masa depan dalam konteks global, tentunya adanya rekonstruksi watak komponen-komponen pembelajaran yang ada, di antaranya:

a. Pembelajaran Kritis dan Kreatif

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan, di antara implementasinya adalah

---

[268]Distorsi peran pendidikan, sebagai wahana peneguhan kemanusiaan. melalui sebuah proses komoditisasi bermula sejak adanya kesepakatan GATT, di mana dunia 'secara global telah memihak pada kepentingan pasar, hal itu dilakukan demi membuka peluang bagi *Trans National Corporations (TNCs)* untuk ekspansi. Salah satu tujuan mereka adalah bagaimana mempengaruhi kebijakan negara-negara selatan untuk melincinkan jalan bagi TNCs untuk beroperasi. Mekanisme dan proses Globalisasi yang diperjuangkan oleh para aktor utama globalisasi, yakni TNCs, Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di WTO, sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai jika melalui "Kompetisi Pasar Bebas" Lihat pula Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia ketiga* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1-2.

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, meski paradigma lama pembelajaran masih mendominasi model pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oleh karena itu, dalam kerangka pencarian model pembelajaran masa depan perlu dimunculkan percikan ide-ide untuk model pembelajaran yang lebih kritis dan kreatif". Kritis ini berhubungan era dengan pola pikir yang digunakan oleh subjek pembelajaran karenanya guru atau dosen adalah pembimbing, fasilitator, motivator, dan penggerak menuju belajar dialogis dan merumuskan sistem yang lebih baik. Oleh karena itu, peserta didik atau mahasiswa adalah subjek aktif, teman belajar, dan individu yang memiliki berbagai pengalaman. Sementara yang dimaksud dengan kreatif, ialah berupaya mencari nilai-nilai yang relevan untuk mencari makna pembelajaran yang semakin membaik. Oleh karena itu, guru dituntut daya kreativitas yang tinggi dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan dengan model pembelajaran yang ada.[269]

Proses pembelajaran merupakan jendela dunia. Karena dengan belajar orang bisa mengetahui banyak hal, oleh sebab itu Islam amat menekankan masalah belajar. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Zumar 39: 9:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.[270]

Jawaban pertanyaan Allah ini bisa ditemukan dalam Q.S. Al-Mujadalah/58: 11

[269]H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam demokrasi pendidikan nasional* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 32.

[270]Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 891.

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[271]

Nabi Muhammad Saw. sangat mendorong supaya belajar dengan memberikan contoh-contoh praktis dan dengan lisan dan perbuatan. Beliau telah membebaskan para tahanan dari kaum kafir yang terpelajar, apabila mereka dapat mengajar beberapa orang Muslim untuk membaca dan menulis. Ini bertanda bahwa Rasulullah Saw. berkeinginan keras supaya pendidikan merata di kalangan orang Islam.[272]

Dalam konteks ini, proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses untuk dapat memecahkan masalah (*problem solving*). Untuk hidup, manusia memerlukan kemampuan untuk melihat dunia secara nyata yang penuh dengan masalah yang harus dipecahkan. Untuk hal tersebut diperlukan kemampuan menganalisis, mencari jalan mengatasinya, serta mencoba cara-cara pemecahan yang telah dirumuskan (*trial and error*). Pengalaman tersebut diperoleh jalan yang paling tepat dalam upaya pemecahan masalah.[273] Pemecahan masalah ini dalam implementasinya, bukan kembali pada tatanan yang seperti semula, namun berupaya menciptakan sistem baru yang lebih baik. Sistem pembelajaran yang baik, sistem sosial masyarakat yang ideal sehingga dalam hal ini dibutuhkan kerja sama oleh seluruh komponen masyarakat.

b. Mengubah Watak Subjek dalam Pembelajaran

Melihat kondisi masyarakat saat ini dan beberapa kemungkinan mendatang yang begitu menantang arus komunikasi dan teknologi yang telah mengglobal sehingga menuntut masyarakat berpikir futuristik dan

---

[271]*Ibid.*, hlm. 325.

[272]Abuddin Nata dkk. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 116.

[273]Mochtar Bukhori, *Pendidikan Antisipatoris* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 25.

kreatif sehingga dalam dunia pendidikan posisi dan peran pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran sangat menentukan. Oleh karena itu, dibutuhkan subjek pembelajaran yang memiliki watak masa depan dan meninggalkan pola pikir lama yang menghambat perkembangan kualitas proses pembelajaran. Dosen mau tidak mau harus meninggalkan peran otoriternya di dalam proses pembelajaran dan peserta didik harus memiliki kesadaran kritis dalam memahami secara komitmen bahwa dirinya adalah subjek pembelajaran yang aktif.[274]

Proses pembelajaran diarahkan pada subjek pendidikan menuju pendewasaan, bersikap kritis, mencari solusi terhadap masalah, dan secara serius menuju penciptaan sistem alternatif, dan lain sebagainya. Menurut paradigma lama, dosen adalah maha tahu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas sehingga watak tersebut harus diubah menjadi dosen sebagai sosok yang bisa salah, bukan sosok yang otoritatif. Dalam sisi profesionalitas, kebebasan profesional seorang dosen untuk memilih bahan pelajaran yang akan disampaikan di kelas harus dihargai semua pihak. Tanpa adanya kebebasan profesional, suasana pendidikan yang demokratis, plural dan kreatif sebagaimana yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional tidak akan terwujud dan model pendidikan di sekolah bakal stagnan dan tidak berkembang.[275]

Menurut Tilaar, peserta didik diharapkan dapat berpikir reflektif, transformatif, dan terus-menerus akan sesuatu yang lebih benar dan tepat. Karena itu, fokus dan proses pendidikan ini bukan untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi semata, tetapi juga untuk menguasai hubungan-hubungan antara pelajaran (fakta-fakta, mata pelajaran) yang sedang dipelajari atau diteliti.[276] Dengan demikian, proses pendidikan adalah proses untuk terus-menerus bertanya dan mencari keputusan mengenai fakta-fakta yang ditemukan.

c. Sumber Pembelajaran

Menurut pandangan Muchtar Bukhori, bahwa sistem pendidikan yang sehat selalu berusaha memahami zamannya dan berusaha pula

[274]H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 380.

[275]*Ibid.*, hlm. 381.

[276]*Ibid.*, hlm. 382.

memenuhi tuntutan-tuntutannya.[277] Setiap sistem pendidikan yang dewasa selalu berusaha mempersiapkan masyarakat yang dilayaninya mengembangkan wawasan-wawasan baru untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan yang akan datang. Interaksi universitas dengan masyarakat seperti ini akan melahirkan watak yang dinamis pada sistem pendidikan. Dinamika ini tercermin pada perubahan-perubahan yang terjadi dan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem pendidikan. Berbagai wawasan sekarang dan masa depan yang perlu diakomodasikan dalam proses pembelajaran, terkait erat dengan sumber pembelajaran atau sumber ilmu pengetahuan itu sendiri.[278]

Fakta sosial termasuk peristiwa-peristiwa kemanusiaan dalam konteks global yang dapat diakses melalui pengalaman langsung, media cetak, media elektronik, internet, dan lain sebagainya yang semuanya merupakan sumber pembelajaran sangat penting untuk kemudian dikaji dan diteliti secara mendalam sehingga tercipta solusi-solusi bagi masa depan masyarakat tersebut. Pertama-tama, tentunya proses belajar tidak terpaku pada buku-buku teks saja, tetapi juga melibatkan pengalaman-pengalaman langsung. Belajar sambil berbuat adalah paradigma yang tepat untuk proses pembelajaran yang demikian. Sejalan dengan hal itu, proses pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis dan kreatif berpusat pada kebutuhan belajar peserta didik, dan bukannya terikat pada jam pelajaran yang telah diatur di dalam kurikulum oleh para birokrat.

Selanjutnya, proses pembelajaran yang demikian minimal kemampuan pendidik sebagai "manajer-manajer" proses belajar. Pendidik bukanlah polisi pengawas di dalam kelas, tetapi sebagai fasilitator. Pendidik berada di dalam posisi yang sama dengan peserta didiknya, yakni mencari kebenaran yang terus-menerus berkembang.

Pendidikan berbasis demokrasi dalam Al-Qur'an tidaklah dibangun dengan kerangka berpikir dikotomis antara ayat Allah Swt. yang verbal berupa Al-Qur'an dan ayat-ayat Allah Swt. yang nonverbal berupa hamparan alam semesta dan gejalanya. Oleh karena itu, dalam membangun paradigma pendidikan transformatif (dalam tulisan ini) tidak perlu dimulai dari nol, tetapi dapat dimulai dengan memanfaatkan

[277]Mochtar Bukhari, *Op.Cit.,* hlm. 26.
[278]*Ibid.*

teori-teori kritis, termasuk teori kritis Barat dengan saling menguji, saling berdialog, saling merevisi, dan saling memodifikasi antara keduanya. Hal ini berdasarkan pada pemahaman adanya dua ragam tanda ayat Tuhan yang perlu diketahui. *Pertama*, tanda ayat-ayat yang bercorak linguistik verbal dan menggunakan bahasa insani (bahasa Arab-bahasa Qur'ani). Kedua, tanda-tanda (ayat-ayat) yang bercorak nonverbal berupa gejala-gejala alami.[279] Keduanya diturunkan Allah Swt. untuk manusia agar manusia dapat menelaah dan memahaminya. Kedua ayat itu menduduki posisi yang sama sebagai sumber inspirasi dalam membangun pendidikan transformatif yang merupakan elemen dasar kepemimpinan pendidikan transformatif dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an, semangat perubahan (revolusi) termasuk transformasi dapat dijumpai dalam beberapa ayat yang menceritakan para nabi dan Rasulullah yang revolusioner, semisal cerita Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah Muhammad Saw. dan dalam beberapa ayat yang tertera lafaz *al-Hijrah*, *al-Jihadu*, dan *al-Fatihu*. Beberapa lafaz lainnya, semacam *al-Rafiu, al-Baits*, dan sebagainya.[280] Berangkat dari identifikasi ayat-ayat yang mempunyai semangat transformasi dengan kata-kata kunci seperti di atas, penelitian ini dilakukan guna menemukan paradigma pendidikan transformatif dari Al-Qur'an.

Dengan demikian, pendidikan transformatif dalam perspektif Islam, maka sangat mungkin diperlukan adanya penggalian ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad Saw., dan hal ini sudah dicontohkan oieh beberapa intelektual Muslim/ulama. Membangun paradigma pendidikan transformatif dan Al-Qur'an dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan, mengidentifikasi elemen-elemen yang berkaitan dalam ayat tersebut, dan memformulasikan paradigma dengan berdasar pada elemen-elemen yang terbangun sebelumnya.

Dalam bentuk yang moderat, transformasi pendidikan menjanjikan multikulturalisme. Multikulturalisme memuat banyak kelebihan,

---

[279]Tobrani, *Pendidikan Islam Paradigma Teologis, Filosofis dan Spritualitas* (Cet. I; Yogyakarta: UMM, 2009), hlm. 81.

[280]Ihoshihiko Izutsu, *God and Man in The Koran: Semantic of The Koranic Weltanschaung* (Tokyo: The Keiko Institute of Cultural and Linguistics, 1964), hIm. 133.

baik secara etis maupun praktis. Pendidikan transformasi sosial, pada akhirnya adalah pengakuan pada adanya multi-rasionalitas, multi-etnis, multi budaya, multi-agama, dan sebagainya. Dengan begitu, setiap klaim rasionalitas perlu dibarengi kecurigaan. Apalagi, rasionalitas dan kultur besar yang kuat selama ini cenderung mengklaim diri sebagai "universal"[281] dan mengindoktrinasikan diri kepada kaum pinggiran. Dalam arti ini, salah satu nilai lebih dari pendidikan transformasi sosial adalah mendorong terjadinya konstruksi sosial dengan gegap-gempita menawarkan pembebasan.

Dengan pemikiran seperti ini, pendidikan transformasi sosial mengingatkan peserta didik akan berbicara tentang moralitas, realitas dan pengetahuan sebenarnya dalam pergumulannya dengan persepsi-persepsi yang antropologis. Kesungguhan hanya bersifat lokal, partikular, komuniter, primordial dan parokial. Lebih lagi transformasi sosial yang ditimbulkan oleh *incommensurability* pun sama sekali tidak menganjurkan adanya benturan peradaban. Sebaliknya, yang dianjurkan ialah toleransi dalam bentuk norma "*noncruelty*" antarmanusia dan dengan demikian juga antarperadaban.

Artinya, biarkan setiap komunitas hidup dengan wacana lokal dan dengan rasionalitas lokal masing-masing yang selama ini sudah berjalan sebagai bentuk kehidupan yang diakrab menjadi tradisi. Pada tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan penyesuaian budaya atau dialog budaya dalam pengalaman individual maupun kelompok.[282]

Di dalam visi dan misi kehadiran Islam, yaitu sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah. Hal ini dapat diambil adanya semangat universal (ketercakupan keseluruhan dengan rahmat) sehingga dapat beradaptasi dengan setiap bangsa dan waktu. Semangat untuk mentransformasikan rahmat, haruslah tidak terikat dengan polarisasi-polarisasi yang telah tercipta oleh kreasi manusia, semisal harus melampaui sekat-sekat politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama.

---

[281]Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Tradisional, Liberal, Marxis Sosialis, dan Postmodern* (Cet. I; Yogyakarta: Arruzz Media, 2010), hlm. 191.

[282]Implikasi inilah yang merupakan bukti adanya epistemologi relasional dalam kritis transformatif tidak seperti perdebatan rasionalisme dan empirisme yang tak kunjung selesai. Lihat *Ibid*.

BAB 5

PENUTUP

Dengan adanya buku ini, diharapkan untuk menepis problematika, serta menjawab permasalahan utama seputar antisipasi pendidikan Islam, dalam menyahuti realitas sosial di tanah air, dalam rangka pembangunan bangsa yang sadar tentang demokrasi. Untuk menjawab *problem* utama tersebut, telah dikemukakan uraian-uraian terkait secara panjang lebar, yang esensinya tertuang dalam beberapa rumusan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, dalam perspektif pendidikan, telah disepakati bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar peluang seseorang untuk meningkatkan kualitas daya saing mereka. Beberapa ahli memandang, pendidikan bukan hanya sebagai variabel tertentu munculnya SDM yang berdaya saing tinggi, tetapi juga ikut menentukan terjadinya perubahan sosial *(al-Tagayyur al-Ijtima'i al-ijabi)*. Sebagaimana rekomendasi para pakar bahwa pendidikan sangat berperan dalam pembentukan kelas profesional, sebuah lapisan masyarakat yang menjadi sumber utama bagi tersedianya perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kultural.

Selanjutnya dalam situasi reformasi sekarang ini, kita perlu melakukan redefinisi terhadap sumber daya manusia yang kita inginkan. Permasalahannya karena definisi mengenai sumber daya manusia selama ini sangat dipengaruhi oleh politik dan ideologi Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang berlangsung selama tiga dekade, membangun legitimasi

kekuasaan atas dasar pertumbuhan ekonomi. Makna pembangunan lalu tidak lebih dipahami sebagai upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar atau terarah, memusat, sehingga efeknya menimbulkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Orde Baru lalu mengemas strategi modernisasi dengan mengorganisir masyarakat secara korporatis, melakukan pengendalian birokrasi secara ketat sehingga semua kebijakan dikendalikan dari satu pusat kekuasaan. Ia membangun sebuah ideologi *developmentalisme*, dengan melakukan praktik politik yang menopang pertumbuhan ekonomi, rasionalisme, ketertiban, stabilitas, efisiensi, dan efektifitas serta keahlian praktis. Pengaruh ideologi *developmentalisme* seperti itu, meski diketengahkan konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka praktik definisi SDM, kemudian lebih dipahami sebagai alat produksi. Dengan definisi seperti itu, maka pengembangan SDM sebagai *human capital*, dan dipahami sebagai permainan manajemen canggih.

Atas dasar pemikiran itu, maka reduksi atas pemahaman SDM harus dapat dihindari dengan memberikan aspirasi yang proposional terhadap aspek moralitas. Pendidikan dengan demikian harus menopang, sehingga tidak boleh direduksi sekadar *transfer of knowledge and technology,* melainkan lebih bermakna sebagai transformasi kemanusiaan yang lebih utuh. Profesionalisme, rasionalisme, efektivitas, dan efiesiensi adalah watak dan sikap yang kita butuhkan. Akan tetapi, moralitas dan integralitas kepribadian juga diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang lebih memahami makna akan tanggung jawab sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari sebuah negara. Dan tanpa keduanya, maka akan muncul krisis total.

Akhirnya harus disadari bahwa akar malapetaka ini adalah filsafat pendidikan materialisme dan alam pikiran humanisme-antroposentrisme yang menafikan kehadiran agama dan spiritualisme. Filsafat tersebut memang merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat modern sejak Eropa Barat memasuki babak pencerahan pada abad ke-16 dan kemudian diikuti oleh revolusi industri dan informasi pada millenium ketiga sekarang. Filsafat tersebut bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti individualisme, kebebasan dan kesamaan yang hanya berakibat pada manusia.

Demokrasi sesungguhnya merupakan istilah politik yang berarti suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal; Pertama, pemerintahan dari rakyat. Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat, artinya bahwa dalam demokrasi rakyat yang berdaulat.

Demokrasi dalam sejarah bukanlah merupakan hasil pengalaman kemanusiaan yang sekali jadi. Akan tetapi, ia merupakan produk perkembangan sosial budaya dalam rentang waktu beribu-ribu tahun. Paling tidak terbentuk dari empat sumber gagasan dan praktik. Yaitu tradisi demokrasi Yunani Kuno, tradisi republikanisme yang berasal dari Romawi Kuno dan berkembang dalam negara-negara kota Italia pada abad pertengahan dan paham perwakilan, serta renaisains. Sistem tersebut menjadi pola penerapan demokrasi di Indonesia, sehingga Indonesia pun mempunyai alur periodesasi sejarah politik, yaitu apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), pemerintahan parlemen *(representative demokracy)* (1950-1959), Pemerintahan Orde Lama atau demokrasi terpimpin (1959-1966) pemerintahan Orde Baru (Demokrasi Pancasila) (1965-1998), dan Reformasi (1999-sekarang).

Demokrasi juga terjemahan dan kongritisasinya tidak hanya ada di dalam kehidupan politik. Seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan masyarakat luas dan berada dalam sistem kenegaraan membutuhkan demokrasi, karena manusia sebagai hamba Allah butuh dimanusiakan dan dimanusiawikan, sedangkan demokrasi adalah ungkapan lain dari penghormatan hak-hak asasi manusia, di mana sikap hidup manusia yang mencerminkan dimiliki dan ditegakkannya peradaban dan kebudayaan. Dalam demokrasi pendidikan dapat diketahui bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran tanpa harus dibedakan apakah individu itu berada pada tingkatan kelas bawah, menengah, dan atas. Masing-masing mempunyai hak otonomi untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui bidang pendidikan.

Di dalam pendidikan Islam khususnya, mempunyai prinsip-prinsip tersendiri, yaitu; prinsip tauhid, persamaan dalam sebuah wacana

keterbukaan yang sering dikenal dengan *syra*, dan konsep tentang kewajiban dan hak manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pendidikan yang berbasis demokrasi merupakan kebebasan dan kemerdekaan individu di atas norma keseimbangan antara diri pribadi dan orang lain dengan dua segi. Pertama, kebebasan dan aktivitas individu harus berjalan dalam keadaan terkontrol sehingga individu itu terlindung dari tipuan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat (sosial)-nya. Kedua, kebebasan berpikir dan beraktivitas bagi setiap individu manusia hanya akan melahirkan manusia individualis. Karenanya, aktualisasi itu tidak hanya menuntut daya kebebasan, tetapi juga memerlukan kebersamaan dalam *ikhtil±f* sehingga identitas masing-masing, manusia tidak merasa adanya sikap super atas dirinya.

Dalam tesis ini pula penulis menyoroti tanggung jawab-tanggung jawab pendidikan yang tersirat dalam cita-cita demokrasi. Dan berusaha menunjukkan bagaimana kebebasan, individualistas, dan persamaan hak berhubungan dengan disiplin, otoritas, serta keunggulan. Di sinilah letak makna pendidikan bagi praktik demokrasi.

Para mahasiswa atau murid yang sangat tidak bahagia dalam proses pendidikan adalah mereka yang mendapati dirinya dalam suatu suasana yang lamban, di mana mereka tidak bisa mempelajari apa pun. Sementara itu, paling bahagia adalah mereka yang mengalami kesenangan karena mereka berhasil mengantisipasi rintangan-rintangan intelektual yang besar. Kesenangan dan ketenteraman memang bisa menimbulkan kebosanan, namun tantangan bagi setiap pendidikan ialah menimbulkan perhatian, minat, dan kegembiraan dalam belajar.

Singkatnya, kesuksesan suatu komunitas demokratis banyak bergantung pada pemahaman dan kemampuan para masyarakat (warga negara). Kemampuan dan pemahaman ini akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan bagi warga negara itu dilakukan. Dalam dunia yang kompleks di tempat kita menjalani kehidupan dan ditempat kita memperoleh pemahaman dan kemampuan yang cukup, memerlukan suatu pendidikan yang keras, disiplin, teliti, dan tepat. Apabila kita gagal menyediakan dan menyelenggarakan pendidikan seperti itu, mungkin kita akan menyalahkan diri sendiri karena lembaga pendidikan kita kebekuan intelektual, dan bukan memberi sumbangan pada suatu masyarakat yang lebih bersemangat dan kreatif yang lebih mendapat penerangan dan pencerahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sirry, Mun'im. 2002. *Dilema Islam Dilema Demokrasi; Pengalaman Baru Muslim dalam Transisi Indonesia,* Cet. I. Jakarta: PT. Gugus Press.

A. Ubaidillah, dkk. 2010. *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani,* Cet. I. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

Abd al-Aziz, Shalih. 1979. *Al-Tarbiyah wa Thuruq al-Tadris*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

Abdullah, Abdurrahman Saleh. 2004. *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an,* Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta.

Afandi, Arif. 1996. *Islam Domokrasi Atas Bawah,* Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Affandi, Idrus. 1998. *Ilmu Tata Negara,* Cet. I. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Ahmad bin Fairis bin Zakariyah, Aboi al-Husain. 1391 H/1971 M. *Maq±yis al-Luqah,* Juz III. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Abrasyi. 1992. Atiyah *Attarbiyatul Islamiyah,* Cet. I. Beirut: Dar al-Syamiyah.

Al-Abrasyi, Muhammad Athiat. t.th. *Ruh Al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*. t.t: Isa al-Babi al-Halawi.

Al-Asfahani, Al-Raqhib. 1992. *Minfradit Alfaz al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Atta, Syid Muhammad Naquid. 1996. *The Concept of Education in Islam a Frame Work for an Islamic Philosophy of Education,* diterjemahkan oleh Haidar Baqir dengan judul *Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Fikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam,* Cet. II. Bandung.

Al-Buthi. 1961. *Tajribah al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Miyan al-Amal*. Damsyik: Maktabah al-Umayyah.

Al-Jamaly, Muhammad Fadhil. 1986. *Filsafat Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Surabaya: Bina Ilmu.

Al-Nahlawi, Abdur Rahman. 1979. *Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha*. Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Qardhawy, Yusuf. *al-Ijtihad fi al-Syariat al-Islamiyyah ma'a Nazaratin Tahliyyatin fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, diterjemahkan oleh Ahmad Syathori dengan judul: *Ijtihad dalam Masyarakat Islam*: *Beberapa Pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer.* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987 Luwis Ma'luf, *al-Memjid fi al-Lugat*. Beirut: Dar al-Masriq, 1986.

Al-Taom³ al-Sya'ban³, Omar Mu¥ammad. 1979. *Falsafah al-Tarbiyat al-Islam³,* diterjemahkan oleh Hasan Langulung dengan Judul *Falsafah Pendidikan Islam*. Cet. I. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Zuhaily, Wahban. 1969. *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*. Damasyqi: al-Matba'at al-Ilmiyyat.

AM, Saefuddin. 1996. *Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.

Anis, Ibrahim. 1972. *At al-Mu'jam al-Wasit Juz I,* Cet. II. Istambul: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Arifin, Syamsul dan Barizi, Ahmad. 2001. *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi,* Cet. I. Malang: UMM Press.

Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar Praktek,* Cet. VII. Jakarta: Rineka Cipta.

Arsyad, Azhar. 2003. *Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya; Beberapa Pokok Pikiran*, Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ashraf, Ali. 1993. *Horison Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Azhar, Muhammad. 1997. *Filsafat Politik; Perbandingan antar Islam dan Barat,* Cet. II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azra, Azyumardi. 2001. *Pendidikan Islam Tradsisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Cet. III. Kalimah.

Bahreisy, Salim. t.th. *Petunjuk Kejalan Lurus*. Surabaya: Assegaf.

Battle, J. A. 1986. *The New Ideal of Education*. New York: Harper & Row Publisher.

Batubara, Cosmas. 1994. *Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: (BP-7) Pusat.

Bawani, Iman. 1987. *Segi-Segi Pendidikan Islam*. Surabaya: al-Ikhlas.

Buchori, Muchtar. 1994. *Pendidikan dan Pembangunan*, Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana.

D. Marimba, Ahmad. 1989. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. VIII. Bandung: Ma'arif.

Dahll, Robert A. 2001. *On Demokrasi* diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, *Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Cet. Jakarta: Yayasan Ober Indonesia.

Daradjat, Zakiyah. 2000. *Ilmu Penndidikan Islam,* Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara.

————————. 1987. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Daud, Muhammad. 2006. *Pendidikan Agama Islam,* Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo.

Departemen Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Intermasa.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewan Redaksi. 1984. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.

Dewan Redaksi. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid. IV.* Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

Djuwaidi, M. Irsyad. 1998. *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, Cet. I. Jakarta; Yayasan Karsa Utama Mandiri.

Eberstain, Willian. 1960. *Great Political Tbinkers Plato to The Present, Third Edition*. New York: Holt, Renehart and Wiston.

F. Steingass. 1978. *Arabic-English Dictionary*. India: Cosmo Publication.

Fadjar, A. Malik dan Muhadjir Efendy. 1991. *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan*, Cet. I. Jakarta: P3UMM.

Fathurrahman. 1986. *Sistem Pendidikan Versi al-Ghazali*. Bandung: al-Ma'araf.

Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Freire, Paulo. 2000. *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasan dan Pembebasan,* Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

————————. 2001. *Sekolah Kapitalisme yang Licik,* Cet. III. Yogyakarta: Lkis.

Gaffar, Affan. 2002. *Politik Indonesia Menuju Demokrasi,* Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gautama, Sedarta dan Boediono, Aris. 1999. *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih,* Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Getteng, Abd. Rahman. 1997. *Pendidikan Islam dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Yayasan Ahkam.

Ginanjar, Ary. 2001. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual*. Jakarta: Arga Publishing.

Gunawan, Heri. 2014. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Cet. I. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

H.M. Arifin. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haroen, Nasrum. 1997. *Usul Fiqh 1,* Cet. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hassan, Sahar L. 1998. *Memilih Partai Islam,* Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.

Ibnu Zakariyyah al-R±ziy, Abi al-Husain Ahmad Ibnu Faris. 1999. *Mu'jam Muqayis al-Lugah,* Jilid I, Cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Jamiyyah.

Indra Djati Sidi, Zainuddin. *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*.

Indrakusuma, Amir Daien. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan: Sebuah Tinjauan Teoritis Filosofis*. Surabaya: Usaha Nasional.

Ishak, Hj. Baego. 1998. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Teknik,* Cet. I. Ujungpandang: CV. Berkah Utami.

Ismail SM. dkk. 2001. *Dinamika Pesantren dan Madrasah* dalam buku Nurul Huda, *Madrasah Sebuah Perjalanan untuk Eksis,* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jalal, Abd al-Fattah. 1988. *Min Usul al-Tarbiyah fi al-Islam,* diterjemahkan oleh Henry Noer Ali dengan judul *Azas-Azas Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Diponegoro.

Jalaluddin. 1996. *Filsafat Pendidikan Islam: Konsep Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jamaluddin. 2001. *Teologi Pendidikan,* Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

K.G. Saiyidain. 1981. *Percikan Filsafat Iqbal Mengenai Pendidikan*. Bandung: CV. Diponegoro.

Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, Cet. I. Jakarta: Gaya Media.

Karim, M. Rusli. 1991. *Pendidikan Islam sebagai Upaya Pembebasan Manusia, dalam Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta,* Cet. II. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Koentjaraningrat. 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* Cet. XI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Koesoema, Doni. 2010. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.

Langgulung, Hasan. 1995. *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Cet. II. Bandung: al-Ma'arif.

————————. 1986. *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husnah. Hlm. 67.

Lopa, Baharuddin. 1999. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,* Cet. I. Jakarta: PT. YARSIF WATAMPONE.

M, Arifin. 2001. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teroritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisip Linear,* Cet. V. Jakarta Bumi Aksara.

M. Chan, Stevan. 2002. *Education and The Democratic Ideal* diterjemahkan oleh Abdul Munir Mulkhan dan Umi Yawisah, *Pendidikan Liberal Berbasis Sekolah*, Cet. I. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Maarif, Syafii. 2004. *Mencari Autentisitas dalam Kegalauan,* Cet. I. Jakarta: PSAP.

Majid, Nurcholis. 1983. *Aspirasi Umat Islam Indonesia,* Cet. I. Jakarta: LEPENAS.

————————. 1994. *Demokrasi dan Demokratisasi,* dalam Elza Peldi Taher (ed), *Demokratisasi Politik, Ekonomi, dan Budaya, Pengalaman Indonesia Masa ORBA,* Cet. I. Jakarta: Para Madinah.

————————. 1993. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan,* Cet. I. Bandung: Mizan.

Ma'lf, Lois. 1956. *Fi al-Lugah wa al-Adab wa al-Ulim,* Cet. XV. Beirut: al-Mahtabah al-Katalakiyah.

Mappanganro. 1999. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Ujung Pandang: Berkah Utami.

Marimba, Ahmad D. 1986. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: al-Ma'arif.

Masnur, Muslich. 2013. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional,* Cet. III. Jakarta: Bumi Aksara.

Megawangi. 2004. Ratna *Pendidikan Karakter; Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bogor: Indonesia Heritage Foundation.

Moeloeng, Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. VI. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moesa, Ali Maschan. 2002. *NU Agama dan Demokrasi; Komitmen Muslim Tradisionalis terhadap Nilai-nilai Kebangsaaan,* Cet. I. Surabaya: Pustaka Da'i Muda.

Moh, Matsna. 2002. *Qur'an Hadits*. Jakarta: PT. Karya T. Putra.

Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. VIII. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhaimin. 2002. *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah,* Cet. I. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

————————. 2012. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi,* Cet. V. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad al-Thamawy, Al-'Amid Sulaiman. 1971. *al-Demokra¯hiyah wa al-Dustur al-Jadid,* Cet. I. Mesir: al-Istilamat al-Mishriyah.

Mulkhan, Abdul Munir. 1993. *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah,* Cet. I. Yogyakarta: SIPRESS.

Munir, Abdullah. 2010. *Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah*. Sleman: Pedagogia.

Mursi, Muhammad Munir. 1977. *al-Tarbiyah al-Islamiyah Ushuluha wa Tathawwuruha Fi al-Biladi al-Arabiyah*. Kairo: Alam al-Kitab.

Muslich, Masnur. 2013. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.

N. Kortiger, Fren. 1973. *Foundation of Behaviour Research*. New York: Holt Rinchat and Winston Inc.

Nall Burn, Edward Mc. Donald. 1955. *Western Civilization,* Cet. IV. New York: WW Norton.

Nata, Abuddin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jilid 1, Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Nawanti, Sri *Pendidikan Karakter* (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 2.

Nawanti, Sri. 2012. *Pendidikan Karakter.* Yogyakarta: Familia.

Oktavia Lanny dkk. 2014. *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren* Jakarta: Rumah Kitab & Norwegian Centre for Human Rights.

Qardawy, Yusuf. 1999. *Min Fiqh ad-Daulah fil Islam Makamatuha Ma'alimuha Thabi 'atuha Manqituha min ad-Dimokratiyah Wataadudiyah wa al-Mar'ah wa Qairul Muslimin,* diterjemahkan oleh Syarif Halim, *Fiqih Negara,* Cet. II. Jakarta: Rabbani Press.

Quthub, Muhammad. 2001. *Islam Agama Pembebas,* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

————————. *Sistem pendidikan Islam,* Cet. I. PT. Bandung: Al-Ma'arif.

Raharjo, M. Dawan. 1993. *Intelektual-Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim,* Cet. I. Bandung: Mizan.

Ramayulis. 1998. *Ilmu Pendidikan Islam,* Cet. II. Jakarta: Kalam Mulia.

Rasdiyanah, Hj. Andi. 1999. "Membangun Indonesia Baru di Era Reformasi dalam Perspektif Islam". *Makalah*. Makassar: IAIN Alauddin.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.

Rosyada, Dede. et. al. 2000. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,* Cet. I. Jakarta: Premada Media.

Rusli, Nasrum. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syrukhany Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* Cet. I. Jakarta: Logos.

Rustandi, Achmad. t.th. *Tata Negara Indonesia*. Cet. II. Bandung.

Sadhily, Hasan. 1980. *Ensiklopedia Indonesia,* Jilid. IV. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Saifuddin, Endang. 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949,* Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.

Salim, Abd. Muin. 1999. "Membangun Indonesia Baru di Era Reformasi dalam Perspektif Islam". *Makalah*. Makassar: IAIN Alauddin.

Sarensin, George. 2003. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World,* Westview Press, diterjemahkan oleh I. Made Krisna, dengan nama buku *Demokrasi dan Demokratisasi Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah,* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sarham, Munir Munsyi. 1978. *Fi Ijtimaiyyah,* Cet. III. Misra: Maktabah al-Anjlo al-Musriyyah.

Saridjo, Marwan. 1999. *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam,* Cet. I. Jakarta: Amisco.

Shaleh, Abdul Rachman. 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Cet. I. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa.

Shihab, Quraish. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Shihabuddin. 1995. *Uihul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibih± f³ al-Baiti wa al- Madrasati wa al-Mujtama,* diterjemahkan oleh Abdurrahman al-Nahlawi, *Pendidikan Islam, di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat,* Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press.

Shipman, M.D. 1972. *Education and Modernization*, Cet. I. London: Faber.

Sidi, Indra Djati. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan,* Cet. I. Jakarta: Paramadina.

Tafsir, Ahmad. 2000. *Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam,* Cet. III. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusun Bahan Penataran P-4. 1994. *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: BP-7 Pusat.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II, Cet. IV. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun. 1993. *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: BP-7 Pusat.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo. 2008. *Pengantar Pendidikan,* Cet. I. Jakarta: Rineka Cipta.

Toroni, dan Syamsul Arifin. 1994. *Islam Pluralisme Budaya dan Politik; Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan,* Cet. I. Yogyakarta: SIPRESS.

Uhbiyati, Nur. 1998. *Ilmu Pendidikan Islam,* Cet. II. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Dasar. *Pedoman Pengahayatan Dan Pengamalan Pancasila*. Ketetapan MPR No. II/MPR 1978, GBHN. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983.

Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989. t. th. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gunung Jati.

W.J.S. Poerwadarminta. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.

Yahya, Mukhtar. 1977. *Butir-butir Berharga dalam Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Zainuddin. 2008. *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah,* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS

Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I. adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan diberi amanah sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar periode 2019 sampai 2023. Lahir pada tanggal 11 Oktober 1978 di Soppeng, dan menamatkan pendidikan dasar di Watang Soppeng. Setelah menamatkan sekolah dasar, kemudian hijrah ke Kota Sengkang Kabupaten Wajo untuk mondok di salah satu pesantren tertua di Sulawesi Selatan, yaitu pesantren As'adiyah selama 6 tahun. Dan setelah tamat, ia diutus oleh Pengurus Besar As'adiyah Pusat Sengkang untuk mengajar di salah satu cabang As'adiyah di kecamatan Ajangale Kab. Bone selama 1 tahun. Kemudian, melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar pada tahun 1997 dan pada tahun tersebut juga terdaftar di Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Sejarah selama 2 semester dan Menyelesaikan studi S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar (dulu) pada tahun 2001. Selama mahasiswa, ia aktif di lembaga intra kampus, ia pernah menjadi ketua umum HMJ Pend. Bahasa Arab, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sedangkan di Ekstra kampus, ia pernah menjadi Ketua Umum FKMA As'adiyah Metro Makassar, Ketua Umum IMPS Soppeng, Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Bahasa dan

Sastra Arab Wilayah Indonesia Timur, Sekretaris Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di UIN Alauddin Makassar konsentrasi Pendidikan Bahasa Arab dan Pendidikan Islam dan selesai pada tahun 2003. Dan telah menyelesaikan Program Doktor S3 pada tahun 2012 di universitas yang sama dengan konsentrasi Pendidikan Islam dan Keguruan.

Pada tahun 2004, ia diangkat menjadi dosen tetap pada UIN Alauddin Makassar, saat ini aktif di berbagai lembaga-lembaga sosial ke Islaman seperti Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Kerukunan dan Keluarga As'adiyah periode 2012-2015, Sekretaris Umum Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Indonesia periode 2011-2014, Sekretaris Umum Pondok Pesantren Lentra Qalbu Insani Kabupaten Wajo. Sekretaris Pengurus Besar Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulsel periode 2001-2003, Sekretaris Kerukunan Keluarga Soppeng pada periode 2007-2011, Sekretaris Yayasan Kesan As'adiyah Kota Makassar, Wakil Ketua Yayasan As'adiyah University.

Selain sebagai dosen tetap pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, ia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan seperti STAI As'adiyah Sengkang, Universitas 45 Makassar, dan STAI as'ariyah Mamuju Sulawesi Barat. Buku yang pernah ditulis Nasionalisme, HAM, dan Demokrasi menggali dari khazanah Islam dan kebudayaan lokal, buku Pembaruan Pendidikan Islam di STAI Al-Gazali Soppeng, Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi dan Pluralisme, dan Mengurai Benang Kusut Pendidikan, Pendidikan Pondok Pesantren di Persimpangan Jalan, Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial, Filsafat Pendidikan Islam sebagai Buku Daras, buku terbitan 2013 dengan judul Pengembangan Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam Kerangka Transformasi Sosial, dan buku terbitan 2014 dengan Judul Peran Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Kaum Mustadhafin. Buku moral AGH K. H. Muhammad As'ad Sebagai Pembaharu Pendidikan, 2016, buku Gelombang Pendidikan di Era Milenial 2018, Buku Peran Perguruang Tinggi dalam Menangkal Radikalisme, 2020, Buku Filsafat Pendidikan Islam 2021. Dan buku ini dengan judul Menyoal Pendidikan di Era Demokrasi dan beberapa jurnal yang pernah bereputasi yang ditulis, baik lokal, nasional, maupun internasional.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

ALAUDDIN

MAKASSAR

MENYOAL PENDIDIKAN ISLAM DALAM ERA DEMOKRASI

Konsep tentang Islam dan demokrasi telah mulai mendapat tempat signifikan dalam pendidikan politik Islam modern, sebagai upaya untuk menemukan suatu basis ideologis yang diterima oleh semua kalangan. Di dalam visi dan misi kehadiran Islam, yaitu sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah. Hal ini dapat diambil adanya semangat universal (ketercakupan keseluruhan dengan rahmat) sehingga dapat beradaptasi dengan setiap bangsa dan waktu. Semangat untuk mentransformasikan rahmat, haruslah tidak terikat dengan polarisasi-polarisasi yang telah tercipta oleh kreasi manusia, semisal harus melampaui sekat-sekat politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama.

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

Alauddin University Press

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
9 786233 726030